BADAN POM

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

LAPORAN KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya

2026

Lakip Interim Triwulan II



"Akuntabel dalam Tindakan, Terpercaya dalam Pengawasan."



Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya dapat terselesaikan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pelayanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 BBPOM di Palangka Raya disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 BBPOM di Palangka Raya merupakan ikhtisar yang menjelaskan dan menggambarkan secara terperinci, lengkap dan sistematis capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur. Dalam laporan kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Palangka Raya Tahun 2026 tertuang indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja serta evaluasi dan analisis yang memadai tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan yang dapat menggambarkan pengukuran kinerja serta realisasi anggaran serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi baik internal maupun eksternal untuk perbaikan kinerja selanjutnya.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu wujud penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi kegiatan terhadap target capaian kinerja, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dan anggaran disertai analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja, untuk peningkatan kinerja BBPOM di Palangka Raya pada triwulan selanjutnya serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Palangka Raya, 20 Juli 2026
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Ali Yudhi H., S.F., Apt., M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029, dokumen Renstra menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi dengan memperhatikan tantangan, serta peluang yang timbul dari dinamika lingkungan strategis, telah ditetapkan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025-2029 sebagai arah pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan publik UPT yang prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Laporan Kinerja interim 2 Tahun 2026 BBPOM di Palangka Raya merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang pada dokumen Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029 dengan melaksanakan 21 program kegiatan untuk mencapai 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2026, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM Palangka Raya pada triwulan 2 tahun 2026 adalah **103.01** dengan Predikat NKO **Istimewa**. Pencapaian 28 indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100,90%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
2. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **103,29%** dengan kriteria **Sangat Baik.**
4. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **100,00%** dengan kriteria **Baik.**

5. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **105,73%** dengan kriteria **Sangat Baik.**
6. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder **berhasil tercapai** dengan capaian **111,46%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
7. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100,00%** dengan kriteria **Baik.**
8. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **114,94%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**
9. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **102,39%** dengan kriteria **Sangat Baik.**
10. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **106,94%** dengan kriteria **Sangat Baik.**
11. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100,84%** dengan kriteria **Sangat Baik.**
12. Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian **97,52%** dengan kriteria **Baik.**
13. Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT belum dapat dinilai pencapainnya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
14. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **berhasil tercapai** dengan capaian **100,39%** dengan kriteria **Sangat Baik.**
15. Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
16. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik.**
17. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **101,46%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
18. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik.**
19. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik.**
20. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas **berhasil tercapai** dengan capaian **112,50%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**
21. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPPCPOB Pangan Olahan **berhasil tercapai** dengan capaian **100,78%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
22. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **151,52%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

23. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik.**
24. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
25. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
26. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
27. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
28. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.

Dari dua puluh delapan Indikator Kinerja Utama tersebut mendukung pencapaian 8 Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan 2 tahun 2026, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, **berhasil tercapai** dengan capaian **103,17%** yang diukur dengan 15 indikator kinerja. Dari 15 indikator kinerja, 12 sudah dapat diukur capaiannya dengan hasil 11 telah capaian realisasinya telah mencapai atau melampaui 100% dan 1 indikator belum mencapai 100%.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik**.**
3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **102,87%** yang diukur dengan 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator tersebut capaian realisasinya telah mencapai atau melampaui 100%
4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu **berhasil tercapai** dengan capaian **100,78%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB Pangan Olahan berhasil tercapai dengan capaian 100,78% dengan kriteria Sangat baik**.**
5. Sasaran Kegiatan Kelima, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **110,00%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 151,52% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan**.**
6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik**.**

7. Sasaran Kegiatan Ketujuh, Layanan Publik UPT terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT dan belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
8. Sasaran Kegiatan Kedelapan, Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal terdiri atas 4 Indikator Kinerja dan belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.

Dalam pencapaian tujuannya, Balai Besar POM di Palangka Raya didukung sumber daya anggaran sebesar Rp. 17.418.072.000. (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang tertuang pada dokumen DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.2.432872/2026 tanggal 01 Desember 2025. Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Pada akhir triwulan 1 tahun 2026 pagu yang dikelola menjadi Rp. 15.575.335.000,- dengan blokir anggaran Rp 20.000.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 15.555.335.000,- dan pada triwulan 2 tahun 2026 terjadi 2 kali perubahan pagu anggaran yang dikelola pertama adalah sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM Nomor : PR.05.03.2.04.26.260 perihal Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 tanggal 08 April 2026 yang menyebabkan penguranan total pagu anggaran yang dikelola menjadi Rp Rp 15.571.430.000,- kemudian untuk menidaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM Nomor : PR.05.03.2.05.26.353 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 tanggal 11 Mei 2026 pagu yang dikelola mengalami penyesuaian menjadi Rp 15.588.010.000,- dengan blokir anggaran Rp 20.000.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2026 adalah Rp 7.259.677.509,- yang berarti 46.57% dari pagu awal dan 46,63% dari pagu efektif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu efektif paling rendah pada belanja barang yaitu 38.21% dan paling tinggi pada belanja pegawai yang telah direalisasikan 53.62%. Dari 21 Rincian output (RO) 13 RO telah efisien dengan dan 8 RO tidak efisien. Secara umum capaian efisiensi mulai dari -0.15 sampai 6.31 dan secara total capaian efisiensi BBPOM Palangka Raya triwulan 2 tahun 2025 adalah 0,89 dengan kriteria 88% efisien. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang capaian efisiensi adalah dari -0,10 hingga 1,97 dari 28 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya. Dari 28 Indikator kinerja 7 Indikator kinerja belum dalam diukur , 11 Indikator kinerja telah efisien dan 10 indikator kinerja tidak efisien. secara total capaian efisiensi Indikator kinerja BBPOM Palangka Raya triwulan 2 tahun 2026 adalah 0,50 dengan kriteria 92% efisien.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kinerja pada periode ini dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, antara lain kebijakan efisiensi anggaran nasional, keterbatasan sumber daya manusia, karakteristik geografis wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan sulit dijangkau, serta meningkatnya kompleksitas pengawasan, khususnya terhadap peredaran obat dan makanan melalui media digital. Dari aspek organisasi, pemenuhan SDM baru mencapai **70,97%** berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), disertai kesenjangan kompetensi terhadap standar jabatan dan masih adanya pegawai yang belum dapat dikembangkan

secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi beban kerja belum merata sehingga sebagian tugas administratif harus didukung oleh jabatan fungsional teknis, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas teknis serta pencapaian kinerja organisasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, BBPOM di Palangka Raya melakukan penguatan tata kelola melalui transformasi proses bisnis, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, serta pengembangan inovasi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi. Pada aspek **pelayanan publik**, inovasi **SMART LAURA (Smart Public Service–Layanan Publik Jarak Jauh)** menghadirkan layanan *tele-public service* melalui pemanfaatan *doorbell* interaktif dan *CCTV* dua arah pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan DPMPTSP sehingga mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi anggaran dengan pendekatan *low cost–high impact*, serta mengoptimalkan pemanfaatan SDM tanpa penambahan pegawai. Pada aspek **integritas**, inovasi **SIGAP (Survei Integritas Garda Pengawasan)** dikembangkan sebagai instrumen evaluasi *real-time* untuk memastikan setiap petugas pengawas dan petugas layanan publik senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika pelayanan, sekaligus membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Pada aspek **akuntabilitas**, inovasi **TALAWANG (Tata Kelola Perjalanan Dinas Terintegrasi)** mendukung pengelolaan perjalanan dinas secara digital, efektif, transparan, dan terdokumentasi sehingga meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperkuat pengendalian anggaran, memudahkan monitoring realisasi kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan, BBPOM di Palangka Raya mengembangkan **SPBE Batang Garing** sebagai *portal gateway* inovasi digital yang menghimpun, mengelola, dan menyediakan akses terintegrasi terhadap berbagai aplikasi dan inovasi yang dikembangkan oleh setiap kelompok kerja. Portal ini menjadi pusat layanan digital organisasi yang memudahkan pegawai maupun pemangku kepentingan dalam mengakses berbagai layanan dan inovasi secara cepat, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam menjawab tantangan keterbatasan SDM dan kesenjangan kompetensi, dikembangkan inovasi **TAMBUN RAYA (Talenta Aparatur Mumpuni Berintegritas dan Unggul BBPOM di Palangka Raya)** sebagai sistem terintegrasi untuk pengelolaan talenta aparatur dan pengembangan kompetensi pegawai secara sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Inovasi ini mendukung pemetaan potensi pegawai, penyusunan rencana pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi, optimalisasi penempatan talenta, serta penguatan kapasitas SDM guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

Seluruh inovasi tersebut diintegrasikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko terintegrasi, digitalisasi proses bisnis, pengelolaan anggaran berbasis output, serta kolaborasi lintas sektor sebagai upaya membangun tata kelola yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja, BBPOM di Palangka Raya juga menerapkan mekanisme *early warning system* kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data, penetapan prioritas pengawasan berdasarkan risiko, serta optimalisasi pemanfaatan SDM melalui pengaturan beban kerja yang lebih proporsional dengan tetap memperhatikan kapasitas kerja dan kesehatan mental pegawai guna meminimalkan risiko *burnout*.

Berbagai strategi dan inovasi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran organisasi di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi. Sampai dengan Triwulan

II Tahun 2026, BBPOM di Palangka Raya berhasil mempertahankan kinerja organisasi dengan capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,01** dengan predikat **Istimewa**. Capaian tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi landasan untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Palangka Raya 20 Juli 2026
Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
Di Palangka Raya



Ali Yudhi Hartanto

April 2026

BBPOM DI PALANGKA RAYA PERLUAS AKSES LAYANAN, SMART LAURA KINI HADIR DI BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA





Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan mendekatkan pelayanan Badan POM kepada masyarakat di Kalimantan Tengah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya resmi melakukan instalasi inovasi SMART LAURA di Kantor DPMPTSP Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya pada Selasa (31/03/2026). Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen BBPOM di Palangka Raya untuk menghadirkan pelayanan yang tidak terhambat oleh jarak geografis. Dengan hadirnya SMART LAURA di kedua kabupaten tersebut, masyarakat kini dapat berkonsultasi langsung dengan petugas di BBPOM Palangka Raya tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota provinsi.

PERKUAT KOLABORASI INFORMASI PUBLIK DAN SINERGI EDUKASI MASYARAKAT, BBPOM PALANGKA RAYA APRESIASI PERAN STRATEGIS LPP RRI PALANGKA RAYA



Senin, 06 April 2026 Dalam rangka mendukung peningkatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. BBPOM di Palangka Raya menyerahkan secara langsung apresiasi dan penghargaan kepada LPP RRI Palangka Raya atas peran aktif dan kontribusinya sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
BBPOM Palangka Raya bersama RRI bersinergi melalui program siaran dan kolaborasi yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi MoU yang telah disepakati bersama. LPP RRI Palangka Raya turut berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat serta pemilihan makanan yang aman dan bergizi. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN MELALUI SINERGI LINTAS SEKTOR DI KAB. PULANG PISAU



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya terus memperkuat peran edukatifnya kepada masyarakat melalui kegiatan bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan melalui Sinergi Lintas Sektor yang dilaksanakan pada 15 April 2026 di Kabupaten Pulang Pisau.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai bagian dari upaya strategis membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan pangan sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, tenaga kesehatan, serta pihak sekolah, guna memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat.

4.Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Mei 2026

APRESIASI KONSISTENSI PENGAWASAN PANGAN: PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERIMA PIAGAM PENGHARGAAN KOTA PANGAN AMAN 2025 DENGAN LEVEL SEDANG



Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjamin kualitas dan keamanan konsumsi masyarakat membuahkan hasil nyata. Pemerintah Kota Palangka Raya resmi menerima penghargaan sebagai Kota Pangan Aman dengan predikat Level Sedang untuk capaian tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto kepada Pemerintah Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya (Asisten II), Samsul Rizal, bertempat di ruang pertemuan Kantor Sekda Kota Palangka Raya.

KOMITMEN LAYANAN TANPA DISKRIMINASI: BBPOM PALANGKA RAYA INISIASI PENILAIAN P2HAM KE KANWIL KEMENHAM KALTENG



Sinergi antar-instansi pemerintah di Kalimantan Tengah kembali menguat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada Kamis (7/5/2026), Kepala BBPOM di Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt., MM melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil KemenHAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, S.H., M.H., guna membahas pengajuan penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) bagi unit pelayanan di BBPOM di Palangka Raya.

SINERGI LINTAS SEKTOR, TIM GABUNGAN GELAR JOINT INSPECTION DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMK PANGAN OLAHAN BERBAHAN BAKU HASIL PERIKANAN DI KOTA PALANGKA RAYA



Dalam upaya memperkuat daya saing dan menjamin keamanan pangan produk lokal, tim gabungan dari berbagai instansi teknis melaksanakan aksi Joint Inspection (Inspeksi Bersama) dalam rangka pendampingan pelaku UMK pangan olahan di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini merupakan langkah nyata pendampingan bagi para pelaku UMK yang bergerak di sektor pengolahan hasil perikanan.

4.Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Juni 2026

BBPOM DI PALANGKA RAYA PERKUAT KOMPETENSI PELAKU USAHA IRTP MELALUI BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI KOTAWARINGIN TIMUR



BBPOM di Palangka Raya menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Keamanan Pangan bagi puluhan pelaku usaha IRTP yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Rabu 08 Juli 2026 bertempat di Aula Hotel Aquarius Sampit

BBPOM DI PALANGKA RAYA BEKALI MAHASISWA SINERGI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN SERTA MEWASPADAI PENYALAHGUNAAN OBAT



Guna membekali generasi muda dengan pemahaman regulasi obat dan makanan serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Kuliah Umum.
Dalam kesempatan ini, Kepala BBPOM di Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, S.F., Apt., M.M., memaparkan materi komprehensif yang mengupas tuntas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPOM, pentingnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai salah satu pilar pengawasan obat dan makanan, fenomena penyalahgunaan obat, hingga motivasi bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan kelulusan serta persaingan di dunia kerja

INOVASI P3K PAMAN PERKUAT PENDAMPINGAN PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN DI KOTAWARINGIN TIMUR



Rabu, 8 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Pers Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur BBPOM di Palangka Raya melaksanakan kegiatan pendampingan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Hal ini bertujuan dalam upaya mendukung perwujudan Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) di wilayah Kalimantan Tengah.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI xiii
BAB 1. PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Gambaran Umum Organisasi 3
1.3 Struktur Organisasi 5
1.4 Isu Strategis 5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA 20
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 20
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026 22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 23
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 25
2.5 Metode Pengukuran 42
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 49
3.2 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja Triwulan 2 tahun 2026 240
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 281
3.3 Realisasi Anggaran 284
BAB 4. Penutup 300
Lampiran 305

BADAN POM

BAB 1

Pendahuluan

- *Latar Belakang*
- *Gambaran Umum Organisasi*
- *Struktur Organisasi*
- *Isu Strategis*



Laporan Kinerja 2026

Balai Besar POM di Palangka Raya

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya saing. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Peran tersebut dijalankan secara berjenjang hingga ke berbagai wilayah di Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki tantangan konektivitas menuntut adanya pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. Di sisi lain, akselerasi digitalisasi telah mengubah pola distribusi dan konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dimana transaksi melalui *platform* daring semakin mendominasi. Kondisi ini meningkatkan potensi peredaran produk ilegal, sehingga memerlukan penguatan sistem intelijen dan optimalisasi patroli siber.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, BBPOM di Palangka Raya tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi pelaku usaha. Pendampingan terhadap UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu produk menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dan pembinaan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BBPOM di Palangka Raya menyusun Laporan Kinerja Interim I Tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil yang telah ditetapkan.

Laporan ini memuat uraian mengenai pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) BBPOM di Palangka Raya. Melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja, laporan ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan kinerja (*performance gap)* serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

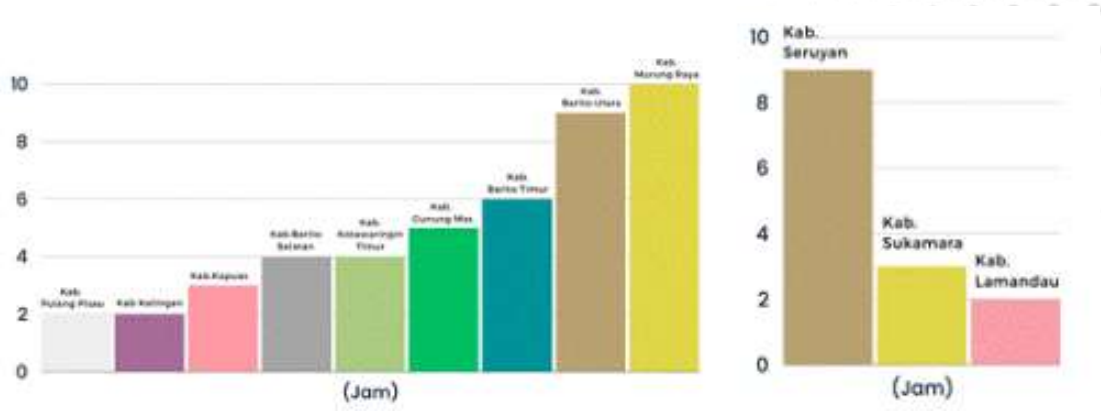
1.2 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Palangka Raya merupakan salah satu UPT di lingkungan BPOM yang menjalankan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat daerah. Keberadaan dan tata kelola UPT BPOM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah UPT BPOM secara nasional terdiri atas 26 (dua puluh enam) Balai Besar POM, 37 (tiga puluh tujuh) Balai POM, dan 20 (dua puluh) Loka POM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat dua UPT BPOM yang memiliki wilayah kerja masing-masing sebagai berikut:

a. BBPOM di Palangka raya dengan cakupan pengawasan 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur
b. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cakupan pengawasan 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara.

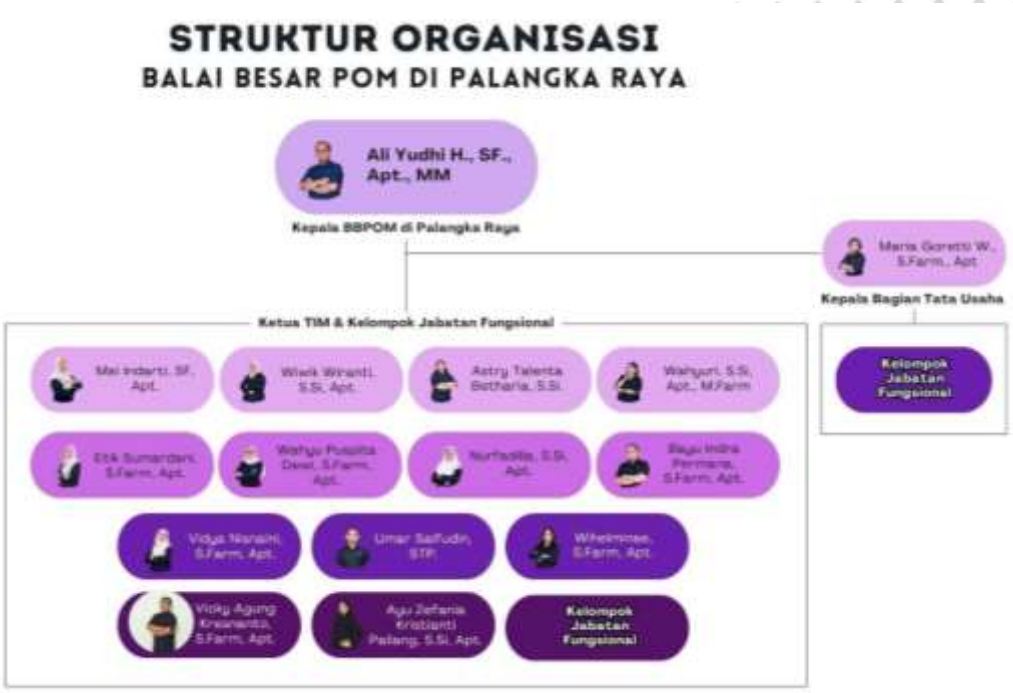




Sebagai UPT BPOM, BBPOM di Palangka Raya memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala BBPOM di Palangka Raya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Guna mengawal pencapaian indikator kinerja dan memastikan efektivitas pencapaiannya, Kepala BBPOM di Palangka Raya didukung oleh 14 Tim Kerja yang dipimpin oleh seorang ketua tim. Seluruh Ketua Tim tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai dalam mengampu pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.4 Isu Strategis

I. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah SDM belum memadai

SDM Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan akhir bulan Juni 2026 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang ASN yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) orang PNS dan 14 (empat belas) orang PPPK untuk memenuhi beban kerja 111 orang yang baru terpenuhi sebesar 58.56% dengan proporsi 72.31% perempuan dan 27.69% laki-laki. Jumlah SDM tersebut tentunya sangat tidak memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

ABK BBPOM di Palangka Raya berdasarkan SIREN (Juni, 2026)					
No	Jabatan	Eksisting	ABK	GAP	Pemenuhan ABK (%)
1	Struktural	2	2	0	100
2	Fungsional Ketatausahaan	9	36	-27	25.00
3	Fungsional PFM	42	73	-31	58.00
4	Pelaksana	12	0	+12	-
5	Tugas Belajar	0	0	-	-
		65	111	-46	58.56%

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Palangka Raya memerlukan SDM sebanyak 111 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 49 orang. Perhitungan pemenuhan ABK 58.56% didapat dari pemenuhan ABK Struktural 100%, Fungsional Ketatausahaan 25.00% dan Fungsional PFM 58.00%. Pada tahun 2026 ini jumlah pegawai fungsional PFM akan berkurang sebanyak 2 orang dikarenakan mutasi dan pada tahun 2027 jumlah pegawai fungsional PFM akan berkurang sebanyak 1 orang dikarenakan pegawai memasuki masa purnabakti. Sedangkan pada fungsi ketatausahaan berkurang sebanyak 2 orang pada tahun 2026 dikarenakan pegawai memasuki masa purnabakti. Pada triwulan 2 tahun 2026, dari 65 orang total pegawai, didukung 14 orang PPPK (21.54%) dengan sebaran yang sama yaitu 7 orang (50%) yang mendukung pada fungsi teknis dan 7 orang (50%) pada dukungan manajemen. Pada fungsi teknis pengawasan obat dan makanan, pemenuhan ABK rata-rata berkisar 5.48% sampai dengan 26.03%, terendah pada fungsi penindakan dan tertinggi pada fungsi pengujian.

b. Isu Kesehatan Kerja

Kekosongan jabatan administratif fungsional seperti Analis SDM Aparatur dan Perencana di unit Tata Usaha memicu tumpang tindih beban kerja bagi pegawai yang ada, sehingga menurunkan fokus pegawai yang terkena limpahan beban kerja, terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya secara optimal. Selain pada bagian tata usaha, *overload* beban kerja juga dialami di fungsi teknis pengawasan obat dan makanan, dimana satu orang pegawai terpaksa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 2-3 orang karena kurangnya jumlah SDM pada unit kerja. Dari data diperoleh informasi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya terdapat *gap* 6 orang (pemenuhan ABK hanya 60.00%) Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda terdapat *gap* 17 orang (pemenuhan ABK hanya 41.38%) dan PFM Ahli pertama terdapat *gap* 13 orang (pemenuhan ABK hanya 55.17%).

Belum terpenuhinya kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) serta masih adanya kesenjangan kompetensi terhadap standar jabatan mengakibatkan kapasitas organisasi belum optimal. Pemenuhan ABK, khususnya pada fungsi dukungan manajemen, masih sangat rendah (sekitar

20%), sehingga sebagian tugas administratif harus dilaksanakan oleh jabatan fungsional teknis. Kondisi ini berdampak pada distribusi peran dan tanggung jawab yang tidak merata. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan beban kerja yang berpotensi menurunkan efektivitas kinerja, meningkatkan risiko kelelahan pegawai baik secara mental maupun fisik, serta menyebabkan pelaksanaan tugas teknis tidak berjalan optimal karena terbagi dengan tugas administratif, sehingga menghambat optimalisasi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

c. Gap Kompetensi

Selain jumlah pegawai, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Palangka Raya adalah S1 dan Profesi Apoteker. Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai organisasi yang *scientific based* perlu lebih banyak didukung SDM dengan Pendidikan S2 yang lebih banyak dari yang ada saat ini. Pemenuhan pendidikan S2 dapat dilakukan melalui tugas belajar lepas jabatan atau izin belajar sambil bekerja dengan pilihan perguruan tinggi yang sangat terbatas, hanya terdapat pilihan Universitas Terbuka dan Universitas Telkom.

Secara umum capaian kompetensi manajerial sosial kultural dan kompetensi teknis fungsi PFM pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Palangka Raya yang diambil dari data pemetaan kompetensi paling mutakhir di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 35.59% optimal, dengan jumlah terbanyak pada fungsi pengujian (40.00%) pada level jabatan PFM Ahli Pertama (75.00%)
- 40.68% cukup optimal, dengan jumlah terbanyak pada fungsi pengujian (37.50%) pada level jabatan PFM Ahli Muda (44.44%)
- 23.73% kurang optimal dengan jumlah terbanyak pada fungsi pemeriksaan (38.46%) pada level jabatan PFM Ahli Muda (40.00%) dan Madya (40.00%)
- Capaian kompetensi teknis fungsi PFM 26.32% optimal, 21.05% cukup optimal dan 52.63% kurang optimal.

Data tersebut memberikan gambaran objektif bahwa distribusi beban kerja yang tidak merata bukan disebabkan oleh kegagalan manajerial dalam membagi tugas, melainkan merupakan konsekuensi logis dari profil kompetensi pegawai yang ada. Dengan hanya 35.59% pegawai yang memiliki kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kategori optimal, organisasi secara alamiah bergantung pada segelintir personel tersebut untuk mengawal target-target strategis.

Kondisi ini menciptakan fenomena penumpukan beban kerja pada pegawai bertalenta tinggi, terutama di fungsi pengujian yang secara data memiliki persentase Manajerial dan Sosial Kultural optimal tertinggi (40,00%). Hal ini menjadi ironis karena di sisi lain, fungsi teknis PFM justru menghadapi tantangan besar dengan 52.63% kompetensi teknis yang masih masuk kategori kurang optimal. Akibatnya, pegawai yang memiliki kombinasi kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural optimal dan kemampuan teknis

mumpuni harus memikul tanggung jawab ganda yaitu menyelesaikan target teknis fungsi sekaligus menambal keterbatasan kompetensi manajerial, sosial, kultural di fungsi lainnya. Stabilitas kinerja organisasi tidak dapat bergantung pada ketahanan individu semata, melainkan pada sistem kekuatan kolektif yang merata.

Kesenjangan pemenuhan ABK dan kompetensi yang signifikan secara linier berkontribusi pada risiko kelelahan mental akibat beban kerja yang melampaui kapasitas riil personel, sehingga diperlukan upaya besar dalam mengakselerasi peningkatan jumlah dan kompetensi SDM guna menjawab tantangan pengawasan yang kian kompleks. Oleh karena itu, tantangan strategis bagi BBPOM di Palangka Raya ke depan adalah melakukan penyesuaian pola kerja dan akselerasi peningkatan kompetensi SDM. Langkah ini harus dibarengi dengan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif demi menjaga stabilitas fisik serta mental pegawai, guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan dukungan manajemen tetap terjaga di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

II. Sumber Daya Anggaran

a. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dimana telah memasuki tahun kelima sejak pengalokasian perdananya di tahun 2020. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

DAK NF BPOM tahun 2026 diberikan kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikawal oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun anggaran DAK ini dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana.

b. DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya
Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2026 Nomor: SP.DIPA-063.01.2.432872/2026 Tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp 17.418.072.000 sampai dengan triwulan 2 tahun 2026 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 3 kali Revisi DIPA, terdiri dari 1 kali revisi

kewenangan KPA, 1 kali revisi kewenangan kanwil dan 1 kali revisi kewenangan DJA, dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu
1	51	5.211.479.000	-
2	52	7.885.797.000	20.000.000
3	53	2.490.734.000	-
TOTAL		15.588.010.000	20.000.000

Dalam pengelolaan pagu tersebut, satuan kerja juga senantiasa mengintegrasikan prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG merupakan anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan.

Bila sebelumnya telah dikenal istilah anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Anggaran berbasis kinerja memiliki tiga nilai inti yakni *Efficiency, Effectiveness* dan *Economy*. Anggaran Responsif Gender melengkapi satu nilai inti lagi, yakni Equity. Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi anggapan yang kurang tepat, jika: ARG adalah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; ARG berarti alokasi anggaran 50% laki-laki dan 50% perempuan; adanya ARG berarti adanya penambahan anggaran yang dikhususkan untuk perempuan dan ARG hanya untuk kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.

Adapun pelaksanaan kegiatan saat ini menghadapi hambatan yang signifikan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi ruang gerak operasional dan ketersediaan sumber daya pendukung. Keterbatasan dana ini sering kali berbenturan dengan tuntutan target kinerja yang tetap tinggi, sehingga menciptakan beban kerja yang tidak proporsional bagi aparatur di lapangan. Kondisi tersebut menuntut adanya pergeseran strategi dari pola kerja konvensional menuju pengembangan inovasi yang berfokus pada simplifikasi proses dan efisiensi birokrasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital atau rekayasa model layanan yang lebih praktis, organisasi dapat memangkas tahapan administratif yang repetitif, sehingga beban kerja dapat diringankan tanpa mengurangi kualitas output pelayanan publik yang dihasilkan.

III. Mesin/Perlengkapan

a. Kesiapan Infrastruktur Digital

Akselerasi transformasi digital dalam proses perizinan dan pelaporan pada awal tahun 2026 masih dihadapkan pada tantangan stabilitas infrastruktur pendukung. Sering terjadinya kendala pada performa server serta belum optimalnya integrasi antar-aplikasi internal menyebabkan hambatan dalam alur kerja dan validasi data secara *real-time*. Isu ini menjadi sangat strategis karena ketidakstabilan sistem digital tidak hanya menghambat produktivitas pegawai dalam menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga berpotensi menurunkan

kualitas pelayanan publik kepada pelaku usaha yang mengharapkan kepastian waktu dan kemudahan akses layanan.

b. Kondisi Sarana Prasarana

Keandalan sarana prasarana fisik tetap menjadi faktor penentu efektivitas pengawasan di lapangan dan akurasi hasil pengujian di laboratorium. Memasuki periode tahun 2026, organisasi perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kelayakan kendaraan operasional yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja yang luas, mengingat beberapa unit mulai menunjukkan penurunan performa yang dapat menghambat mobilitas tim pengawas. Upaya mitigasi yang dilakukan dengan pengecekan berkala dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional.

Selain itu, tantangan lainnya adalah pemutakhiran alat dan instrumen laboratorium seiring dengan kebutuhan peningkatan kemampuan uji parameter-parameter baru yang berkembang serta kebutuhan akan kalibrasi rutin serta pemeliharaan alat dan instrumen laboratorium menjadi isu krusial demi menjamin validitas pengujian produk obat dan makanan agar tetap memenuhi standar regulasi yang berlaku.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung laboratorium, seperti meja dan kursi kerja yang sudah tidak layak serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang belum optimal, secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kondisi infrastruktur bangunan laboratorium yang saat ini pun dinilai tidak lagi memadai untuk menampung beban kerja pengujian yang dinamis turut menjadi kendala dalam upaya mempertahankan standar pelayanan dan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

c. Pemanfaatan Teknologi Baru

Upaya organisasi untuk mengadopsi teknologi informasi terkini masih menemui hambatan dalam aspek pengadaan serta proses adaptasi perangkat pendukung. Kesenjangan antara kebutuhan teknologi mutakhir dengan ketersediaan perangkat keras maupun lunak yang mumpuni seringkali terkendala oleh prosedur pengadaan yang kompleks dan keterbatasan anggaran. Isu ini diperumit dengan tantangan dalam menyelaraskan teknologi baru dengan sistem yang sudah ada (*legacy system*), sehingga diperlukan strategi mitigasi yang tepat agar investasi teknologi dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan tidak sekadar menjadi beban administratif tambahan. Kewajiban pengadaan alat utama dan pendukung yang berbasis Produk Dalam Negeri (PDN) turut menjadi kendala operasional tersendiri, mengingat ketersediaan spesifikasi teknis yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium terkadang masih terbatas di pasar domestik.

d. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk menjamin mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat

melalui pengujian secara kimia maupun mikrobiologi. Respon cepat dalam menindaklanjuti ditemukannya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat seperti dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang terkait lainnya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam melakukan proses pengujian sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal).

Balai Besar POM di Palangka Raya berupaya meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas pengujian baik dari sisi infrastruktur terkait pemenuhan standar peralatan laboratorium, standar kompetensi SDM penguji serta pengembangan metode analisa melalui pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan adanya upaya tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini Balai Besar POM di Palangka Raya telah didukung dengan instrumen laboratorium teknologi kompleks seperti, GCMS dan *real time* PCR serta secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi personil dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis pengujian baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu perencanaan kegiatan verifikasi metode analisa yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu metode analisis yang sudah divalidasi sebelumnya dapat digunakan dengan andal di laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya telah rutin dijadwalkan setiap tahunnya untuk memenuhi standar Ruang Lingkup pengujian.

Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin pesatnya industri obat dan makanan, membawa perubahan yang cepat dan signifikan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi perubahan tersebut. Tantangan pengujian yang semakin kompleks berkaitan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan digitalisasi perdagangan memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis terkait kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan ketersediaan sarana dan prasarana dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengujian.

Keterbatasan dalam anggaran pengadaan alat laboratorium serta kebutuhan reagensia dan media yang diperlukan dalam proses pengujian menimbulkan gagasan konsep regionalisasi laboratorium. Regionalisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Laboratorium pengujian Badan POM. Melalui konsep regionalisasi BBPOM di Palangka Raya telah dilengkapi dengan instrumen mutakhir untuk mendukung pengujian parameter uji spesifik seperti LCMSMS dan GCMS, namun seiring dengan berubahnya konsep regionalisasi dengan penggolongan laboratorium menjadi beberapa tingkat atau tier berdampak pada pemindahan alat LCMSMS ke laboratorium balai unggulan yaitu BBPOM di Samarinda pada tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian.

IV. Metode

a. Simplifikasi Prosedur

Urgensi dalam melakukan simplifikasi prosedur menjadi sorotan utama, terutama terkait efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung percepatan sertifikasi bagi pelaku UMKM. Isu yang berkembang adalah apakah tata kerja saat ini sudah cukup praktis dan adaptif untuk memayungi inovasi pendampingan yang sedang dijalankan tanpa mengurangi esensi pengawasan. Diperlukan evaluasi mendalam untuk memangkas birokrasi yang repetitif agar proses asistensi menjadi lebih singkat dan efisien, sehingga pelaku usaha kecil dapat memperoleh kepastian hukum dan sertifikasi produk secara lebih cepat di tengah kompetisi pasar yang dinamis.

b. Sinkronisasi Regulasi

Memasuki awal tahun 2026, munculnya beberapa peraturan terbaru dari Badan POM menuntut adanya penyesuaian tata kerja internal yang responsif dan akurat. Isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana memastikan seluruh kebijakan di tingkat unit pelaksana teknis tetap selaras dengan regulasi nasional terbaru guna menghindari terjadinya kevakuman hukum atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Proses sinkronisasi ini memerlukan telaah regulasi yang komprehensif agar implementasi kebijakan di daerah tetap konsisten dan tidak menghambat alur layanan publik yang sudah berjalan.

c. Efektivitas Koordinasi

Evaluasi terhadap metode komunikasi internal dan koordinasi lintas fungsi menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penugasan antar-unit kerja. Dinamika beban kerja yang tinggi seringkali mengungkap adanya celah komunikasi yang menyebabkan duplikasi instruksi atau justru terabaikannya beberapa aspek pengawasan tertentu. Oleh karena itu, penguatan pola koordinasi yang lebih terintegrasi dan transparan menjadi isu krusial agar kolaborasi antar-fungsi teknis maupun administratif dapat berjalan harmonis, efektif, dan mendukung pencapaian target organisasi secara kolektif.

d. Konsep Regionalisasi Laboratorium

Fungsi pengujian dalam pengawasan obat dan makanan menjadi salah satu pilar utama BPOM dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan dimana hasil pengujian laboratorium menjadi landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan atas produk dibawah pengawasannya. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan maka sejak tahun 2022 telah diterapkan sistem Regionalisasi Laboratorium yang kemudian disempurnakan pada tahun 2023 dengan konsep baru regionalisasi laboratorium.

Proses perubahan konsep regionalisasi dilakukan pada pertengahan pada tahun 2023 antara lain dengan pemindahan peralatan canggih yang selama ini tersebar ke Laboratorium Regional antara lain LCMSMS, DUSA, dan Isolator; peningkatan kompetensi dan jumlah analis sesuai beban kerjanya. Dengan perubahan menjadi Konsep baru Regionalisasi Laboratorium diharapkan lebih

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan makanan di seluruh pelosok negeri.

Pada konsep baru Regionalisasi ini dilakukan pemusatan pengujian unggul di salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional pada setiap region. Terdapat total 8 (delapan) Laboratorium Regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap menjadi laboratorium dengan peralatan yang canggih dan menjadi rujukan bagi laboratorium anggota dalam region tersebut. Laboratorium Regional tersebut adalah : Laboratorium di BBPOM Medan, BBPOM Pekanbaru, BBPOM Semarang, BBPOM Samarinda, BBPOM Manado, BBPOM Makasar, BBPOM Surabaya dan terakhir adalah BBPOM di Jayapura. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 137 tahun 2026 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya penyempurnaan konsep regionalisasi ini maka penajaman perencanaan pengujian dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai.

V. Lingkungan

a. Budaya Kerja (Internal)

Internalisasi nilai-nilai dasar ASN *BerAKHLAK* menjadi instrumen krusial dalam menjaga stabilitas iklim kerja di tengah tekanan kinerja yang semakin masif pada awal tahun 2026. Isu strategis yang muncul adalah sejauh mana nilai-nilai tersebut tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar mampu menjadi fondasi motivasi pegawai dalam menghadapi beban kerja yang tinggi. Tantangannya terletak pada upaya menjaga konsistensi perilaku kerja yang profesional, akuntabel, kompeten, adaptif terhadap perubahan yang cepat dan senantiasa berorientasi pelayanan kepada masyarakat agar semangat kolaborasi tetap terjaga, sehingga potensi stres dalam pekerjaan dapat dimitigasi melalui penguatan budaya saling mendukung antar pegawai untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan loyalitas pegawai pada instansinya.

b. Kondisi Eksternal/Wilayah

Tantangan geografis yang ekstrem di wilayah kerja, didominasi oleh kontur wilayah perairan sungai yang luas serta bentang alam hutan yang masif menciptakan tantangan aksesibilitas ekstrem dimana jangkauan pengawasan seringkali menuntut waktu tempuh yang panjang dan biaya logistik yang tinggi, tetap menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pendampingan. Kendala infrastruktur transportasi menuju daerah pelosok ini seringkali beriringan dengan dinamika sosial-ekonomi lokal, dimana tingkat literasi pelaku usaha terhadap regulasi masih sangat bervariasi. Hal ini menimbulkan isu strategis terkait pemerataan kualitas layanan, dimana organisasi dituntut untuk menciptakan strategi komunikasi dan pengawasan yang adaptif agar kepatuhan pelaku usaha di daerah terpencil dapat setara dengan pelaku usaha di perkotaan.

c. Sinergi Budaya, Kewirausahaan, Pelestarian Tanaman Obat serta Keamanan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah

Budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah secara historis memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan alam, dimana filosofi hidup harmonis bersama hutan dan sungai telah menyediakan sumber pangan serta kebutuhan hidup yang melimpah secara alami. Namun, keberlimpahan sumber daya alam ini secara sosiokultural menciptakan tantangan berupa zona nyaman yang cenderung menghambat dorongan untuk melakukan upaya ekstra (*effort*) dalam membuka unit usaha mandiri atau melakukan hilirisasi produk lokal secara kompetitif. Kondisi ini diperumit dengan masih terbatasnya pemahaman mendalam mengenai standar keamanan obat dan makanan, di mana ketergantungan pada pengolahan tradisional seringkali belum bersinggungan dengan regulasi teknis terkait sanitasi higiene, bahan tambahan pangan atau legalitas izin edar. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif yang mampu mengubah pola pikir dari sekadar pengambil hasil alam menjadi pengelola usaha yang inovatif, dengan tetap mengedepankan edukasi keamanan produk guna menjamin kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai jual komoditas khas daerah di pasar yang lebih luas.

Dalam tatanan sosial masyarakat Dayak, terdapat hukum adat yang sangat ketat mengenai pemanfaatan tanaman obat yang tumbuh di alam, dimana kekayaan hayati tersebut dianggap sebagai titipan leluhur yang tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Aturan adat menetapkan bahwa tanaman obat yang berasal murni dari hutan hanya boleh diambil secukupnya untuk keperluan pengobatan orang yang benar-benar sakit dan bersifat non-komersial sebagai bentuk penghormatan terhadap keseimbangan ekosistem. Larangan komersialisasi tanaman dari alam ini bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan akibat keserakahan manusia, sehingga menciptakan urgensi bagi pengembangan budidaya mandiri di luar kawasan hutan. Dengan melakukan budidaya tanaman obat secara terstruktur, masyarakat dapat menyediakan bahan baku secara berkelanjutan untuk kebutuhan ekonomi tanpa melanggar ketentuan adat maupun merusak kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi identitas utama suku Dayak.

d. Dukungan Stakeholder

Sinergitas dengan Pemerintah Daerah, instansi lintas sektoral, BUMN dan swasta merupakan kunci keberhasilan pengawasan obat dan makanan secara terpadu di wilayah. Isu yang berkembang saat ini adalah perlunya memperkuat komitmen bersama agar koordinasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh level teknis operasional, seperti integrasi pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan atau dukungan perizinan bagi UMKM. Efektivitas kolaborasi ini menjadi strategis karena keterbatasan sumber daya internal organisasi dapat dioptimalkan.

e. Lingkungan Pengujian

Green Laboratory atau Laboratorium Hijau merupakan sebuah konsep revolusioner dalam pengelolaan fasilitas laboratorium yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dengan praktik laboratorium modern.

Konsep ini tidak sekadar tentang pengurangan dampak lingkungan, tetapi merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas laboratorium. Dalam implementasinya, Laboratorium Hijau mengedepankan tiga pilar utama, yaitu: (1) efisiensi penggunaan sumber daya, (2) minimalisasi dampak lingkungan, dan (3) penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Laboratorium mengkonsumsi energi besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan, dengan jejak karbon lima kali lebih besar dibanding ruang kantor biasa. BPOM dalam upaya penerapan laboratorium hijau telah mengeluarkan pedoman berupa Buku Saku Pedoman Laboratorium Hijau yang disusun oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada tahun 2024. Pedoman ini mengatur upaya dalam melakukan pendekatan holistik, mencakup efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Selain mengurangi dampak lingkungan, konsep ini juga menghemat biaya operasional, meningkatkan kesehatan kerja, dan menciptakan lingkungan yang produktif.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi pondasi utama dalam konsep Laboratorium Hijau dimulai dari manajemen energi yang cerdas, di mana setiap aspek penggunaan energi direncanakan dan dikelola secara optimal. Sistem pencahayaan ruangan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami melalui desain arsitektur yang tepat, dan dikombinasikan dengan penggunaan lampu LED hemat energi yang dilengkapi sensor gerak. Zonasi pencahayaan diterapkan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap area kerja, dengan sistem kontrol otomatis berbasis waktu dan okupansi yang memastikan energi hanya digunakan saat diperlukan.

Pengelolaan suhu ruangan menjadi aspek kritis lainnya dalam efisiensi energi. Laboratorium Hijau mengimplementasikan sistem HVAC dengan teknologi inverter yang dapat menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan. Pengaturan suhu dilakukan secara optimal untuk berbagai area laboratorium, didukung oleh sistem insulasi yang efektif dan pemantauan suhu otomatis. Peralatan laboratorium dipilih dengan mempertimbangkan sertifikasi hemat energi, dan penggunaannya dijadwalkan untuk menghindari beban puncak. Program pemeliharaan preventif dilaksanakan secara rutin untuk menjaga efisiensi operasional peralatan.

Konservasi air menjadi fokus penting berikutnya dalam konsep Laboratorium Hijau. Implementasinya mencakup instalasi sistem daur ulang air, teknologi pengolahan air limbah yang efektif, dan sistem pemanenan air hujan. Praktik hemat air diterapkan dalam setiap aktivitas laboratorium, mulai dari prosedur pembersihan peralatan yang efisien hingga penggunaan air destilasi secara bijak. Program deteksi dan perbaikan kebocoran dilakukan secara rutin, didukung dengan pelatihan staf tentang pentingnya konservasi air.

Pengelolaan material dalam Laboratorium Hijau dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Sistem tracking digital untuk bahan kimia memungkinkan optimalisasi pemesanan dan penyimpanan, menghindari pemborosan akibat kadaluarsa atau kerusakan. Pemilihan bahan kimia ramah

lingkungan menjadi prioritas, dengan prosedur penanganan material yang efisien untuk meminimalkan risiko pencemaran. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan secara konsisten, didukung dengan sistem pemisahan dan pengolahan limbah yang terpadu.

Minimalisasi dampak lingkungan menjadi pilar kedua yang tak kalah pentingnya. Pengendalian polusi dilakukan melalui sistem ventilasi dengan filter efisiensi tinggi dan pemantauan kualitas udara secara berkala. Penggunaan bahan kimia dengan *Volatile Organic Compound* (VOC) rendah dan sistem penangkapan gas buang yang efektif memastikan kualitas udara tetap terjaga.

Pengurangan dampak lingkungan menjadi fokus utama dengan mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam operasional laboratorium. Ini meliputi penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, pengolahan limbah yang tepat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penerapan sistem manajemen limbah yang efektif. Laboratorium juga menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan material dan menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam proses pengujian.

Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem pengolahan mandiri dengan pemisahan saluran berdasarkan karakteristik limbah. Program monitoring kualitas effluent dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Perlindungan ekosistem menjadi aspek integral dalam Laboratorium Hijau. Program penanaman vegetasi di area laboratorium tidak hanya berkontribusi pada estetika, tetapi juga mendukung biodiversitas lokal. Pemilihan tanaman adaptif dan penciptaan habitat mikro menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Optimalisasi penggunaan lahan dan pencegahan erosi dilakukan melalui manajemen air limpasan yang efektif dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Mitigasi perubahan iklim mendapat perhatian khusus melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dan monitoring jejak karbon dilakukan secara sistematis, didukung dengan program efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Optimalisasi transportasi dan logistik turut berkontribusi pada pengurangan emisi. Adaptasi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui desain bangunan yang tangguh, sistem drainase berkelanjutan, dan program tanggap darurat yang komprehensif.

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan menjadi pilar ketiga yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas. Kualitas udara dalam ruangan dijaga melalui sistem ventilasi yang adequate dengan pemantauan parameter *Indoor Air Quality* (IAQ) secara rutin. Aspek ergonomi diperhatikan melalui desain stasiun kerja yang nyaman dan pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Sistem keselamatan kerja diterapkan secara komprehensif, meliputi deteksi bahaya, peralatan pelindung diri, dan prosedur tanggap darurat.

Produktivitas dan kenyamanan kerja ditingkatkan melalui desain ruang yang mendukung alur kerja efisien. Optimalisasi pencahayaan alami dan zonasi berdasarkan fungsi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kenyamanan termal dijaga melalui sistem pengkondisian udara yang optimal dan pemantauan kondisi ruangan secara berkala. Aksesibilitas menjadi perhatian penting, dengan sirkulasi yang efisien dan fasilitas yang ramah difabel. Keberlanjutan operasional didukung oleh sistem manajemen yang kuat, meliputi kebijakan laboratorium hijau, prosedur operasional standar, dan program audit internal.

Pengembangan SDM dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan. Inovasi dan perbaikan terus didorong melalui program riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru yang relevan. Integrasi dengan sistem yang lebih luas menjadi aspek penting dalam konsep Laboratorium Hijau. Keterlibatan pemangku kepentingan diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Dampak sosial diperhatikan melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat lokal.

Aspek ekonomi dikelola melalui efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya, menciptakan nilai tambah bagi institusi. Implementasi konsep Laboratorium Hijau dilakukan secara terencana dan terukur. Tahap perencanaan meliputi penetapan target dan indikator, penyusunan roadmap, dan alokasi sumber daya yang tepat. Pelaksanaan program diawali dengan *pilot project*, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator kuantitatif seperti konsumsi energi dan air, serta indikator kualitatif seperti kepuasan pengguna dan kualitas lingkungan kerja.

Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan ditunjukkan melalui pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan yang komprehensif. Laboratorium mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk penggunaan energi terbarukan, konservasi air, pengurangan limbah, serta edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan bagi seluruh personel. Program-program inovatif untuk mendukung keberlanjutan terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Penerapan konsep laboratorium hijau di BBPOM di Palangka Raya mengutamakan pembudayaan perilaku konservasi energi melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan *Green Life Promotion*. Penerapan ini diwujudkan melalui inovasi antara lain:

1. Inovasi CEKLIS yaitu inovasi yang dilatarbelakangi peningkatan tagihan pembayaran listrik sehingga dilakukan pemeliharaan jaringan listrik dan pengelolaan penggunaan listrik dengan pengecekan alat listrik maupun penerangan dan pendingin ruangan yang tidak digunakan.
2. Inovasi SINERGI (Senandung Hemat Energi dan e-Presensi) yaitu inovasi penghematan energi listrik dan air dengan menggunakan media

audio berupa lagu, pantun dan narasi yang diperdengarkan sesaat sebelum jam kerja berakhir untuk mengingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan alat listrik dan air.

3. Inovasi Bank Sampah yaitu inovasi pengumpulan sampah plastik berupa botol minum, plastik kemasan atau plastik bekas pada wadah yang telah disediakan.
4. Inovasi BE SMMILE UP yaitu inovasi digitalisasi laboratorium yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya kertas, tinta dan alat tulis kantor (ATK) melalui pembuatan dokumen secara online yang berdampak pada penghematan anggaran pembelian ATK.

Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut:

1. *Reduce* yaitu penghematan energi listrik dan air melalui
   - Penggunaan lampu hemat energi pada area laboratorium
   - Penggunaan alat elektronik hemat energi dengan penandaan stiker hemat energi seperti pada alat pendingin ruangan/*air conditioner* (AC) dan kulkas
2. *Reuse* yaitu pemanfaatan kembali material antara lain
   - Pemanfaatan air yang berasal dari pendingin ruangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan kebersihan maupun perawatan tanaman
   - Pemanfaatan botol bekas reagen sebagai wadah penampungan limbah
   - Regenerasi kolom untuk memperbaiki kondisi kolom yang digunakan untuk pengujian menggunakan HPLC
3. *Recycle*
   - Pembuatan bak sampah yang berasal dari bekas map yang tidak terpakai diolah menjadi bak sampah
   - Pembuatan kantong silica gel dari jas laboratorium yang tidak terpakai

Penerapan konsep laboratorium hijau di BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memberikan dampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Perilaku hemat energi telah menjadi budaya yang melekat dalam diri seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya dan dapat terus diterapkan tidak hanya di lingkungan kerja namun juga di lingkungan sehari-hari.

BADAN POM

BAB 2

Perencanaan Kinerja

- *Uraian Singkat Renstra*
- *Rencana Kinerja Tahunan (RKT)*
- *Perjanjian Kinerja (PK)*
- *Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)*
- *Metode Pengukuran*



Laporan Kinerja 2026

Balai Besar POM di Palangka Raya

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika,

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, BBPOM di Palangka Raya menyusun Renstra 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Renstra BBPOM di Palangka Raya 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Palangka Raya bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Renstra 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari periode Renstra tahun 2020-2024, yang telah menjadi landasan bagi BBPOM di Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029, visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih dari itu, BBPOM di Palangka Raya berkomitmen untuk

menyelaraskan perencanaan strategis ini dengan delapan misi utama (Asta Cita) yang dicanangkan oleh Presiden pada sektor kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. RKT tahun 2026 BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 07 Oktober 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 Persentase
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 Persentase
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 Persentase
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5 Persentase
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.4 Persentase
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92 Persentase
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40 Persentase
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81 Persentase
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.06 Nilai
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2 Pasar
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	29.49 Persentase
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	97 Persentase
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 Persentase
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75 Nilai
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.33 Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	84.37 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05 Nilai

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025-2029 serta alokasi anggaran sesuai DIPA BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 15.575.335.000,- (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2026. Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan diwujudkan pada tahun 2026 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 6.178.956.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 9.396.379.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9 Persentase
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.08 Persentase
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persentase
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 Persentase
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67 Persentase
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99 Persentase
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94 Persentase
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40 Persentase
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.88 Nilai
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	3 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	29.49 Persentase
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persentase
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100 Persentase
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.97 Nilai
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89.15 Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.2 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Nilai

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan Evaluasi Internal untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Pada triwulan II tahun 2026 dilakukan revisi RAPK untuk 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, revisi RAPK perlu dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi capain atas target kinerja IKU ini selama 3 bulan terakhir selalu diatas 110% sehingga masuk kategori tidak dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhinya adalah adanya carry over pendampingan tahun sebelumnya dan antusiasme pelaku usaha dalam memenuhi standar CPPOB serta ditetapkannya revisi target RO pendampingan UMKM yang awalnya 11 UMKM menjadi 7 UMKM yang pengaruhi perhitungan realisasi RHPK Indikator ini yang telah oleh disetujui oleh Kepala biro perencanaan dan keuangan melalui nota dinas nomor PR.07.21.05.26.263 hal Tanggapan Usulan Perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Bulanan Balai Besar POM Di Palangka Raya Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026.

Berikut RAPK Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2026 dan Revisi RAPK Balai Besar POM di Palangka Raya triwulan II tahun 2026.

RAPK Awal														
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target											Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	Rp. 741,979,000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.08	Rp. 6,120,000
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	Rp. 231,245,150
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 10,116,500
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	Rp. 231,245,150
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Rp. 3,222,600
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 3,759,700
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Rp. 3,759,700
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	Rp. 110,751,700
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp. 110,751,700

RAPK Awal														
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target											Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Rp. 18,200,000
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp. 16,863,000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	Rp. 27,886,600
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			77	77	77	77.7	77.7	77.7	78.4	78.4	78.4	79	Rp. 4,083,598,000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	Rp. 10,555,200
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 2,104,000
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	Rp. 62,827,000
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	25	45	70	70	70	72.5	75	82.5	100	8	Rp. 32,021,000
		Jumlah desa pangan aman	5	20	25	25	25	25	50	50	70	80	100	3	Rp. 28,717,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	60	70	80	100	100	100	100	100	1	Rp. 29,244,000

RAPK Awal														
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target											Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	2.5	12.5	22.5	42.5	50	60	72.5	82.5	92.5	92.5	100	29.49	Rp. 6,713,000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		10	36	66	66	66	71	85	95	100	100	100	Rp. 225,040,000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	Rp. 5,916,000
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.97	Rp. 13,863,000
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89.15	Rp. 216,457,250
		Nilai AKIP UPT BPOM												81.2	Rp. 75,665,250
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp. 9,245,394,000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	Rp. 21,319,500

RAPK Revisi Triwulan II tahun 2026														
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target											Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	Rp. 741,979,000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.08	Rp. 6,120,000
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	Rp. 231,245,150
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 10,116,500
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	Rp. 231,245,150
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Rp. 3,222,600
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 3,759,700
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Rp. 3,759,700

RAPK Revisi Triwulan II tahun 2026															
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	Rp. 110,751,700
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp. 110,751,700
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Rp. 18,200,000
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp. 16,863,000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	Rp. 27,886,600
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			77	77	77	77.7	77.7	77.7	78.4	78.4	78.4	79	Rp. 4,083,598,000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	Rp. 10,555,200

RAPK Revisi Triwulan II tahun 2026															
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 2,104,000
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	Rp. 62,827,000
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	25	45	70	70	70	72.5	75	82.5	100	8	Rp. 32,021,000
		Jumlah desa pangan aman	5	20	25	25	25	25	50	50	70	80	100	3	Rp. 28,717,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	60	70	80	100	100	100	100	100	1	Rp. 29,244,000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	2.5	12.5	22.5	***45.71***	***63***	***73***	***82***	***87***	***93***	***93***	***96***	29.49	Rp. 6,713,000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		10	36	66	66	66	71	85	95	100	100	100	Rp. 225,040,000

RAPK Revisi Triwulan II tahun 2026														
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target											Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	Rp. 5,916,000
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.97	Rp. 13,863,000
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89.15	Rp. 216,457,250
		Nilai AKIP UPT BPOM												81.2	Rp. 75,665,250
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp. 9,245,394,000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	Rp. 21,319,500

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2026 dengan mempedomani Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai manual indikator kinerja, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
    1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
    2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

Untuk mengukur capaian periodik dari Kinerja Organisasi dilakukan dengan menjumlahkan Indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi dan dibagi dengan Indikator kinerja yang terdapat target pada periode tersebut. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Lalu untuk akhir tahun mengunakan cara perhitungan NKO tahunan yang merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja
   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2)}x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut:

No	Unit Organisasi	Predikat AKIP
1.	BPOM	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari KemenpanRB
2.	Unit Kerja Eselon I (UK1)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
3.	Unit Kerja Eselon II (Satker Mandiri)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
4.	Unit Kerja Eselon II (non Satker Mandiri)	Menggunakan nilai UK1
5.	UPT	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	**Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi**
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	**Nilai Kinerja Organisasi (NKO)**	**Notifikasi Warna**
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran kinerja pada Balai Besar POM di Palangka Raya dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.

c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e- Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
   i. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
   ii. reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

BBPOM di Palangka Raya mengatur penanggung jawab pengumpulan data dalam rangka mendukung pengukuran dan pelaporan data yang akuntabel dalam Surat Keputusan Pembentukan TIM Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2026 dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Susunan Tim SAKIP terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua I (perencanaan dan pengukuran), Ketua II (evaluasi internal), Ketua III (Laporan Kinerja), Ketua IV (Laporan Tahunan), Sekretaris, Verifikator Data, Anggota I (perencana target dan penyusun analisis capaian kinerja), Anggota II (mereviu analisis capaian kinerja), Anggota III (operator RHPK), dan Anggota IV (sekretariat tim laporan kinerja dan/atau tim laporan tahunan).
2. Tugas Pengarah (Kepala Balai): memberikan arahan pelaksanaan SAKIP dan memimpin rapat SAKIP.
3. Tugas Penanggung Jawab: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.
4. Tugas Ketua I (perencanaan dan pengukuran): mengkoordinir penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja sesuai pedoman, memastikan perencanaan kinerja menantang, dapat dicapai, dan realistis, mensosialisasikan manual IKU, memastikan data kinerja tertelusur dan andal, serta memastikan anggota tim mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP.
5. Tugas Ketua II (evaluasi internal): mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal program dan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjut sesuai pedoman, dan memastikan laporan evaluasi internal disusun sesuai pedoman dan tepat waktu.
6. Tugas Ketua III (Laporan Kinerja): mengkoordinir penyusunan laporan kinerja sesuai pedoman dan memastikan pengiriman laporan kinerja interim dan tahunan tepat waktu.

7. Tugas Ketua IV (Laporan Tahunan): mengkoordinir penyusunan laporan tahunan sesuai pedoman dan memastikan pengirimannya tepat waktu.
8. Tugas Sekretaris: bertanggung jawab atas data kinerja, membuat format database, verifikasi dan mengolah data kinerja, menginput data kinerja dan analisis kendala pada aplikasi monev BPOM, serta menyediakan data kinerja untuk penyusunan laporan.
9. Tugas Verifikasi: Melakukan reviu kesesuai nomenklatur, target, realisasi dan capaian yang dilaporkan dalam pengukuran kinerja, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja; dan melaporkan hasil reviu kesesuai nomenklatur, target, realisasi dan capaian yang dilaporkan dalam pengukuran kinerja, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja.
10. Tugas Anggota I (perencana target dan penyusun analisa capaian kinerja): verifikasi data output dan kinerja sebelum input RHPK, reviu capaian output dan indikator kinerja, menyusun rencana target indikator kinerja tahunan dan turunannya, melakukan evaluasi dan menyusun analisis (pelaksanaan kegiatan dan anggaran, capaian output dan indikator kinerja, identifikasi kendala, rekomendasi rencana aksi tindak lanjut) untuk berbagai laporan, serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut.
11. Tugas Anggota II (mereview analisis capaian kinerja): mereview dan menganalisis Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, dan input data Simetris, serta mereviu analisis Anggota I dalam Laporan Kinerja per Bab.
12. Tugas Anggota III (operator RHPK): mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari pelaksana kegiatan, melakukan input data pada RHPK, serta mengumpulkan dan mengkompilasi analisis untuk Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
13. Tugas Anggota IV (sekretariat tim laporan kinerja dan/atau tim laporan tahunan): mengumpulkan dan mengkompilasi analisis capaian kinerja yang telah diverifikasi dan direviu, memastikan kesesuaian data kinerja dan kriteria, menyunting, mengolah, dan menyusun laporan kinerja interim dan tahunan serta laporan tahunan, membuat desain tampilan laporan yang mudah dimengerti dan menarik, mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite BBPOM Palangka Raya tepat waktu, dan mengirimkan laporan kinerja ke esr.menpan.go.id, subsite BBPOM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan tepat waktu.
14. Data kinerja output dan indikator digunakan untuk mengisi data monev stakeholder dan membuat laporan: RHPK BPOM, Monev Capaian Output SAKTI Kemenkeu, RAPK, E-performance SIMETRIS BPOM, BAPPENAS, evaluasi internal bulanan dan triwulanan, laporan kinerja interim dan UPT BPOM (triwulan), dan laporan kinerja tahunan.
15. Pengisian data kinerja, pembuatan evaluasi capaian kinerja, dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai jenis laporan.
16. Tim SAKIP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya.

BADAN POM

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- *Capaian Kinerja Organisasi*
- *Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis*
- *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya*
- *Pemanfaatan Informasi Kinerja*
- *Realisasi anggaran*



Laporan Kinerja 2026

Balai Besar POM di Palangka Raya

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya di tahun 2026 memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta menganalisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran. Berikut pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2026.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO
a	b	c		d	e	f=e/d	g
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	99,79	100,90	100,90
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	N/A	N/A
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	96,58	103,29	103,29
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	98,33	105,73	105,73
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	94,74	111,46	110,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang	87	100	114,94	110,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO
a	b	c		d	e	f=e/d	g
			diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,67	100	102,39	102,39
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	96,25	106,94	106,94
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99,83	100,84	100,84
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	91,67	97,52	97,52
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	N/A	N/A
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,7	78	100,39	100,39
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	N/A	N/A
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,88	94,24	101,46	101,46
		18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100,00	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	100,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	90	112,50	110,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	73	73,57	100,78	100,78

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO
a	b	c		d	e	f=e/d	g
	standar keamanan dan mutu		baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan				
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	66	100	151,52	110,00
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	N/A	N/A
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	90,90	N/A	N/A
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	N/A	N/A
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	N/A	N/A
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	N/A	N/A
Total Capaian PK							2060,2
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							103,01
Predikat NKO							**Istimewa**

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO dengan nilai **103,01%** dari hasil rata-rata 28 Indikator kinerja yang telah dinormalisasi capaiannya dengan predikat **Istimewa**. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut:



Balai Besar POM di Palangka Raya di tahun 2026 memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta menganalisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran. Berikut pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2026.

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II Tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,79	98,9	100,90	100,90	Sangat Baik	98,9	100,90	Melampaui
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	N/A	N/A	N/A	27,08	N/A	N/A
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,58	93,5	103,29	103,29	Sangat Baik	93,5	103,29	Melampaui
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	Baik	100	100,00	Tercapai
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,33	93	105,73	105,73	Sangat Baik	93	105,73	Melampaui
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,74	85	111,46	110,00	Tidak dapat Disimpul-kan	85	111,46	Melampaui

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II Tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	Baik	100	100,00	Tercapai
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	87	114,94	110,00	Tidak dapat Disimpul-kan	87	114,94	Melampaui
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	97,67	102,39	102,39	Sangat Baik	97,67	102,39	Melampaui
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,25	90	106,94	106,94	Sangat Baik	90	106,94	Melampaui
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,83	99	100,84	100,84	Sangat Baik	99	100,84	Melampaui
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,67	94	97,52	97,52	Baik	94	97,52	Akan Tercapai
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78	77,7	100,39	100,39	Sangat Baik	79	98,73	Akan Tercapai
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	N/A	N/A	N/A	40	N/A	N/A
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**103,17**				

1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan capaian terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewajiban melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Berikut adalah perhitungan sehingga diperoleh persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

$$\text{Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = \frac{A + B + C + D}{4}$$

Unsur-unsur perhitungan :

A = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
C = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
D = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Komponen perhitungan “Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” untuk masing-masing komoditi berbeda, yaitu sebagai berikut :

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = {**a+b+c+d+e**}

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
Perhitungan : 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
   Perhitungan : 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%
   Perhitungan : 20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).
d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
   Perhitungan : 20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).
e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
   Perhitungan : 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = **{(a+b+c+d+e)/5}**
a. Pemenuhan target pengawasan = (a1+a2)/2
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling-renlak dan kategori sampel/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT x 100%)
   a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya x 100%)
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji × 100%)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji x 100%)
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji × 100%)
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik × 100%)

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = **{(a+b+c+d+e)/5}**
a. Pemenuhan target pengawasan = (a1+a2)/2
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling-renlak dan kategori sampel / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT x 100%)

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya x 100%)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji × 100%)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji × 100%)
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik × 100%)

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = **{(a+b+c+d+e)/5}**

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1+a2)/2
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
b. Kesesuaian pelaksanaan sampling = (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan × 100%)
d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan × 100%)
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik × 100%)

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	98.9	99.79	100.90	100.90	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sangat di pengaruhi oleh kegiatan sampling dan pengujian. Berikut adalah jumlah sampel yang di sampling pada Triwulan II pada setiap komoditi :

A. Obat : 119 sampel
B. Obat bahan Alam dan Obat Kuasi : 97 sampel
C. Suplemen Kesehatan : 27 sampel
D. Kosmetik : 169 sampel

Khusus untuk komoditi obat, tidak seluruh sampel yang disampling oleh petugas BBPOM di Palangka Raya akan dilakukan pengujian mandiri di laboratorium BBPOM di Palangka Raya, sebagian sampel tersebut akan dikirimkan ke laboratorium lain yang berada dalam satu Region Samarinda sesuai dengan kelas terapinya. Laboratorium BBPOM di Palangka Raya hanya melaksanakan pengujian pada 3 kelas terapi yaitu : (1). Kelas terapi pencernaan dan metabolisme; (2). Kelas terapi Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks; (3). Kelas terapi Organ Sensorik.

Hal berikutnya yang mempengaruhi realisasi indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pengujian di laboratorium. Untuk sampel yang diterima dan diuji di laboratorium BBPOM di Palangka Raya adalah sampel yang berasal dari BBPOM di Palangka Raya sendiri dan juga berasal dari Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk seluruh komoditi sediaan farmasi yaitu komoditi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sedangkan untuk komoditi Obat, laboratorium BBPOM di Palangka Raya menerima dan menguji sampel obat yang berasal dari seluruh anggota Regional Samarinda yang terdiri dari BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, BPOM di Tarakan, BPOM di Balikpapan, BPOM di Tabalong, BPOM di Tanah Bumbu, BPOM di Sanggau, Loka POM di Kabupaten Sambas dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan asal sampel yang diterima laboratorium BBPOM di Palangka Raya, maka jumlah sampel yang disampling dan diuji pada BBPOM di Palangka Raya

menjadi berbeda. Adapun jumlah total sampel sediaan farmasi yang diuji sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 372 sampel dengan rincian sebagai berikut :

Sampel Obat	= 93
Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi	= 102
Sampel Suplemen Kesehatan	= 27
Sampel Kosmetik	= 150

Berdasarkan kesesuaian perencanaan, parameter uji, pelaporan sampling dan pengujian serta kesesuaian pelaporan monitoring penarikan sediaan farmasi selama Triwulan II diatas, maka diperoleh realisasi pada Triwulan II sebesar **99,79%** dengan capaian sebesar **100,90%** dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan sampling dan pengujian tidak terdapat kendala berarti yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya target realisasi.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	98.90	98	99.22
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	98.9	99.79	100.90

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, indikator "Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan" menunjukkan tren peningkatan yang positif :

- ➔ Triwulan I 2026: Target yang ditetapkan adalah sebesar 98,90% dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 98%. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 99,22%.
- ➔ Triwulan II 2026: Target tetap yaitu 98,9%, namun realisasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 99,79%. Dengan persentase capaian kinerja pada TW 2 sebesar 100,90%.

Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja penanganan sampel sediaan farmasi berisiko ini mengalami pertumbuhan baik dari sisi realisasi (naik 1,79%) maupun efektivitas capaian target (naik 1,68%).

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	98.9	99.79	100.90	▲ Melampaui

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026, indikator "Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan" menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 98,9%, realisasi kumulatif yang berhasil dicapai pada Triwulan II Tahun 2026 telah menyentuh angka 99,79%. Hal ini menghasilkan persentase capaian terhadap target tahunan sebesar **100,90%**. Berdasarkan hasil tersebut, kinerja indikator ini masuk ke dalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Keberhasilan melampaui target tahunan lebih awal di pertengahan tahun ini mengindikasikan bahwa kinerja pengawasan, sampling dan pengujian terhadap sampel sediaan farmasi yang berisiko telah berjalan secara optimal dan responsif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan dalam realisasi kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

a. Koordinasi yang baik antara petugas penyampling dan penguji terkait rencana sampling dan jumlah sampel termasuk kategori sampel.
b. Melakukan pengaturan tugas di tim sampling sehingga tidak terjadi kesalahan jenis sampel dan overload pekerjaan dalam pelaksanaan sampling.
c. Melakukan komunikasi dengan unit pengampu terkait permasalahan sampling untuk mendapatkan solusinya.
d. Telah disusun perencanaan target jumlah dan kategori sampling setiap bulannya.
e. Tidak ada keterlambatan dalam pengiriman sampel sehingga sampel yang sudah disampling bisa segera dilakukan pengujian.
f. Telah dilakukan verifikasi metode terhadap metode analisa pengujian yang baru.

Terhadap rekomendasi dari laporan kinerja Triwulan I, telah dilaksanakan seluruhnya, sebagai berikut :

a. Telah disusun rencana pelaksanaan sampling dan pengujian di awal tahun dan dievaluasi setiap bulannya.
b. Telah konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan yang disusun.
c. Telah melakukan pengujian sampai dengan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada pedoman sampling dan pengujian.
d. Telah dilakukan reviu terhadap manual indikator, dalam rangka menyamakan persepsi cara perhitungan pembilang dan penyebut pada perhitungan capaian RHPK sesuai definisi operasional pada manual indikator, sehingga pengisian dan perhitungan realisasi sesuai dengan ketentuan.

e. Telah melakukan peningkatan kompetensi terkait penilaian penandaan sampel kosmetik dengan narasumber berasal dari Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Indikator kinerja “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” tentu saja mempunyai risiko yang mungkin dapat menyebabkan tidak tercapainya target capaian kinerja, risiko-risiko tersebut telah dimasukkan kedalam daftar risiko dan telah ditetapkan tindakan dan atribut pengendalian terhadap risiko-risiko tersebut. Terhadap tindakan dan atribut pengendalian tersebut dilakukan reviu, dari hasil reviu disimpulkan bawah tindakan dan atribut pengendalian yang ditetapkan sudah tepat dan dapat dinyatakan efektif menurunkan risiko inheren. Berdasarkan hasil reviu, juga dilakukan penambahan risiko sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM.

Untuk mempertahankan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

a. Selalu memastikan waktu pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan penentuan kesimpulan akhir mempertimbangkan hasil pengujian dan hasil penilaian penandaan sampel
b. Selalu memastikan Pengiriman sampel sesuai rencana dan tepat waktu.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Evaluasi penandaan kosmetik TW 1 oleh Ditwas Kosmetik disampaikan pada bulan Mei ada perbedaan hasil penandaan UPT MK oleh DiwasKos TMK sehingga mempengaruhi hasil akhir IK 1 untuk sampel kosmetik	Akan bersurat ke DitwasKos untuk menjadi narasumber peningkatan kompetensi petugas terkait penandaan kosmetik.	Bimtek/sosialisasi peningkatan kompetensi petugas terkait penandaan kosmetik.	Juni 2026	Tidak		
	Tidak ada kendala	Memastikan waktu pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan penentuan kesimpulan akhir mempertimbangkan hasil pengujian dan hasil penilaian penandaan sampel	Memastikan waktu pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan penentuan kesimpulan akhir mempertimbangkan hasil pengujian dan hasil penilaian penandaan sampel	Desember 2026	Tidak		

E. Analisis program/kegiatan yang mendukung dan menghambat capaian kinerja berdasarkan alokasi anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	283.780.387	309.738.430	109.15%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	407	410	100.74%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENYUSUNAN RENCANA DAN EVALUASI SAMPLING OBAT	0	0	N/A
2	PENGADAAN SAMPEL OBAT	92.931.717	77.071.360	82.93
3	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	0	0	N/A
4	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIK	0	0	N/A
5	PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL OBAT. OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. DAN SUPLEMEN KESEHATAN (SEDIAAN FARMASI)	45.395.670	45.395.670	100.00

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
6	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL OBAT. OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. DAN SUPLEMEN KESEHATAN	117.138.000	117.138.300	100.00
7	PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL OBAT	25.508.000	68.276.100	267.67
8	PENGIRIMAN SAMPEL OBAT KE LABORATORIUM REGIONAL	2.807.000	1.857.000	66.16

2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Dalam pengawasan keamanan obat beredar, salah satu program yang dilaksanakan BPOM adalah farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas terkait deteksi dini, penilaian, pengkajian dan upaya pencegahan terhadap dampak risiko merugikan sehubungan dengan penggunaan obat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini melibatkan banyak *key player* penting, antara lain tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, industri farmasi selaku pemegang izin edar dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPOM dalam program farmakovigilans, BPOM melakukan upaya penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini.

Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya adalah sebesar 27,08% yang diukur pada akhir tahun 2026.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT BPOM adalah adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing *catchment area* UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Indikator ini diukur dengan rumus, sebagai berikut:

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **=**

(A / B) x 100%

Keterangan:

A : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B :Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2026 dengan target sebesar 17,08 % Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelaporan KTD/ESO setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans. Pada Triwulan II Tahun 2026 dilakukan monitoring dan Evaluasi Pasca-KIE dengan melakukan pemantauan pada aplikasi e-MESO untuk melihat Fasyankes mana yang aktif melapor dan mana yang masih pasif pasca-KIE.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	N/A	N/A	N/A

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2026 dengan target sebesar 17,08 % Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelaporan KTD/ESO setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans. Oleh karena itu, nilai realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan I maupun Triwulan II tahun 2026 masih berstatus *N/A* (tidak tersedia per triwulan).

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.08	N/A	N/A	N/A

Target tahunan yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* di BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2026 adalah sebesar 27,08%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, nilai realisasi dan capaian terhadap target tahunan masih berstatus *N/A*. Hal ini dikarenakan karakteristik pengukuran indikator ini bersifat kumulatif dan baru akan dihitung serta dilaporkan secara penuh pada akhir tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan. BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* dari tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengintensifkan peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis tersebut melalui kegiatan peningkatan kompetensi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan sebaran sarana pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan dukungan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilakukan oleh Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional namun juga oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM di daerah. Salah satu dukungan kegiatan peningkatan kompetensi melalui KIE farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM adalah berupa Bimbingan Teknis/KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Pada Triwulan II Tahun 2026, BBPOM di Palangka Raya melaksanakan tahapan Monitoring dan Evaluasi Pasca-KIE melalui aplikasi e-MESO untuk memetakan secara riil keaktifan pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pasca-edukasi. Namun, terdapat kendala teknis akibat adanya pembaruan sistem oleh Pusat Farmakovigilans Nasional pada awal tahun, yaitu peralihan aplikasi e-meso menjadi e-MESO Versi 2. Proses migrasi dan perpindahan data dari versi lama ke versi baru ini menyebabkan terjadinya *cut-off*, sehingga data pemantauan pelaporan fasyankes baru dapat terbaca secara bertahap.

Atas capaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, untuk perbaikan kinerja pada Triwulan II direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Melakukan akselerasi dan pendampingan migrasi akun e-MESO dengan inventarisasi ulang terhadap 45 fasyankes yang telah menerima KIE untuk memastikan apakah mereka sudah berhasil melakukan transisi akun ke *e-MESO Versi 2*. BBPOM perlu memberikan asistensi aktif atau panduan teknis *step-by-step* bagi fasyankes yang mengalami kendala masuk (*login*) atau kehilangan data riwayat akibat proses migrasi sistem dari Pusat.
2. Memaksimalkan fungsi wadah komunikasi seperti *WhatsApp Group* bersama para koordinator fasyankes. Grup ini tidak hanya menjadi media konsultasi pasif, melainkan digunakan secara aktif oleh BBPOM di Palangka Raya untuk mengirimkan *reminder* berkala, membagikan tips pelaporan praktis, serta memberikan solusi cepat ketika terjadi gangguan teknis pada aplikasi baru.
3. Optimalisasi e-MESO dengan pembuatan akun bagi fasyankes yang belum memiliki akun e-MESO serta terus mendorong penggunaan aplikasi tersebut
4. Memberikan piagam penghargaan atau apresiasi bagi instansi/fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelaporan e-MESO baik secara kualitas dan kuantitas.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	4.876.290	4.876.290	100.00%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QDC.001 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	KIE FARMAKOVIGILANS/MONEV PELAPORAN KTD ESO KEPADA PETUGAS TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	4.876.290	4.876.290	100.00

3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Makanan atau minuman yang telah melewati serangkaian proses seperti pengeringan, pemanasan, pendinginan, fermentasi, atau penambahan zat tertentu agar lebih tahan lama, memiliki rasa dan tekstur baru, serta lebih praktis dikenal sebagai pangan olahan.

Untuk definisi dari Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Adapun kriteria yang termasuk dalam proses pengambilan sampel dan pengujian berdasarkan pedoman sampling meliputi :

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Setelah sampel diperiksa dan diuji maka sampel akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian

2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Capaian atau realisasi dari indikator kinerja "Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : A = (A1 + A2) / 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian
**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE,

rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%.

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti / total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%.

Catatan : Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	96.58	103.29	103.29	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 93,50%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 96,58%, sehingga menghasilkan capaian sebesar **103,29%** terhadap target Triwulan II Tahun 2026. Nilai normalisasi capaian juga mencapai 103,29%, yang menempatkan indikator tersebut pada kategori **Sangat Baik**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta komitmen dalam memastikan tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	92.95	99.41
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	93.5	96.58	103.29

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif. Pada Triwulan I, target yang ditetapkan sebesar 93,50% dengan realisasi sebesar 92,95%, sehingga capaian terhadap target mencapai 99,41% dan berada pada kategori Baik. Sementara itu, pada Triwulan II, dengan target yang sama yaitu 93,50%, realisasi meningkat menjadi 96,58%, sehingga capaian terhadap target naik menjadi 103,29% dan masuk dalam kategori Sangat Baik.

Dibandingkan dengan Triwulan I, terjadi peningkatan realisasi sebesar 3,63 poin persentase (dari 92,95% menjadi 96,58%) dan peningkatan capaian terhadap target sebesar 3,88 poin (dari 99,41% menjadi 103,29%). Peningkatan tersebut juga berdampak pada perubahan kategori kinerja dari Baik menjadi Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko semakin efektif dan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam proses pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian tindak lanjut sampel sesuai ketentuan, sehingga kinerja pada Triwulan II menjadi lebih optimal dibandingkan Triwulan I.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	96.58	103.29	▲ Melampaui

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan Tahun 2026, indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Dari target tahunan sebesar 93,50%, realisasi pada Triwulan II telah mencapai 96,58%, sehingga menghasilkan capaian sebesar **103,29%** terhadap target tahunan. Dengan capaian tersebut, indikator ini berada pada kategori **Tercapai/Melampaui**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa target kinerja tahunan telah berhasil dipenuhi bahkan melebihi sasaran yang ditetapkan sebelum akhir tahun anggaran. Capaian ini

mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko sesuai ketentuan, serta menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan pangan. Meskipun target tahunan telah terlampaui, upaya pemantauan dan peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir Tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditentukan oleh enam faktor, yaitu dilakukannya pengambilan sampel sesuai pedoman dan perencanaan, ketepatan waktu pengambilan sampel sesuai pedoman dan perencanaan, kesesuaian penentuan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji, ketepatan waktu pelaporan SIPT dan ketepatan dalam tindak lanjut hasil pengawasan sesuai pedoman yang berlaku.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Pada Triwulan I, target sebesar 93,50% terealisasi sebesar 92,95%, sehingga capaian terhadap target mencapai 99,41%. Sementara itu, pada Triwulan II, dengan target yang sama sebesar 93,50%, realisasi meningkat menjadi 96,58%, sehingga capaian terhadap target naik menjadi 103,29%. Dengan demikian, terjadi peningkatan realisasi sebesar 3,63 poin persentase dan peningkatan capaian terhadap target sebesar 3,88 poin, sehingga kategori kinerja meningkat dari Baik menjadi Sangat Baik.

Peningkatan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor. Pertama, pelaksanaan kegiatan sampling yang sesuai dengan Rencana Kerja (Renlak) memungkinkan target jumlah sampel pangan olahan berisiko yang harus diawasi dapat terpenuhi sesuai jadwal. Kedua, pelaksanaan sampling yang tepat waktu memberikan waktu yang cukup bagi laboratorium untuk melaksanakan seluruh tahapan pengujian dan tindak lanjut tanpa mengalami keterlambatan, sehingga penyelesaian sampel dapat dilakukan sesuai ketentuan. Ketiga, ketersediaan reagen, baku pembanding, serta perlengkapan laboratorium yang memadai mendukung kelancaran proses pengujian, sehingga tidak terjadi penundaan akibat kekurangan sarana maupun bahan pengujian.

Sinergi antara pelaksanaan sampling yang terencana, ketepatan waktu dalam pengambilan sampel, serta kesiapan sumber daya laboratorium telah meningkatkan efektivitas proses pengujian dan penyelesaian tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko. Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan capaian kinerja pada Triwulan II hingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Beberapa rekomendasi dari hasil laporan kinerja pada interim sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan atau upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, diantaranya :

1. Telah dilakukan perencanaan dengan melalui dialog kinerja dengan pimpinan dan unit pengampu terkait penentuan jumlah dan jenis sampel pangan olahan yang akan dilakukan sampling dan pengujian.
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terkait capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan
3. Telah dilakukan penyesuaian target pada saat terjadi perubahan anggaran menyesuaikan ketersediaan anggaran dan jumlah pegawai yang tersedia
4. Telah dilaksanakan kegiatan sampling dan pengujian yang telah ditentukan sebelumnya sesuai pedoman sampling dan pengujian serta rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada akhir triwulan II terdapat kendala pada saat pengambilan sampel disebabkan belum tersedianya reagensia di laboratorium. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan jika menghadapi kendala yang serupa, antara lain:

- Melakukan penggantian sampel sesegera dan sebisa mungkin dengan jenis sampel lainnya dengan tetap berkomunikasi dengan laboratorium, jika terdapat kendala pada ketersediaan reagensia ataupun kerusakan alat, agar tidak mengurangi capaian kinerja organisasi.
- Melakukan koordinasi dengan laboratorium terkait teknis penggantian sampel jika terjadi kendala pada pengujian
- Melakukan koordinasi pengujian sampel di UPT terdekat sebagai alternatif jika kendala pada pengujian tidak dapat diatasi dalam waktu cepat.
- Melakukan monitoring realisasi sampling berupa target dan realisasi sampling serta daftar sampel yang mengalami kendala
- Melakukan penggantian atau menambah sampel dengan sampel jenis lain selama disetujui oleh pihak pengujian

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Pengujian Sampel Pangan Olahan Berisiko, terdapat beberapa risiko yang perlu dikendalikan untuk memastikan tercapainya target kinerja serta terjaminnya mutu hasil pengujian. Pengendalian risiko ini penting karena dapat mempengaruhi kualitas data pengawasan, ketepatan pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pelaporan kinerja.

Salah satu risiko yaitu terkait kualitas hasil pengujian dipertanyakan. Risiko ini dapat muncul apabila proses pengujian tidak dilaksanakan sesuai persyaratan sistem manajemen mutu laboratorium, metode yang tervalidasi, atau terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan prosedur pengujian. Selain itu, kompetensi personel, kondisi peralatan, maupun mutu bahan dan reagen juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Dampak dari risiko ini adalah menurunnya

kepercayaan terhadap hasil pengujian laboratorium, potensi terjadinya pengujian ulang, serta berkurangnya kredibilitas hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Terhadap risiko tersebut dilakukan aktivitas pengendalian melalui atribut pengendalian berupa Checklist Penilaian Kepatuhan Kaidah Pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh verifikator. Hasil reviu terhadap checklist penilaian tersebut diharapkan dapat menghilangkan risiko terkait dan kepercayaan terhadap hasil pengujian laboratorium tetap terjaga.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum tersedianya baku Okratoksin sehingga terdapat 2 sampel kopi bubuk ataupun kopi instant yang belum disampling.	Sampling kekurangan sejumlah 2 sampel yang masuk pada Renlak bulan Juni akan dilaksanakan mengikuti ketersediaan Baku Okratoksin dan juga renlak regional untuk kopi instan yaitu direncanakan pada bulan Agustus 2026	Koordinasi dengan laboratorium/penyedia terkait pengadaan baku Okratoksin	Agustus 2026	Tidak		

Berdasarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut diatas, masih memungkinkan adanya kegagalan dalam melakukan aktivitas pengendalian risiko atas tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dalam rencana tindak lanjut, selain melakukan koordinasi dengan laboratorium terkait, juga melakukan komunikasi dengan bagian penanggung jawab evaluasi program atas kendala yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan pencegahan atas kekurangan jumlah sampel dari yang telah ditargetkan.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	132.207.385	127.065.145	96.11%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	198	196	98.99%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	66.873800	68.139.200	101.89
2	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	42.579.600	45.487.800	106.83
3	PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	8.491.500	0	0.00

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
4	PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	500.000	26.000	5.20
5	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	13.762.485	13.412.145	97.45

4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar adalah salah satu indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya yang bertujuan untuk memotret bagaimana penanganan KLB-KP di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya apakah telah sesuai dengan pedoman sehingga dapat diperoleh informasi terkait agen penyebab keracunan untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan kejadian tersebut.

Pengertian “sesuai standar” adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Tambahan khusus untuk sampel pangan jenis Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) yang menjadi tugas utama Badan POM perlu juga diperhatikan kesesuaian terhadap standar atau regulasi terkait seperti misalnya parameter uji lainnya sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Kesesuaian terhadap standar lainnya ialah dalam hal pengambilan sampling yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; serta dalam melakukan investigasi penyebab keracunan yaitu sesuai dengan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan Tahun 2023.

Secara ringkas, pengukuran indikator ini dilakukan melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\ (30\%\ x\ A1, A2, \dots, An) + (35\%\ x\ B1, B2, \dots, Bn) + (35\%\ x\ C1, C2, \dots., Cn)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total Sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)\ x\ 100\%}$

a. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling
b. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang	100	100	100.00	100.00	Baik

diuji sesuai standar					

Pada Triwulan II tidak terdapat kasus keracunan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya sehingga data capaian kinerja sampai dengan triwulan II merupakan data kasus keracunan yang terjadi pada triwulan I yaitu pada salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palangka Raya. Sampel kasus tersebut berupa sampel Nasi putih, Telur ceplok asam manis, Tempe, Mix Vegetable, Melon yang diperoleh dari petugas Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Hasil pengujian dan analisis epidemiologi dari dugaan penyebab keracunan tersebut yaitu Staphylococcus aureus pada nasi dan telor ceplok dan E coli pada buah melon potong dan telah dilaporkan melalui SPIMKER.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	100	100	100.00

Realisasi sampai akhir Triwulan II sebesar **100.00%** dan realisasi kinerja sebesar 100.00% sehingga diperoleh persentase capaian 100.00%. Tidak terdapat perubahan baik kenaikan ataupun penurunan dari Triwulan I. Hal ini disebabkan tidak adanya kasus keracunan pada Triwulan II sehingga data capaian kinerja pada Triwulan II merupakan akumulasi dengan data triwulan I tahun 2026. Kondisi ini perlu terus dipertahankan hingga akhir tahun agar capaian kinerja tetap 100%.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	▲ Tercapai

Realisasi kinerja pada Triwulan II dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100% masuk pada kriteria capaian "**Tercapai/Melampaui**". Hal ini menjadi sinyal optimisme agar capaian kinerja hingga akhir tahun tetap sesuai harapan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah dalam penetapan parameter uji yang tepat agar hasil uji yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat digunakan dalam menentukan agen penyebab KLB-KP.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Koordinasi yang baik dan efektif secara internal BBPOM di Palangka Raya maupun secara eksternal dengan Dinas Kesehatan setempat dalam penelusuran informasi/kasus, pengambilan sampel, penerimaan sampel dan penentuan parameter uji serta analisis epidemiologi penyebab keracunan.
- Kesiapan laboratorium dalam pengujian agen penyebab keracunan, meliputi ketersediaan reagensia dan peralatan serta sumber daya manusia petugas penguji agar pengujian dapat selesai tepat waktu dan hasil uji dapat mendukung kajian epidemiologi yang telah dilakukan.
- Pelaporan hasil pemantauan KLB-KP melalui aplikasi SPIMKER secara cepat dan tepat agar dapat segera dilakukan *monitoring* oleh Badan POM.
- Adanya jadwal *on call* khususnya pada hari raya keagamaan sebagai petugas penerima sampel dan laporan agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi ataupun keterlambatan dalam penanganan laporan kasus.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	21.289.800	22.743.900	106.83%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output

QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	198	196	98.99%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	21.289.800	22.743.900	106.83

5 *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Sampling Pangan Industri rumah Tangga (PIRT) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, yang dikemas dalam kemasan pangan, yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Sampling ini merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian indikator untuk persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kategori sampling PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan.

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2026 adalah sebesar 93% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian dari jumlah sampel yang diambil dan dilaporkan sampai dengan akhir Triwulan II. Pengambilan sampel dan pelaporan sampel PIRT dilakukan sampai dengan Triwulan II pada tahun berjalan dengan tujuan agar tidak terjadi sampling berulang (double sampling/double counting) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan menu post market dalam program Bantuan Operasional Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) TA 2026.

Keberhasilan kinerja untuk indikator ini dipengaruhi oleh jumlah produk PIRT yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dan ketersediaan reagen serta

kesiapan alat untuk melakukan pengujian sampel PIRT. Selain itu kinerja pada indikator ini juga didukung oleh ketepatan perencanaan, kejelian petugas dalam mengambil kesimpulan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian dan evaluasi penandaan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

dimana :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di Triwulan 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan / atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	98.33	105.73	105.73	Sangat Baik

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 93,00%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 98,33%. Dengan demikian, capaian terhadap target mencapai 105,73%, dengan nilai normalisasi capaian sebesar 105,73%, sehingga indikator tersebut memperoleh kategori Sangat Baik.

Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan. Hasil ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai, tetapi juga berhasil dilampaui pada Triwulan II Tahun 2026.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	94.17	101.25
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	93	98.33	105.73

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada Triwulan I, target yang ditetapkan sebesar 93,00% dengan realisasi sebesar 94,17%, sehingga capaian terhadap target mencapai 101,25%. Selanjutnya pada Triwulan II, dengan target yang tetap sebesar 93,00%, realisasi meningkat menjadi 98,33%, sehingga capaian terhadap target turut meningkat menjadi 105,73%.

Dibandingkan dengan Triwulan I, realisasi pada Triwulan II mengalami peningkatan sebesar 4,16 poin persentase, yaitu dari 94,18% menjadi 98,33%. Sejalan dengan itu,

capaian terhadap target juga meningkat sebesar 4,48 poin, dari 101,25% menjadi 105,73%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko semakin optimal dan konsisten, sehingga kinerja pada Triwulan II lebih baik dibandingkan Triwulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta koordinasi dalam memastikan seluruh sampel PIRT berisiko ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk indikator ini terdapat perubahan rumus yang diinformasikan melalui Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.2.07.26.507 tanggal 02 Juli 2026 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2026. Dalam poin 1.b. yang mempengaruhi realisasi pada akhir triwulan I yang awalnya 95,33% menjadi 94,17%.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	98.33	105.73	▲ Melampaui

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan Tahun 2026, indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai hasil yang melampaui target yang ditetapkan. Target tahunan sebesar 93,00% berhasil direalisasikan sebesar **98,33%** pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 105,73%. Dengan capaian tersebut, indikator ini termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

Capaian yang melebihi target tahunan menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini mencerminkan optimalnya proses pengawasan, koordinasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sampel PIRT berisiko. Meskipun target tahunan telah tercapai bahkan terlampaui pada Triwulan II, upaya pengawasan dan peningkatan kinerja perlu terus dipertahankan agar capaian tersebut tetap konsisten hingga akhir Tahun 2026 serta mendukung peningkatan perlindungan masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditentukan oleh enam faktor, yaitu dilakukannya pengambilan sampel sesuai pedoman dan perencanaan, ketepatan waktu

pengambilan sampel sesuai pedoman dan perencanaan, kesesuaian penentuan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji, ketepatan waktu pelaporan SIPT dan ketepatan dalam tindak lanjut hasil pengawasan sesuai pedoman yang berlaku.

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan atau upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja antara lain:

1. Melakukan perencanaan dengan melalui dialog kinerja dengan pimpinan dan unit pengampu terkait penentuan jumlah dan jenis sampel PIRT yang akan dilakukan sampling dan pengujian.
2. Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian yang telah ditentukan sebelumnya sesuai pedoman sampling dan pengujian serta rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan penyesuaian target pada saat terjadi perubahan anggaran menyesuaikan ketersediaan anggaran dan jumlah pegawai yang tersedia.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terkait capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan
5. Melaksanakan tindak lanjut dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pada hasil uji yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) agar dilakukan pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), khususnya terkait higiene dan sanitasi serta pelabelan sesuai ketentuan.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel yang tidak dapat diuji dikarenakan proses pengadaan baku pembanding Okratoksin terhambat, dimana pihak vendor memperpanjang masa inden pengadaan.	Mengawal proses pengadaan baku pembanding Okratoksin agar segera dapat diterima oleh pihak Laboratorium. Dan menerapkan sistem clock off untuk sampel yang belum dapat diuji akibat ketidaktersediaan baku pembanding	Mengawal proses pengadaan baku pembanding okratoksin agar sampel segera diuji sebelum semester I Tahun 2026 berakhir.	Juni 2026	Tidak		
	Terdapat kendala pada 1 (satu) sampel jenis kopi, dimana parameter uji okratoksin tidak dapat dilakukan pengujian karena ada keterlambatan vendor menyediakan baku pembanding okratoksin.	Direkomendasikan pelaksanaan uji bersama dengan BBPOM Banjarbaru terhadap sampel kopi sebagai langkah percepatan penyelesaian pengujian sampel PIRT agar target penyelesaian pada	Menindaklanjuti pelaksanaan uji bersama dengan BBPOM Banjarbaru melalui koordinasi jadwal pengujian yang disepakati dan disesuaikan dengan kesiapan laboratorium.	Juni 2026	Tidak		

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Semester I Tahun 2026 dapat tercapai.					

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	132.207.385	127.065.145	96.11%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	198	196	98.99%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	66.873.800	68.139.200	101.89

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
2	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	42.579.600	45.487.800	106.83
3	PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	8.491.500	0	0.00
4	PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	500.000	26.000	5.20
5	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	13.762.485	13.412.145	97.45

6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator kinerja ini sama dengan indikator kinerja pada periode renstra sebelumnya dengan definisi yang sama, tidak ada perubahan Definisi Operasional. Sejak Triwulan III tahun 2025, terdapat perubahan manual indikator pada bagian target yang semula kumulatif menjadi *flat.* Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* diperoleh dengan rumus:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* $= \frac{A + B}{2}$

Keterangan :

$$A : \left(\frac{jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ pelaku\ usaha}{jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ pelaku\ usaha}\right) x\ 100\%$$

$$B : \left(\frac{jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ lintas\ sektor}{jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ lintas\ sektor}\right) x\ 100\%$$

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi dan Pemeriksaan Sarana Pelayanan Farmasi (saryanfar) baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   A. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

B. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan)

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	85	94.74	111.46	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025 sebagai awal tahun renstra 2025-2029 terdapat perubahan target yang awalnya *gradual* sebesar 64% di bulan Januari 2025 dan 84% di bulan Desember 2025 (meningkat 2 angka tiap bulannya) berubah menjadi target *flat* sebesar 84%. Target yang ditetapkan untuk tahun 2026 meningkat sebesar 85% *flat* sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat 38 surat tindak lanjut ke pelaku usaha (termasuk *carry over* tahun sebelumnya) dan 3 surat rekomendasi yang disampaikan kepada lintas sektor, sebanyak 34 surat kepada pelaku usaha telah diberikan *feedback*, demikian juga dengan rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor seluruhnya telah mendapatkan *feedback*.

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 111,46% termasuk dalam kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	85	93.33	109.80

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026
	85	94.74	111.46

Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2026, realisasi maupun capaian triwulan II tahun 2026 dari indikator ini lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka upaya pencapaian target. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar realisasi dan capaian indikator ini selalu terjaga sampai dengan akhir tahun 2026.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	85	94.74	111.46	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 85% maka akan memberikan angka capaian sebesar 111.46% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta *monitoring* dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target akhir tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian target pada triwulan II ini didukung oleh pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas pencapaian target triwulan sebelumnya dan evaluasi internal atas realisasi tiap bulan, antara lain:

1. Meningkatkan monitoring evaluasi atas feedback surat tindak lanjut hasil pengawasan
2. Mewajibkan petugas *upload* bukti penyampaian surat tindak lanjut pada *google site* SI PAMELA
3. Melakukan *follow up* permintaan *feedback* rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik langsung kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana maupun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan kinerja yaitu memberikan status "*close*" untuk sarana yang sudah tidak beroperasional/tutup, sementara

rekomendasi belum mendapatkan *feedback* dengan rencana aksi menghitung sarana yang sudah tutup tersebut dalam kategori "sudah ditindaklanjuti". Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	Terdapat feedback yang dikirimkan melalui komunikasi whatsapp dengan petugas sehingga tidak dapat dilakukan monev	Bukti feedback dari pelaku usaha/lintas sektor di upload di google site SI PAMELA Feedback dari pelaku usaha diminta upload di bitly yang tercantum pada surat.	Seluruh bukti feedback CAPA diupload di SI PAMELA	Desember 2026	Tidak		

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	740,700	306,000	41.31%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi *output* fisik. Berikut adalah capaian realisasi *output* yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8	8	100.00%

Guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat subkomponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	434,700	0	0.00
2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT. OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. NAPZA. PREKURSOR. MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	306,000	306,000	100.00

7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Ruang lingkup dari sarana produksi sediaan farmasi sendiri terdiri atas:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (seperti: Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, dan Industri Suplemen Kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu Industri Kosmetik Golongan A dan Industri Kosmetik Golongan B.

Indikator ini merupakan indikator baru namun serupa dengan indikator tahun lalu yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dimana perbedaan mendasar ada pada ruang lingkup sarana produksi yang diperiksa dan juga cara pengukuran yang ditetapkan dalam manual IKU.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana produksi (Sarprod) Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

dimana: **% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)**

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
   = rata-rata persentase sub aspek 1-6
   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
   2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
   3) Kesesuaian format laporan inspeksi
   4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
   5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
   6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
   = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2026 adalah sebesar 100% yang diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian *ouput* sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	100.00	Baik

Target indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Capaian dari indikator ini diperoleh dari terlaksananya pengawasan ke sarana produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) pada bulan Februari dan pengawasan ke sarana produksi kosmetik di bulan Juni. Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2026 adalah 100% sehingga capaian triwulan II indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% dengan kategori capaian **Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**

	100	100	100.00

Capaian realisasi pada triwulan II tahun 2026 sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2026. Capaian 100% ini bisa dipertahankan karena realisasi pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terlaksana sesuai dengan yang sudah direncanakan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	▲ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan target tahunan menunjukkan capaian sebesar 100%, dengan kategori capaian **Tercapai/Melampaui**.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Telah dilaksanakan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan.
- Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran mandiri IDEAS serta *coaching* dan *mentoring* oleh ketua tim kerja.
- Telah melakukan pengendalian terhadap risiko ketidaksesuaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan *monitoring* evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan terhadap peraturan yang berlaku.
- Telah dilakukan pengaturan tugas di tim inspeksi sehingga tidak terjadi *overload* pekerjaan dalam pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi

Indikator kinerja “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” tentu saja mempunyai risiko yang mungkin dapat menyebabkan tidak tercapainya target capaian kinerja. Risiko berupa sarana tidak berproduksi (tutup) saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Risiko tersebut telah dimasukkan kedalam daftar risiko dan telah ditetapkan tindakan dan atribut pengendalian terhadap risiko tersebut. Terhadap tindakan dan atribut pengendalian tersebut dilakukan reviu, dari hasil reviu disimpulkan bahwa tindakan dan atribut pengendalian yang ditetapkan sudah tepat dan dapat dinyatakan efektif menurunkan risiko inheren.

Guna mempertahankan capaian kinerja serta mitigasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan:

A. Konsisten menjaga realisasi melaksanakan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun.
B. Melakukan pelaporan di SIPT sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
C. Membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
D. Konsisten melakukan *monitoring* dan evaluasi pengawasan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala setiap bulan.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,481,400	612,000	41.31%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8	8	100.00%

Guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH	869,400	0	0.00

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
	DILAKSANAKAN			
2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT. OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. NAPZA. PREKURSOR. MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	612,000	612,000	100.00

8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) dilakukan berdasarkan kajian analisis risiko sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar PIRT serta pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Ketentuan “diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” ialah dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut.
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara perhitungan indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

$$\frac{\textbf{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}}{\textbf{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}}} \times \textbf{100\%}$$

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

2. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
   A. Ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
   B. Kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
   Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
   C. Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
      a. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
      b. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
      c. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II sebesar 100% dari target 87% sehingga capaian terhadap target sebesar 114,94% atau masuk pada kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Capaian ini diperoleh dari pembagian tiga parameter kinerja yaitu ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan pangan dan kesesuaian *grading* penilaian berdasarkan pedoman yang berlaku yang ketiganya tercapai 100%.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	87	100	114.94

Capaian kinerja triwulan II dibandingkan dengan capaikan kinerja pada triwulan I tahun 2026 tidak terdapat perubahan disebabkan tidak adanya ketidaksesuaian dari rencana pelaksanaan maupun pedoman tindak lanjut pengawasan hingga ketepatan waktu pelaporan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kualitas dalam proses pengawasan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) disebabkan tercapainya seluruh komponen penilaian mulai dari ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan pangan dan ketepatan grading penilaian. Perubahan target setiap tahunnya ditentukan oleh Pusat/Unit Pengampu dengan persetujuan dari UPT terkait melalui *desk* perencanaan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94	▲ Melampaui

Realisasi kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 87% masuk pada kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Hal ini menjadi sinyal optimisme agar capaian kinerja hingga akhir tahun tetap sesuai harapan. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) adalah harus dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan maupun pedoman tindak lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga ketepatan waktu dalam pelaporan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu dilakukannya pengawasan sarana produksi pangan olahan berdasarkan analisis risiko produk ataupun riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, kedua yaitu ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT oleh petugas pengawas, serta ketiga adalah terpenuhinya tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai pedoman yang berlaku.

Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan atau upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja antara lain:

A. Telah dilakukan perencanaan dengan melalui dialog kinerja dengan pimpinan dan unit pengampu terkait penentuan jumlah target sarana produksi yang akan diperiksa.
B. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai target waktu dan jumlah sarana yang telah ditentukan.
C. Telah dilakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan terkait capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan
D. Telah dilakukan *coaching* dan *mentoring* terhadap petugas pengawas pangan saat melakukan pemeriksaan ataupun pelaporan serta tindak lanjutnya.

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I Tahun 2026			sd .Triwulan II Tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan tindak lanjut pengawasan	Meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut pengawasan	Mengadakan pelatihan/ sosialisasi regulasi terkait pedoman tindak lanjut pengawasan pangan	Telah dilakukan sosialisasi regulasi terkait pedoman tindak lanjut pengawasan	Selesai

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I Tahun 2026		Kondisi		Evaluasi Efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan tindak lanjut pengawasan	Meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut pengawasan	Terdapat tindak lanjut pengawasan tidak sesuai ketentuan	Tidak terdapat tindak lanjut pengawasan tidak sesuai ketentuan	Efektif

Guna menyempurnakan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, agar capaian kinerja tidak lagi menjadi “Tidak Dapat Disimpulkan”, maka perlu dilakukan strategi pengawasan yang lebih mendalam, mulai dari pemilihan jenis sarana, lokasi Kabupaten/Kota hingga kategori risiko produk yang diolah agar terdapat perbaikan capaian kinerja menjadi Sangat Baik. Selain itu, perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian inspeksi agar lebih detail dan teliti sehingga benar-benar terpotret pemeriksaan sarana sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selain itu, tindak lanjut pengawasan pangan olahan yang mencakup aspek produksi, distribusi, serta temuan produk (rusak, kedaluwarsa, dan TIE) juga terus diupayakan sesuai pedoman meskipun jika melihat target masih terdapat peluang adanya kesalahan, namun jika masih dapat dihindari, sebisa mungkin tidak dilakukan. Meski demikian, agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya mengalami perbaikan sesuai dengan perencanaan, maka perlu dilakukan evaluasi kembali terkait jumlah sarana pemeriksaan, ataupun petugas yang melakukan pemeriksaan perlu dilakukan rotasi kepada petugas yang baru dengan tetap didampingi petugas lama, selain sebagai

sarana pembelajaran bagi pegawai baru, juga dapat meningkatkan peluang terjadinya penilaian inspeksi dan tindak lanjut yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memitigasi capaian kinerja yang jauh melebihi target yang telah direncanakan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak Ada Kendala	Perhatikan capaian kinerja agar tidak over melebihi target maksimal yang telah ditetapkan	Evaluasi penugasan dan hasil penilaian inspeksi atau berita acara pemeriksaan secara lebih mendalam	Agt 2026	Tidak		

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,481,400	612,000	41.31%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8	8	100.00%

Guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	869,400	0	0.00
2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT. OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. NAPZA. PREKURSOR. MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	612,000	612,000	100.00



Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{A+B+C}{3}$

Keterangan:

A : Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

B : Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C : Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Faktor yang mempengaruhi penilaian indikator ini adalah sebagai berikut:
Sarana Distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian terdiri atas:

A. Pemenuhan target pemeriksaan
B. Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
C. Hasil *review* kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor*

Sarana distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan:

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
2. Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	100	102.39	102.39	Sangat Baik

Sarana distribusi sediaan farmasi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF, Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Kabupaten), obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat dan fasilitas lain). Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 97,67%. BBPOM di Palangka Raya sampai dengan triwulan II tahun 2026, telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebagai berikut:

- Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 34 sarana
- Sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 11 sarana
- Sarana distribusi kosmetik sebanyak 17 sarana
- sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 3 sarana

Faktor yang mempengaruhi penilaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Sarana Distribusi Obat:

A. Persentase pemenuhan target pemeriksaan
B. Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
C. Hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor*

Sarana distribusi OBA, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan:

A. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi
B. Persentase kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
C. Persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang	97.67	100	102.39

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**Target TW II 2026**	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	97.67	100	102.39

Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2026, realisasi maupun capaian triwulan II tahun 2026 dari indikator ini sama. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka upaya pencapaian target. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar realisasi dan capaian indikator ini selalu terjaga sampai dengan akhir tahun 2026.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	100	102.39	▲ Melampaui

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 97,67% maka akan memberikan angka capaian sebesar 102,39% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target akhir tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian target pada triwulan II ini didukung oleh pelaksanaan secara konsisten terhadap rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas pencapaian target triwulan sebelumnya dan evaluasi internal atas realisasi tiap bulan, antara lain:

1. Melakukan supervisi dan monev kesesuaian tindak lanjut
2. Pelaksanaan kegiatan inspeksi sesuai dengan perencanaan baik jumlah maupun jenis sarana
3. Ketepatan pelaporan melalui SIPT

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan kinerja yaitu secara konsisten melakukan supervisi dan monev kesesuaian tindak lanjut serta *updating* terhadap peraturan baru di bidang pengawasan sediaan farmasi, termasuk petunjuk teknis/pedoman tindak lanjut hasil pengawasan.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesalahan dalam menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan monev	Supervisi dan monev kesesuaian tindak lanjut	De- sem-ber 2026	Y	S01-09.01	Tindak lanjut hasil inspeksi sarana distribusi tidak sesuai dengan pedoman.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55,683,151	49,104,711	88.19%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.004 Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	89	101.14%

Guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat subkomponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang

memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	23,568,960	17,530,560	74.38
2	INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	1,500,000	5,855,000	390.33
3	INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	680,000	340,000	50.00
4	KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	5,379,103	5,379,103	100.00
5	RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	16,355,088	18,020,948	110.19
6	BIMTEK/PELATIHAN/SOSIALISASI DESK CAPA	8,200,000	1,724,100	21.03
7	PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI	0	255,000	N/A

10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman.

Fasilitas sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas distributor/gudang pangan olahan, sarana ritel baik modern maupun tradisional yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Ketentuan “diperiksa sesuai ketentuan” ialah dilihat dari jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Dalam rumus perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen (A+B+C) sebagai berikut:

A : Kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa sesuai target (20%)
B : Ketepatan tindak lanjut pengawasan (70%) serta
C : Ketepatan waktu pelaporan SIPT (10%).
Keterangan:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	96.25	106.94	106.94	Sangat Baik

Realisasi capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan pada triwulan II (96,25%) dibandingkan dengan target pada triwulan I (90%) memperoleh capaian kinerja sebesar 106,94% atau masuk pada kriteria capaian **Sangat Baik.** Hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan sarana distribusi pangan telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan maupun pedoman tindak lanjut hasil pengawasan pangan yaitu Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari 3 (tiga) komponen, yaitu kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa sesuai target rencana pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut pengawasan serta ketepatan waktu pelaporan. Dari tiga komponen tersebut, proporsi penilaian tertinggi terdapat pada ketepatan tindak lanjut pengawasan (70%), kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa sesuai target rencana pelaksanaan (20%) dan ketepatan waktu pelaporan (10%). Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan selanjutnya perlu lebih menitikberatkan pada kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan termasuk evaluasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap temuan hasil penilaian (inspeksi).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW II 2026
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100.00	111.11
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	90	96.25	106.94

Capaian kinerja triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan tren positif dengan persentase sebesar 106,94% (**Sangat Baik**) jika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan capaian 111,11% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Peningkatan capaian kinerja ini didorong oleh perencanaan pengawasan sarana yang matang pada triwulan kedua serta monitoring dan evaluasi (monev) ketat terhadap tindak lanjut yang dikirimkan. Meskipun realisasi mengalami sedikit penurunan dari 100% menjadi 96,25%, kategori penilaian berhasil meningkat menjadi Sangat Baik. Hal ini membuktikan bahwa penguatan prosedur tindak lanjut sesuai pedoman telah berjalan efektif dan selaras dengan peningkatan target kinerja yang ditetapkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	96.25	106.94	▲ Melampaui

Realisasi kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 106,94% masuk pada kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Hal ini menjadi sinyal optimisme bahwa capaian kinerja hingga akhir tahun tetap sesuai harapan. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai pedoman agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian maupun penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga ketepatan waktu dalam pelaporan. Tiga aspek inilah yang harus selalu ditekankan kepada petugas pemeriksa (*food inspector*) agar target pengawasan hingga akhir tahun tetap tercapai sesuai harapan dan perencanaan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan atas tercapainya realisasi pada indikator ini, yaitu:

A. Hasil pemeriksaan terhadap 23 dari 24 sarana (95,8%) telah ditindaklanjuti, sehingga mencapai kategori kinerja Sangat Baik. Tindak lanjut tersebut

dilaksanakan baik pada sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), serta mencakup sarana dengan rating penilaian A, B, C, maupun D pada kelompok distributor, ritel modern, dan ritel tradisional. Pelaksanaan tindak lanjut ini berpedoman pada Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Terdapat satu sarana ritel modern yang tindak lanjut hasil pemeriksaannya sempat tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, perbaikan segera telah dilakukan melalui penyampaian Surat Peringatan kepada pemilik sarana agar tidak memperjualbelikan produk pangan olahan yang tidak sesuai regulasi, khususnya Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang dilarang diperjualbelikan secara bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan.
C. Pelaporan hasil pemeriksaan telah dilakukan dengan tepat waktu sampai akhir Triwulan II terhadap 22 sarana (91,7%) dari 24 sarana yang diperiksa yaitu paling lambat dilaporkan melalui SIPT tanggal 10 pada bulan berikutnya. Ketepatan waktu pelaporan ini turut mendukung pencapaian kinerja hingga masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain:

A. Sulitnya menyusun analisis pengawasan sarana distribusi pangan berdasarkan kajian risiko disebabkan belum adanya pedoman pengawasan sarana distribusi berbasis risiko yang telah ditetapkan
B. Banyaknya jumlah sarana distribusi pangan olahan, khususnya sarana ritel tradisional seperti toko, warung dan kios-kios sembako yang terdapat hingga di pelosok-pelosok daerah.

Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan atau upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja antara lain:

1. Telah dilakukan perencanaan dengan melalui dialog kinerja dengan pimpinan dan unit pengampu terkait penentuan jumlah target sarana distribusi yang akan diperiksa.
2. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai target waktu dan jumlah sarana yang telah ditentukan.
3. Telah dilakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan terkait capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan

Salah satu evaluasi terhadap tindak lanjut dan rekomendasi tahun 2025 s.d triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I Tahun 2026			sd .Triwulan II Tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan tindak lanjut pengawasan	Meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut pengawasan	Mengadakan pelatihan/ sosialisasi regulasi terkait pedoman tindak lanjut pengawasan pangan	Telah dilakukan sosialisasi regulasi terkait pedoman tindak lanjut pengawasan	Selesai

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I Tahun 2026		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan tindak lanjut pengawasan	Meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut pengawasan	Terdapat tindak lanjut pengawasan tidak sesuai ketentuan	Tidak terdapat tindak lanjut pengawasan tidak sesuai ketentuan	Efektif

Guna menyempurnakan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, maka perlu dilakukan strategi pengawasan yang lebih mendalam, mulai dari pemilihan jenis sarana, lokasi Kabupaten/Kota maupun riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya mengalami perbaikan sesuai dengan perencanaan, maka perlu dilakukan evaluasi kembali terkait jumlah sarana pemeriksaan, ataupun petugas yang melakukan pemeriksaan perlu dilakukan rotasi kepada petugas yang baru dengan tetap didampingi petugas lama, selain sebagai sarana pembelajaran bagi pegawai baru, juga dapat meningkatkan peluang terjadinya penilaian inspeksi dan tindak lanjut yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memitigasi capaian kinerja agar tidak terlalu jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	Tidak Ada Kendala	Perhatikan capaian kinerja agar tidak over melebihi target maksimal yang telah ditetapkan	Evaluasi penugasan dan hasil penilaian inspeksi atau berita acara pemeriksaan secara lebih mendalam	Agustus 2026	Tidak		

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55,683,151	49,104,711	88.19%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II Tahun 2026	Target Output TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.004 Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	89	101.14%

Guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II Tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	23,568,960	17,530,560	74.38
2	INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	1,500,000	5,855,000	390.33
3	INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	680,000	340,000	50.00
4	KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	5,379,103	5,379,103	100.00
5	RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	16,355,088	18,020,948	110.19
6	BIMTEK/PELATIHAN/SOSIALISASI DESK CAPA	8,200,000	1,724,100	21.03
7	PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI	0	255,000	N/A

11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase sarana Iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi Sesuai Ketentuan adalah:

A. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
B. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
C. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
D. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
E. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
F. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
G. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

   a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

      = x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

= x 100%

Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

1. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) x 100%
2. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) x 100%
3. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

B. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) x 100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) x 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

C. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

A. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4).

B. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%.
Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

D. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

A. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) x 40%

B. Kesesuaian proporsi media iklan yang di-sampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media) x 20%

C. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) x 40%
Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka *real*

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99.83	100.84	100.84	Sangat Baik

Jumlah realisasi iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan faktor utama yang mendukung indikator kinerja ini. Pada Triwulan II tahun 2026 telah dilakukan pengawasan iklan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dengan total sejumlah 424 (empat ratus dua puluh empat) iklan dengan rincian *output* sebagai berikut:

Realisasi pengawasan Iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2026 adalah:

a. Iklan Obat 88 (delapan puluh delapan) iklan;
b. Iklan Obat Bahan Alam 60 (enam puluh) iklan;
c. Iklan Suplemen Kesehatan 25 (dua puluh lima) iklan;
d. Iklan Kosmetik 125 (seratus dua puluh lima) iklan;
e. Iklan Pangan 126 (seratus dua puluh enam) iklan.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan *tools* penilaian mandiri sesuai dengan rumus perhitungan diatas pada Triwulan II realisasi 99.83%. Jika capaian Triwulan II tahun 2026 dibandingkan terhadap target Triwulan II tahun 2026 memperoleh angka capaian sebesar 100.84% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99.67	100.68
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	99	99.83	100.84

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, indikator "Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan" menunjukkan tren peningkatan yang positif:

A. Triwulan I 2026: Target yang ditetapkan adalah sebesar 99% dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 99.67%. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 100.68%.
B. Triwulan II 2026: Target tetap yaitu 99%, namun realisasi mengalami peningkatan menjadi 99.83%. Dengan persentase capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 100.84%.

Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini mengalami peningkatan baik dari sisi realisasi maupun efektivitas capaian target (naik 0.16%).

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99.83	100.84	▲ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan target tahunan menunjukkan capaian sebesar 100.84%, dengan kategori capaian **Tercapai/ Melampaui.**

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pada Triwulan II ini dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

a. Terealisasinya jumlah pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu;
b. Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas sampling dan iklan melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja;
c. Tidak ada kendala pelaporan di SIPT.

Adapun kendala dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah:

a. Tidak terpenuhinya target iklan pada media cetak dari 8 (delapan) target baru realisasi 4 (empat) iklan pada bulan Mei.

Rekomendasi penyempurnaan kinerja:

a. Telah dilaksanakan pengawasan iklan pangan olahan pada media cetak selama bulan Juni 2026 sebanyak 4 (empat) iklan oleh petugas sesuai rekomendasi sebelumnya. Mengejar realisasi 4 (empat) target iklan pangan pada media cetak dibulan Juni;
b. Telah dilakukan komunikasi dengan unit pengampu terkait definisi media cetak tidak terbatas pada media surat kabar, namun termasuk iklan pada kalender

ataupun jenis media promosi lainnya dalam bentuk cetak, sehingga masih memungkinkan untuk diperoleh pengawasan sejumlah 2 (dua) jenis iklan pangan olahan pada media cetak per bulan;

c. Konsisten menjaga realisasi pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulan sesuai dengan yang direncanakan.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Time-line*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Untuk Iklan Sediaan farmasi Tidak Ada Kendala Untuk iklan pangan terkendala tidak terpenuhinya target iklan pada media cetak dari 8 target baru realisasi 4 iklan	Merealisasi-kan kekurangan target Iklan media cetak yang kurang	Mengejar realisasi 4 target iklan pangan pada media cetak dibulan berikutnya	Mei 2026	T	S01.11.02	Tidak tercukupi-nya proporsi pada media cetak di karena-kan iklan tidak ada yang di-tayangkan (Ketepatan proporsi)

E. Analisis program/kegiatan yang mendukung dan menghambat capaian kinerja berdasarkan alokasi anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	5,580,000	0	0.00%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.004 Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	89	101.14%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGAWASAN PERIKLANAN OMKA/ROKOK	5,580,000	0	0.00

12 Persentase label produk tembakau dan atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada produk tembakau dan rokok elektronik meliputi pengawasan pencantuman peringatan Kesehatan, pencantuman informasi lain pada kemasan, pengawasan kesesuaian batas maksimal kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan yang dilarang, dan pengawasan daftar kandungan rokok elektronik.

Pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung budaya hidup sehat di masyarakat, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang rentan terpapar pengaruh promosi dan persepsi keliru terkait rokok. Dengan adanya label yang informatif dan peringatan yang tegas, konsumen diharapkan menjadi lebih sadar

terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Informasi yang benar dan jelas pada kemasan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda untuk mulai merokok atau menggunakan rokok elektronik.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dengan rumus:

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = A + B2

Keterangan:

A : Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi, dibagi Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B : Persentase ketepatan waktu pelaporan label:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu, dibagi Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

A. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
B. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
C. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	91.67	97.52	97.52	Baik

Sampai dengan Triwulan II, jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi sebanyak 102 (seratus dua) label dari target sebanyak 102 (seratus dua) yang artinya persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label 100% (A). Namun tidak semua label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dilaporkan tepat waktu, sebanyak 85 (delapan puluh lima) label dilaporkan tepat waktu dari target sebanyak 102 (seratus dua) label yang artinya persentase ketepatan waktu pelaporan label 83.33% (B).

Dari rata-rata 2 (dua) aspek perhitungan tersebut, diperoleh persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 91.67%.

Jika dibandingkan dengan target sebesar 94%, maka akan memberikan angka capaian 97.52% dengan kriteria **Baik**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94.00	83.33	88.65
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	94	91.67	97.52

Jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2026, realisasi maupun capaian Triwulan II tahun 2026 dari indikator ini meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi yang disampaikan pada Triwulan sebelumnya yaitu melakukan monitoring pelaporan pengawasan label tembakau melalui SIPT telah dilaksanakan secara konsisten. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target akhir tahun 2026.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	94	91.67	97.52	▲ Akan

diawasi sesuai standar				Tercapai

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 94% maka akan memberikan angka capaian sebesar 97.52% dengan kategori **Akan Tercapai**. BBPOM di Palangka Raya berkomitmen akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target akhir tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum tercapainya target sampai dengan Triwulan II ini disebabkan oleh:

a. Adanya keterlambatan supervisor memverifikasi laporan di SIPT melewati timeline pelaporan, seharusnya dilaporkan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya tetapi dilaporkan pada tanggal 7. Hal ini terjadi pada laporan pengawasan label produk tembakau bulan Maret yang dilaporkan pada bulan April 2026;
b. Tidak konsistennya pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas pencapaian target triwulan sebelumnya dan evaluasi internal atas realisasi tiap bulan.

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan kinerja yaitu:

A. Pelaporan maksimal tanggal 1 bulan berikutnya dengan rencana tindak lanjut input hasil pengawasan label dari petugas maksimal tanggal terakhir pada bulan berjalan
B. Supervisor mengevaluasi dan meneruskan ke Kepala Balai maksimal tanggal 1 bulan berikutnya dan Kepala Balai meneruskan laporan ke pusat maksimal tanggal 2 bulan berikutnya.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya Terdapat laporan yang belum diinput pada SIPT oleh petugas/operator	Memastikan pelaporan sampel melalui SIPT sesuai timeline ke pusat	Pada akhir bulan sebelum batas pelaporan ketua tim melakukan crosscek data dan status laporan pada	Mei 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			aplikasi SIPT				
	Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya Terdapat laporan yang belum diinput pada SIPT oleh petugas/operator	Memastikan pelaporan sampel melalui SIPT sesuai timeline ke pusat	Pada akhir bulan sebelum batas pelaporan ketua tim melakukan crosscek data dan status laporan pada aplikasi SIPT	Juni 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu
	Pada bulan Maret Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya sehingga ralisasi tidak mencapai target walaupun sampel pada bulan-bulan berikutnya telah tepat waktu. Berdasarkan excercise target bisa tercapai jika tidak ada keterlambatan pelaporan lagi sampai akhir tahun.	Memastikan pelaporan sampel melalui SIPT sesuai timeline ke pusat	Pada akhir bulan sebelum batas pelaporan ketua tim melakukan crosscek data dan status laporan pada aplikasi SIPT	Juli 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu

E. Analisis program/kegiatan yang mendukung dan menghambat capaian kinerja berdasarkan alokasi anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	5,071,945	4,535,945	89.43%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	102	102	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	5,071,945	4,535,945	89.43

13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala Badan POM yang disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Surabaya, Desember 2024, mengingat isu ini telah menjadi perhatian strategis global. Oleh karena itu, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan mewujudkan komitmen terhadap rencana aksi nasional pengendalian AMR, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) spesifik untuk memantau efektivitas intervensi program pengendalian resistensi antimikroba secara terukur dan berkelanjutan. Melalui proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029, muncul indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025, seluruh unit kerja diinstruksikan untuk merevisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Hal ini bertujuan untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029, termasuk pengintegrasian indikator tersebut.

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT dilakukan pada akhir tahun 2026 dengan target sebesar 100%. Penilaian indikator tersebut pada level UPT dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan pada beberapa parameter kegiatan sebagai berikut:

A. Pengawasan apotek dengan menggunakan *tools* pengawasan antibiotik. Penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek;
B. Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 2 kali);
C. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali);
D. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (target 4 kali);

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT
= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Keterangan:

A : terhadap target kegiatan pengawasan apotek
B : terhadap target pelaksanaan Bimbingan Teknis
C : terhadap target pelaksanaan Advokasi
D : terhadap target publikasi hasil pengawasan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dilakukan pada akhir tahun 2026 dengan target sebesar 100%. Penilaian indikator kinerja level UPT dalam pengendalian AMR di wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan dari kegiatan:

a. Pengawasan apotek dengan menggunakan tools pengawasan antibiotik. Penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (target 85%).
b. Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 2 kali).

c. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali).
d. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter tiap triwulan (target 4 kali per tahun).

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026 ini, telah dilaksanakan kegiatan publikasi Hasil Pengawasan Apotek yang menyerahkan Antibiotik Tanpa Resep Dokter sebanyak 2 (dua) kali dan Bimtek sebanyak 2 (dua) kali.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	N/A	N/A	N/A
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	N/A	N/A	N/A

Sesuai dengan definisi operasional, perhitungan indikator ini dilakukan pada akhir tahun.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	N/A	N/A	N/A

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala Badan POM sebagaimana disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Surabaya, Desember Tahun 2024 mengingat pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian global. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan serta sebagai bentuk komitmen terhadap rencana aksi nasional pengendalian AMR, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) khusus terkait AMR yang dapat memantau efektivitas intervensi program pengendalian resistensi antimikroba secara terukur dan berkelanjutan. Melalui proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029, muncul indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14

Agustus 2025, seluruh unit kerja diminta untuk melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029 termasuk menambahkan indikator ini.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa aspek/kegiatan yang menjadi komponen penghitungan, sebagai berikut:

1. Penggunaan tools pengawasan antibiotik pada pemeriksaan apotek dan pelaporannya pada aplikasi SIPT;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis;
3. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba dengan pemerintah daerah;
4. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Badan POM (Pusat) sebagai penilaian capaian terhadap indikator kinerja maupun indikator pada peta jalan. Pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan ini dilakukan melalui sistem aplikasi pelaporan elektronik. Data yang dilaporkan merupakan instrumen penting dalam memantau kinerja Badan POM secara nasional dalam melaksanakan program pengendalian AMR serta memantau efektivitas intervensi UPT dalam mendukung sasaran strategis Badan POM. Penggunaan tools antibiotik dilaporkan melalui aplikasi SIPT 3.0 sekaligus sebagai pelaporan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian/apotek. Pada SIPT pelaporan hasil pemeriksaan antibiotik bagian langkah 8 “Antibiotika”. Sedangkan kegiatan lainnya disertai data dukung dilaporkan melalui link pelaporan: https://linktr.ee/MonevKegiatanAMR.

Keberhasilan dari indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut pencapaian kinerja triwulan sebelumnya. Pada laporan sebelumnya telah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Pemeriksaan dan Pelaporan SIPT sarana apotek yang dilakukan petugas tidak menggunakan form AMR dengan rekomendasi meningkatkan monev dan rencana tindak lanjut berupa monitoring penyiapan form AMR dan pelaporannya melalui SIPT;
2. Kurangnya peserta yang hadir dalam kegiatan dengan rekomendasi untuk meningkatkan monev dan rencana tindak lanjut melakukan monitoring konfirmasi kehadiran peserta bimtek yang diundang.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	11,784,480	8,765,280	74.38%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIC.004 Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	89	101.14%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT. OBAT BAHAN ALAM. KOSMETIK. SUPLEMEN KESEHATAN. MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	11,784,480	8,765,280	74.38

14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. *Grand Design* Penguatan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan 2024-2025 menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM salah satunya melalui penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium adalah standar yang ditetapkan Badan POM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM pada 4 (empat) komponen penilaian antara lain pemenuhan Standar Ruang Lingkup, pemenuhan Standar Kompetensi, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Pemenuhan SKL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 dengan pembagian dan fungsi sebagai berikut:

1. Tingkat 4 : Laboratorium Balai Regional
   Terdiri dari 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya.
2. Tingkat 3 : Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi
   Terdiri dari sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang berada di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya termasuk dalam laboratorium tingkat 3.
3. Tingkat 2 : Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota
   Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2.
4. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota
   Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Cara perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium
Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

Keterangan:

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL Biologi) / 2
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.7	78	100.39	100.39	Sangat Baik

Realisasi kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Obat dan Makanan Nasional melalui tools penilaian pemenuhan standar SKL yang dilakukan pada akhir triwulan. Pada triwulan II 2026 didapatkan hasil penilaian sebesar 78 dengan capaian sebesar 100.39% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 77.7 dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00	77.44	100.57
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	77.7	78	100.39

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II 2026 dengan realisasi Triwulan I menunjukkan adanya peningkatan nilai realisasi yaitu dari 77.44 menjadi 78 dengan kenaikan sebesar 0.56.

Di sisi lain, persentase capaian pada Triwulan II mengalami penurunan karena adanya peningkatan target kinerja yang sebelumnya sebesar 77 pada Triwulan I menjadi 77.7 pada Triwulan II, dengan kenaikan target sebesar 0.7. Dengan adanya kenaikan target tersebut, menyebabkan penurunan capaian meskipun realisasinya meningkat. Namun secara keseluruhan tetap diperoleh capaian diatas 100% dengan kriteria **Sangat Baik**.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79	78	98.73	▲ Akan Tercapai

Realisasi kinerja nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan II 2026 mencapai nilai sebesar 78 atau 98.73% dari target tahunan sebesar 79. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemenuhan standar kemampuan laboratorium telah berjalan sesuai rencana. Capaian yang tinggi di awal tahun merupakan awal yang baik bagi UPT untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada awal tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap penetapan target indikator tahun 2026- 2029 berdasarkan realisasi dan capaian tahun 2025. Pada tahun 2025 didapatkan realisasi sebesar 76.6 dengan target 72.5 sehingga sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas berkelanjutan target tahun 2026 yang semula ditetapkan sebesar 77 ditingkatkan menjadi 79.

Pada tahun 2026 terdapat perubahan metode penilaian khususnya untuk komponen standar peralatan yang sebelumnya, nilai pemenuhan standar peralatan dihitung berdasarkan kertas kerja pada tools monev standar kemampuan laboratorium, menjadi berdasarkan tarikan data pada aplikasi DIKOLABORASI. Integrasi sistem ini memberikan dampak yang positif terhadap akurasi dan akuntabilitas data yang menyebabkan peningkatan nilai realisasi standar peralatan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil pencapaian target indikator nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada tahun 2026 adalah melalui penerapan strategi manajemen kinerja yang berfokus pada mitigasi risiko dan pemenuhan rekomendasi berkelanjutan.

Pengendalian risiko disusun sebagai upaya menghilangkan atau mengurangi dampak risiko pada proses kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian target indikator. Risiko dianalisa dan dikelola mulai dari perencanaan atau penetapan target kinerja, sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi yang menghasilkan rekomendasi terhadap pengendalian risiko berupa atribut risiko.

Pengendalian risiko pada pencapaian target indikator pemenuhan standar kemampuan laboratorium UPT pada pada tahun 2026 dimulai dari pembuatan roadmap pemenuhan Standar kemampuan laboratorium pada masing-masing komponen yang disusun berdasarkan analisis kemampuan laboratorium untuk mencapai target secara komprehensif. Roadmap yang disusun, dilaksanakan serta dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Risiko kegagalan dalam pelaksanaan roadmap di mitigasi dan dikendalikan melalui pengendalian risiko dan dilaksanakan oleh seluruh personil laboratorium.

Realisasi kegiatan pada roadmap pemenuhan standar kemampuan laboratorium pada triwulan 2 tahun 2026 antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan verifikasi metode analisa untuk peningkatan standar ruang lingkup pada laboratorium kimia (komoditi obat 2 verifikasi, komoditi pangan 1 verifikasi, komoditi OBASKOK 1 verifikasi) dan laboratorium mikrobiologi 1 verifikasi.
2. Terlaksananya kegiatan verifikasi metode analisa untuk peningkatan standar metode terverifikasi pada laboratorium kimia (komoditi obat 2 verifikasi, komoditi pangan 1 verifikasi).

Selain realisasi kegiatan pada *roadmap* pemenuhan standar kemampuan laboratorium yang telah ditetapkan, dukungan operasional dan infrastruktur menjadi bagian penting pelaksanaan kegiatan yang mendukung pemenuhan standar kemampuan laboratorium antara lain:

a. Pelaksanaan pemeliharaan rutin, kalibrasi dan verifikasi alat laboratorium untuk menjamin akurasi dan performa alat laboratorium.
b. Penyediaan reagensia kimia, media mikrobiologi,baku pembanding bahan habis pakai tepat waktu
c. Pengadaan suku cadang dan penambah nilai alat laboratorium guna memperpanjang masa pakai dan meningkatkan fungsi alat.
d. Perencanaan peningkatan kompetensi personel melalui bimbingan teknis internal untuk memastikan seluruh analis memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan metode pengujian terbaru.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Time-line*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laborato-rium	Tidak ada kendala	Melanjutkan realisasi kegiatan sesuai dengan roadmap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang telah disusun	Melaksanakan kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL: 1. Pelaksana-an peme-liharaan, kalibrasi dan veri-fikasi alat laboratori-um dan pengadaan alat labora-torium, 2. Perenca-naan dan pelaksana-an bimbing-an teknis internal, 3. Penga-daan reagensia dan media mikrobio-logi, 4. Penga-daan baku pem-banding	Desem-ber 2026	T	S03-01.01	Kerusakan alat/ instrumen di Labora -torium

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,808,000,177	1,857,754,477	102.75%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	50.89%	63.39%	124.56%
RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	75.00%	75.00%	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMENUHAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BBPOM	0	0	N/A
2	PELATIHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE MIKROBIOLOGI (TERPADU)	11,324,000	0	0.00
3	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN OLAHAN DAN AIR (TERPADU)	0	0	N/A
4	OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	35,466,430	64,693,520	182.41
5	PENGADAAN GLASSWARE	0	0	N/A
6	PENGADAAN SUKU CADANG	107,803,400	164,635,400	152.72
7	PENGADAAN BAKU PEMBANDING	0	0	N/A
8	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	100,644,500	75,643,710	75.16
9	PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PENGUJIAN DAN BAHAN K3 LABORATORIUM	300,000	300,000	100.00
10	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	11,729,000	17,627,800	150.29
11	BLOKIR - PEMELIHARAAN ALAT	0	0	N/A

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
	LABORATORIUM			
12	REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	2,000,000	1,345,500	67.28
13	UJI PROFISIENSI/KOLABORASI/ KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM	5,481,000	81,000	1.48
14	REAKREDITASI KAN BSN	80,884,270	81,059,970	100.22
15	BLOKIR - UJI PROFISIENSI/ KOLABORASI/KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM	0	0	N/A
16	OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA FOOD SECURITY	0	0	N/A
17	BLOKIR - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA FOOD SECURITY	0	0	N/A
18	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	743,077,577	743,077,577	100.00
19	PENGADAAN PENAMBAH NILAI ALAT LABORATORIUM	709,290,000	709,290,000	100.00

15 *Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman*

Dalam upaya mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta mendukung revitalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA), BPOM menginisiasi program Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten/Kota Pangan Aman dan telah menyusun tools penilaian mandiri untuk Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menyelenggarakan kegiatan terpadu tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini didasari pula terkait beberapa isu/kebijakan pemerintah maupun isu global yang menyatakan bahwa keamanan pangan sangat berkontribusi besar terhadap penurunan *stunting* (PerPres Nomor 72 Tahun 2021), *Sustainable Development Goals/*SDGs, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Pendampingan yang dilakukan meliputi;

1. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan keamanan pangan di daerah;
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

A. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
B. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a. Dihitung dari Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b. Merupakan Kabupaten/Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c. Jumlah target dihitung secara kumulatif
d. Formula perhitungan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan yang sesuai dengan ketentuan.

Penetapan pemilihan wilayah kabupaten/kota sebagai target pendampingan pada tahun 2026 ini didasarkan hasil penilaian akhir tim evaluator penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 yang memperoleh nilai tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Kota Palangka

Raya memperoleh nilai 64.29, Kabupaten Barito Utara 44.34, Kabupaten Gunung Mas 31.30, Kabupaten Kotawaringin Timur 27.52 dan Kabupaten Kapuas 20.02. Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota target pendampingan pengisian tools dan data dukung penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Sedangkan Kota Palangka Raya dikarenakan perolehan nilainya pada tahun 2025 telah masuk dalam level 3 (kategori sedang) maka pada tahun 2026 ini ditetapkan sebagai target pengawalan.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan menjadi salah satu target Indikator Kinerja Utama. Pada Triwulan II ini, telah dilaksanakan tahapan pendampingan dan desk monitoring dan evaluasi tahap I kepada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya pada tanggal 20 Mei 2026 secara hybrid (luring dan daring) di aula BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dan PIC lintas sektor terkait mengisi tools dan melengkapi data dukung penilaian mandiri dengan baik dan benar sehingga mendapatkan nilai yang sesuai. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan memanfaatkan dashboard P3K PAMAN (Pemantauan, Pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman) yang berbasis *canvasite* yang bertujuan sebagai sarana komunikasi dan informasi dalam rangka pendampingan pengisian tools dan data dukung penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman.

Selain itu, pada Triwulan II ini BBPOM di Palangka Raya juga telah melaksanakan audiensi kepada pemerintah daerah yang menjadi target intervensi sebagai langkah tindak lanjut dari mitigasi risiko yang memungkinkan hasil penilaian kabupaten/kota pangan aman tidak tercapai secara maksimal. Pada tanggal 23 Juni 2026, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan audiensi dan sosialisasi langsung kepada pemerintan daerah Kabupaten Gunung Mas yang dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah dan beberapa OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dan Dinas Ketahanan Pangan) dan berhasil mendapatkan komitmen dan dukungan penuh dalam upaya pemenuhan dan pengisian tools serta data dukung penilaian kabupaten/kota pangan Aman. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan dan desk monitoring evaluasi terhadap tools dan data dukung pada tanggal 24 Juni 2026 di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas yang dihadiri oleh seluruh PIC OPD terkait.

Pada Triwulan II ini, realisasi kinerjanya belum dapat dibandingkan dengan target di triwulan I dikarenakan target untuk Persentase Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman baru dapat dihitung pada akhir tahun sebesar 40% sedangkan target yang ditetapkan setiap triwulannya berupa capaian persentase tahapan Pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pendampingan dalam pengisian tools dan data dukung terhadap kabupaten/kota yang menjadi target berjalan secara efektif dan responsif dalam upaya Badan POM dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	N/A	N/A	N/A
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	N/A	N/A	N/A

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (Triwulan I). Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan evaluasi dan analisis keberhasilan pada tahun sebelum guna menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2026. Selain itu, Indikator ini juga berkontribusi langsung dalam capaian indikator kinerja utama Badan POM dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	N/A	N/A	N/A

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan memiliki definisi berbeda dengan target tahunan, target dan realisasi tahunan merupakan persentase Kabupaten/Kota Pangan yang berhasil didampingi oleh BBPOM di Palangka Raya sedangkan target dan realisasi triwulan merupakan persentase tahapan yang telah selesai dilaksanakan dalam rangka pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman. Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian

Kabupaten/Kota Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2026. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan salah satu IKU baru pada tahun 2026. Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terhadap target intervensi, yaitu:

1. Advokasi Pemerintah daerah dan Operasional Perangkat Daerah (OPD) terkait;
   Kegiatan ini dilaksanakan kepada seluruh kabupaten/kota yang menjadi lingkup kerja BBPOM di Palangka Raya, yaitu 10 kabupaten/kota. Pada tahun 2026 ini, dikarenakan masih berlakunya kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 31 Maret 2026 dan dihadiri oleh 54 (lima puluh empat) peserta dari perwakilan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.
2. Desk Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri dan Data Dukung;
   Tahapan desk pendampingan pengisian tools penilaian mandiri dan data dukung dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu desk pendampingan tahap I yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2026 secara hybrid (luring dan daring) di aula BBPOM di Palangka Raya yang dihadiri oleh seluruh PIC OPD terkait 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Sedangkan desk pendampingan tahap II yang direncanakan pada pada tanggal 28 Juli 2026 di aula BBPOM di Palangka Raya.
3. Pelaporan.
   Tahapan pelaporan hasil pendampingan kabupaten/kota pangan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM sesuai dengan time line yang telah ditentukan. Pelaporan hasil pendampingan ini berisikan hasil pendampingan terhadap 4 (empat) kabupaten/kota yang menjadi target intervensi, yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas serta Kota Palangka Raya sebagai target pengawalan.

Keberhasilan Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, OPD terkait dan petugas BBPOM di Palangka Raya terkait peran Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman

dan dampak nyata apabila berhasil mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman;

b. Komitmen dan Dukungan dari Kepala Daerah dan Kepala OPD terkait dalam pelaksanaan penilaian tools dan data dukung kabupaten/kota pangan aman.
c. Monitoring dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti kurangnya informasi terkait teknik pengisian tools dan data dukung yang sesuai dan tepat oleh masing-masing PIC Kabupaten/Kota.

Sepanjang Triwulan II ini, belum ada kendala yang dihadapi secara signifikan dalam melaksanakan program Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman berkat komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait terutama komitmen dan dukungan kepala daerah dan kepala OPD terkait masing-masing kabupaten. Serta dengan adanya dashboard P3K PAMAN memudahkan komunikasi terkait informasi seputar penilaian kabupaten/kota pangan aman sehingga pemantauan dapat dengan mudah dan kapan saja dilakukan baik oleh petugas BBPOM di Palangka Raya maupun Kepala daerah maupun OPD terkait.

Atas capaian indikator Persentase Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II tahun 2026 ini, untuk peningkatan kinerja pada triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

A. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
B. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor terkait;
C. Monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan inovasi P3K PAMAN (Pemantauan Pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman).

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Time-line*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Masih ada beberapa OPD terkait Kabupaten yang belum memiliki komitmen untuk mengikuti desk monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian mandiri	Meningkatkan intensifikasi audiensi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait yang belum dan menjadi target tahun 2026	Melakukan audiensi ke OPD kabupaten yang belum terpapar terkait penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman, yaitu Kabupaten Gunung Mas	Juni 2026	T	S01-15.01	Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi persyaratan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai target yang ditetapkan.

	kabupaten/kota pangan aman						

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9,900,000	7,551,000	76.27%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	198	196	98.99%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENDAMPINGAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	9,900,000	7,551,000	76.27

2 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran Kegiatan II yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target Triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
c		d	e	f=e/f	g	h	i	j=d/i	k
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	Baik	100	100,00	Tercapai
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**100,00**				

16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan Rumus :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki 1 (satu) sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit dan telah memiliki 2 (dua) nomor izin edar, maka cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi hanya dilakukan terhadap 1 (satu) sarana tersebut.

Sarana produksi pangan fortifikasi diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi.

A. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target Triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian Terhadap Target TW II 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	100.00	Baik

Indikator ini menunjukkan kinerja Baik dan berhasil mencapai target secara sempurna, dimana realisasi mencapai 100% terhadap target 100%. Capaian sempurna ini dikategorikan Baik. BBPOM di Palangka Raya menunjukkan efisiensi anggaran dan kinerja yang baik melalui integrasi kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi bersama dengan kegiatan pendampingan pelaku usaha UMKM yang dilaksanakan pada bulan April, serta menjamin efektivitas penggunaan reagen, dengan melaksanakan sampling produk pangan fortifikasi di bulan yang sama mengingat pengujian produk pangan fortifikasi akan dilakukan secara kolektif bersama sampel yang diperoleh dari sarana produksi dan sarana peredaran.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	100	100	100.00

Kinerja indikator ini mencapai hasil sempurna (100.00%). Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau sarana yang ditargetkan untuk pengawasan pangan fortifikasi dan memastikan tindak lanjutnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila capaian kinerja Triwulan II pada tahun 2026 dibandingkan dengan Triwulan I terdapat peningkatan realisasi dan capaian kinerja yang signifikan. Kenaikan kinerja pada indikator kinerja ini dikarenakan tercapainya pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan April.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	▲ Tercapai

Realisasi Triwulan II telah mencapai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa seluruh target sarana produksi pangan fortifikasi yang direncanakan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti selama tahun 2026 telah berhasil dicakup dan diselesaikan sesuai ketentuan. Capaian 100% pada Triwulan II menunjukkan efisiensi tinggi, di mana target tahunan telah terpenuhi lebih awal dari periode kerja tahunan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kinerja pada indikator persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II ini telah tercapai 100% dengan kriteria Baik, terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang kinerja pada indikator ini, antara lain:

1. Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 Maret 2026 sebagai sarana peningkatan kompetensi petugas

dalam melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dan samplingnya.
2. Integrasi kegiatan untuk menanggulangi akibat efisiensi anggaran yang berimbas pada pemotongan alokasi anggaran perjalanan dinas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
3. Penerapan sistem arsip yang terintegrasi dengan *cloud storage* (inovasi PAMELA) dimana formulir pengawasan dapat diakses secara *online* oleh petugas selama jaringan internet terkoneksi.
4. Juknis pengawasan dan tindak lanjut yang jelas dan memiliki payung hukum dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai bentuk pengendalian terhadap potensi risiko ketidaktepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Selain faktor-faktor diatas yang mendukung tercapainya kinerja pada Triwulan II ini, tetap ada kemungkinan yang dapat menghambat kinerja sesuai dengan risiko yang telah dievaluasi yaitu terjadinya praktik gratifikasi dimana pelaku usaha yang belum paham mengenai aturan gratifikasi seringkali merasa perlu memberikan sesuatu agar hubungan profesional dengan instansi pengawas tetap terjaga dengan baik.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, namun tetap terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja, hal tersebut telah diidentifikasi sebagai kendala/permasalahan dalam laporan kinerja tahun 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	RATL Tahun 2025 s/d Triwulan I Tahun 2026			Sd Triwulan II Tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Terdapat keterbatasan alokasi anggaran operasional akibat kebijakan efisiensi yang berimbas pada pemotongan anggaran perjalanan dinas pengawasan fisik ke sarana produksi pangan fortifikasi	Melakukan integrasi kegiatan pengawasan guna mengoptimalkan sisa anggaran perjalanan dinas yang tersedia	Menyusun jadwal pengawasan terpadu (menggabungkan beberapa objek pemeriksaan pangan fortifikasi dalam satu kali rute perjalanan dinas) untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran	Memastikan penghematan biaya operasional kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah diterapkannya sistem rute terpadu.	Selesai

Evaluasi tindak lanjut tidak hanya difokuskan pada status penyelesaian rekomendasi, tetapi juga pada efektivitasnya dalam menyelesaikan akar penyebab permasalahan.

Oleh karena itu, dilakukan analisis kondisi sebelum dan sesudah untuk menilai perubahan yang dicapai setelah implementasi rencana tindak lanjut. Hasil pengukuran efektivitas tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindak lanjut telah memadai atau masih diperlukan rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) seperti pada tabel berikut:

No	RATL Tahun 2025 s/d Triwulan I Tahun 2026		Kondisi		Evaluasi Efektifitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Terdapat keterbatasan alokasi anggaran operasional akibat kebijakan efisiensi yang berimbas pada pemotongan anggaran perjalanan dinas pengawasan fisik ke sarana produksi pangan fortifikasi	Menyusun jadwal pengawasan terpadu (menggabungkan beberapa objek pemeriksaan pangan fortifikasi dalam satu kali rute perjalanan dinas) untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran	Anggaran pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi hanya cukup untuk 1 (satu) orang petugas	Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 (dua) orang petugas bersama tim dengan penugasan lainnya	Efektif

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

- Penyampaian informasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan SMAP dan kanal pengaduan,
- Menjaga Integritas petugas dengan penegasan mencantumkan kalimat “Petugas Tidak Diperkenankan Menerima Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun“ dalam surat tugas serta *link* survei integritas untuk diisi oleh pelaku usaha.
- Evaluasi anggaran untuk pengajuan usulan tahun berikutnya agar petugas dapat melaksanakan tugas tanpa kekurangan hak nya.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2.104.000	2.104.000	100.00%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi *output* fisik. Berikut adalah capaian realisasi *output* yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian *Output*	Target *Output* TW II tahun 2026	Realisasi *Output* TW II tahun 2026	Capaian Realisasi *Output*
QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI FORTIFIKASI	2.104.000	2.104.000	100.00

3 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
c		d	e	f=e/f	g	h	i	j=d/i	k
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,24	92,88	101,46	101,46	Sangat Baik	92,88	101,46	Melampaui
18	*Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**	*70*	*70*	*100,00*	*100,00*	Baik	*100*	*70,00*	*Akan Tercapai*
19	*Jumlah desa pangan aman**	*25*	*25*	*100,00*	*100,00*	Baik	*100*	*25,00*	*Perlu Upaya Keras*
20	*Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**	*90*	*80*	*112,50*	*110,00*	Tidak dapat Disimpulkan	*100*	*90,00*	*Akan Tercapai*
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**102,87**				

17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan, Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) kepada masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran KIE BPOM mewakili kumpulan individu atau komunitas seperti komunitas

lokal/masyarakat adat, komunitas sekolah, komunitas profesi, organisasi masyarakat dan atau komunitas berbasis kepentingan tertentu lainnya.

Tujuan Pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan BPOM;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan pembagian peran dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih informasi Obat dan Makanan dari BPOM sebagai sumber informasi yang valid dan terpercaya;
4. Meningkatkan pengetahuan serta mendorong sikap dan perilaku positif masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan KIE yang dilaksanakan oleh BPOM diukur melalui indikator kinerja Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Tingkat Efektivitas KIE adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE yang dilaksanakan meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Pengukuran Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei berupa *face to face interview,* penyebaran kuesioner dan *online* survei dan Jumlah responden dihitung berdasarkan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap Triwulan.

A. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target Triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,88	94,24	101,46	101,46	Sangat Baik

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE pada Triwulan II tahun 2026 BBPOM di Palangka Raya diperoleh nilai 94,24 dengan capaian sebesar 101,46% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.88	94.24	101.46
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	92.88	94.24	101.46

Pada Triwulan II tahun 2026, realisasi efektivitas KIE mencapai angka 94.24. Dengan target berkala yang ditetapkan sebesar 92.88 baik untuk Triwulan I maupun Triwulan II, BBPOM di Palangkaraya berhasil melampaui target tersebut di kedua triwulan dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 101.46%. Hasil ini menandakan bahwa strategi edukasi dan pengawasan masyarakat terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang dijalankan sejak awal tahun telah berjalan secara efektif dan terstruktur, sehingga tidak terjadi penurunan mutu pelayanan maupun jangkauan efektivitas KIE pada Triwulan ini.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 1 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.88	94.24	101.46	▲ Melampaui

Target tahunan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 92.88. Hingga Triwulan II, BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencatatkan realisasi sebesar

94.24. Dengan realisasi yang melebihi angka target tersebut, persentase capaian terhadap target tahunan tercatat sebesar 101.46. Hal ini menempatkan indikator kinerja ini ke dalam kategori "Tercapai/Melampaui". Hasil capaian yang melampaui target pada pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berjalan dengan sangat efektif dan efisien. BBPOM di Palangka Raya optimis dapat mempertahankan tren positif ini hingga akhir tahun anggaran demi memastikan mutu pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja tetap optimal.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai Triwulan II tahun 2026 , tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 313 (tiga ratus tiga belas) responden yang terdiri dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) responden survei KIE Tatap Muka dan 135 (seratus tiga puluh lima) responden KIE Media. Tingkat efektivitas KIE Triwulan II diperoleh dengan capaian sebagai berikut:



Pengukuran kriteria penilaian pada masing-masing jenis KIE adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, dari sisi penilaian efektivitas edukasi langsung, indeks KIE Tatap Muka mencapai angka tertinggi (95,13). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi langsung antara petugas/narasumber dengan masyarakat masih menjadi metode paling efektif dalam menanamkan pemahaman dan kepercayaan publik. Sementara pada unsur persepsi manfaat yang tinggi, pada kedua jenis kategori KIE (Tatap Muka dan Media), unsur "Manfaat" mendapatkan skor tertinggi (masing-masing 96,34 dan 94,3). Ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dirasakan kegunaannya secara langsung. Pada aspek kualitas sumber daya manusia, nilai

tinggi pada poin Narasumber/Petugas (94,36) mencerminkan kompetensi dan cara penyampaian petugas di lapangan sudah sangat baik dan mampu diterima oleh audiens dengan positif.

Berdasarkan hasil survei evaluasi yang dilakukan langsung kepada 178 responden penerima manfaat kegiatan tatap muka, pelaksanaan KIE secara langsung oleh BBPOM di Palangka Raya berada pada kategori "SANGAT EFEKTIF" dengan nilai Indeks Tatap Muka keseluruhan mencapai 95.32.

Berikut adalah rincian capaian performa pada masing-masing kriteria penilaian tatap muka:

- Narasumber/Petugas (95.51): Kriteria ini memperoleh nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa kompetensi, kejelasan penyampaian materi, serta sikap komunikatif dari petugas BBPOM di Palangka Raya di lapangan dinilai sangat baik dan profesional oleh masyarakat.
- Manfaat KIE bagi Audiens (95.58): Nilai yang sangat tinggi pada poin ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan dalam KIE tatap muka dirasakan memberikan dampak nyata serta nilai tambah bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap Obat dan Makanan.
- Konten/Informasi KIE (95.41): Capaian ini mencerminkan bahwa materi edukasi, alat peraga, maupun informasi hukum/teknis yang dibagikan selama kegiatan langsung dinilai akurat, menarik, serta relevan dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat.
- Pemahaman Audiens (94.80): Meskipun menjadi nilai terendah di antara kriteria lainnya, angka ini tetap berada pada level yang sangat tinggi. Hal ini menandakan pesan-pesan keamanan pangan dan obat yang disampaikan secara langsung berhasil diserap dengan baik oleh mayoritas peserta kegiatan.



Secara keseluruhan, metode interaksi langsung (tatap muka) terbukti menjadi instrumen edukasi yang paling kuat dalam membangun kedekatan informasi dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Berdasarkan hasil survei evaluasi yang dilakukan terhadap 135 responden yang mengakses kanal-kanal media informasi BBPOM di Palangka Raya, pelaksanaan KIE melalui media massa maupun media digital dinilai "EFEKTIF" dengan capaian Indeks Media keseluruhan sebesar 93.15.

Berikut adalah rincian capaian performa pada masing-masing kriteria penilaian media:

- Manfaat KIE bagi Audiens (93.61): Kriteria ini memperoleh nilai tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa produk informasi, konten edukasi, maupun publikasi yang disebarkan melalui berbagai media dirasakan sangat memberikan manfaat nyata, mengedukasi, serta menjadi panduan yang berguna bagi masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman.
- Pemahaman *Audiens* (93.15): Capaian ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui visualisasi (infografis), tulisan, maupun audio visual yang dirancang oleh petugas telah dikemas dengan bahasa yang sederhana, sehingga pesan-pesan keamanan produk dapat diserap dengan sangat baik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
- Sumber Informasi (93.06): Nilai ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap BBPOM di Palangka Raya sebagai institusi yang kredibel, valid, dan terpercaya dalam mengeluarkan rilis informasi resmi terkait Obat dan Makanan.
- Konten/Informasi KIE (92.78): Meskipun berada pada angka paling rendah di antara kriteria media lainnya, nilai ini tetap melampaui standar efektivitas.

Angka ini menunjukkan bahwa kesesuaian materi edukasi, keakuratan data, serta daya tarik visual dari konten media yang dipublikasikan sudah berada pada level performa yang sangat baik.

Secara keseluruhan, pemanfaatan media (baik media sosial, digital, cetak, maupun elektronik) terbukti menjadi sarana penyebaran informasi yang strategis dan efisien untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat tanpa terikat batasan jarak dan waktu.

Materi KIE yang sangat diingat oleh responden adalah:

- Tugas dan wewenang BPOM;
- Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan;
- Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM *Mobile*;
- Tanya HALOBPOM/Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan;
- Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kataBPOM;
- Cegah *Stunting* dengan Keamanan Pangan;
- Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Responden juga memberikan masukan materi KIE yang dibutuhkan, antara lain:

1. Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman;
2. Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di Masyarakat;
3. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	26.605.600	21.734.860	81.69%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi *output* fisik. Berikut adalah capaian realisasi *output* yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian *Output*	Target *Output* TW II tahun 2026	Target *Output* TW II tahun 2026	Capaian Realisasi *Output*
BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	340	757	100.00%
BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	3	9	300.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN	0	600.000	N/A
2	PEMBERDAYAN MASYARAKAT BERSAMA MOBIL LABORATORIUM KELILING DAN PELAYANAN MELALUI INOVASI LAYANAN PUBLIK (LAURA JEMPOL)	15.605.000	14.185.900	90.91
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN SECARA DARING/PODCAST	0	0	N/A
4	FGD TERKAIT PERSEPSI LINTAS SEKTOR TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK. PROGRAM BADAN POM INOVASI PELAYANAN PUBLIK	5.260.000	4.880.000	92.78
5	SOSIALISASI PETUGAS/BIMTEK KADER DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK INKLUSIF DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	0	0	N/A
6	KIE / BIMTEK/SOSIALISASI MELALUI INOVASI LAYANAN PUBLIK/KEGIATAN SAKA POM/KEGIATAN CFD (Car Free Day)	1.639.000	523.260	31.93
7	PEMANTAUAN TOKSILOVIGILANCE	1.000.000	0	0.00
8	PENYEBARAN INFORMASI. PAMERAN. PUBLIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN INDEKS KESADARAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT	1.651.600	1.545.700	93.59

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
9	PENYEBARAN INFORMASI. PUBLIKASI. PAMERAN. SOSIALISASI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK	1.450.000	0	0.00

18 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi bagi anak usia sekolah, yang dapat berupa pangan siap saji, pangan olahan baik yang diproduksi oleh industri besar (MD/ML) maupun pangan olahan IRTP. Bahaya pangan, baik yang bersifat biologis, kimia, maupun fisik, berpotensi mencemari pangan jajanan yang dikonsumsi masyarakat akibat penerapan praktik keamanan pangan yang buruk serta kondisi lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu BPOM menginisiasi Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dam bergizi melalui peran serta aktif seluruh kementerian, lembaga pemerintah dan lintas sektor baik di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.

Pada awal penetapan Renstra 2025-2029, pada tahun 2026 ini BBPOM di Palangka Raya mendapatkan target 8 (delapan) sekolah target intervensi dan 15 (lima belas) target perluasan. Akibat adanya efisiensi anggaran maka terjadi penurunan penetapan target sehingga target sekolah intervensi menjadi 5 (lima) sekolah dan 9 (sembilan) sekolah target perluasan. Pencapaian target setiap triwulannya tidak berdasarkan pencapaian jumlah sekolah tapi berdasarkan persentase capaian tahapannya.

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.
Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan [1]

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

A. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target Triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian Terhadap Target TW II 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100,00	100,00	Baik

Kegiatan Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan pemilihan wilayah pada tahun 2026 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *Stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan S*tunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi juga didasarkan pada jarak wilayah untuk efisiensi anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat

Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap Triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan II 2026 tahapan kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman yang telah dilakukan adalah Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi lokus intervensi tahun 2026 dan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 di Aula Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini diikuti oleh 2 (dua) orang guru masing-masing sekolah target intervensi (5 sekolah) yang nantinya akan menjadi Kader Keamanan Pangan Sekolah serta diikuti secara daring oleh perwakilan 2 (dua) sekolah yang menjadi target replikasi. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk membentuk sumberdaya yang kompeten terkait keamanan pangan melalui pembentukan kader/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan intervensi pembudayaan PJAS aman disekolah. Realisasi tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II ini sebesar 25% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kategori capaian “Baik”.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	70	70	100,00

Target dan realisasi kinerja Triwulan II 2026 (70%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 45% apabila dibandingkan dengan target dan realisasi Triwulan I 2026 (25%). Hal ini menunjukkan adanya progress peningkatan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di triwulan selanjutnya tahun selanjutnya serta menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target di tahun selanjutnya dengan memperhatikan *event* yang secara rutin dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan pula karakteristik di setiap daerah yang menjadi lokus intervensi.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	70	70,00	▼ Akan Tercapai

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 sebesar 75% apabila dibandingkan dengan target tahunan (100%) dengan kategori akan tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan dan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis untuk menetapkan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan sehingga dapat memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II ini, capaian BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Atas capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan BBPOM di Palangka Raya Triwulan II tahun 2026 ini, untuk peningkatan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor terkait;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala melekat guna memastikan pelaksananaan tahapan dan laporan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.

Sepanjang Triwulan II, belum ada kendala yang dihadapi secara signifikan dalam melaksanakan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berkat komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	24.830.025	29.056.917	117.02%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi *output* fisik. Berikut adalah capaian realisasi *output* yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian *Output*	Target *Output* TW II tahun 2026	Target *Output* TW II tahun 2026	Capaian Realisasi *Output*
BDB.001 Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan*	70%	70%	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	ADVOKASI LINTAS SEKTOR PJAS DI DAERAH	9.700.025	92.000.25	82,58
2	SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	7.831.000	13.132.195	167.69
3	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	6.225.000	6.224.697	100.00
4	PENGADAAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	1.074.000	0	0.00

19 Jumlah Desa Pangan Aman

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, program intervensi keamanan pangan dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting,desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dalam program desa pangan aman, desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu desa yang menjadi target adalah desa . Tahapan program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi keamanan pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman Ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Pada awal penetapan Renstra 2025-2029, pada tahun 2026 ini BBPOM di Palangka Raya mendapatkan target 3 (tiga) desa target intervensi. Akibat adanya efisiensi anggaran maka terjadi penurunan target sehingga target desa intervensi menjadi 2 (dua) desa. Pencapaian target setiap triwulannya tidak berdasarkan pencapaian jumlah desa, tapi berdasarkan persentase capaian tahapannya.



PEMBOBOTAN 2026

No	Kegiatan	UPT BPOM	Loka POM di Belu dan Loka POM di Sumba	*Timeline*
1	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	25%	Februari - April
2	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	25%	**Maret - Mei** atau **Juli - Agustus**
3	Bimtek Komunitas	20%	25%	**Mei - Juni** atau **September - Oktober**
4	Fasilitasi Keamanan Pangan	-	-	**Mei - Juni** atau **September - Oktober**
5	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor)	20%	25%	**Juni - Juli** atau **Oktober - November**
6	Pengawalan	10%	-	Februari - November
	Total skor	**100%**	**100%**	

A. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target Triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian Terhadap Target TW I 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	25	25	100.00	100,00	Baik

Jumlah Desa Pangan Aman dihitung berdasarkan jumlah Desa Baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Penetapan pemilihan wilayah/lokus intervensi pada tahun 2026 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *Stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan S*tunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi juga didasarkan pada jarak wilayah untuk efisiensi anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Persentase realisasi tahapan program Desa Pangan Aman pada triwulan II ini sebesar 25% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kategori capaian “Baik”. Pada Triwulan II 2026 belum ada penambahan progres pelaksanaan tahapan kegiatan Desa Pangan Aman. Hal ini disebabkan oleh

penetapan target pelaksanaan tahapannya selanjutnya masuk *batch* 2 (semester 2), sesuai dengan pembobotan pada juknis pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2026.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Jumlah Desa Pangan Aman	25	25	100.00
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	25	25	100.00

Target dan realisasi kinerja triwulan II 2026 (25%) belum mengalami peningkatan dibandingkan dengan target dan realisasi Triwulan I 2025 (5%). Hal ini disebabkan oleh penetapan target pelaksanaan tahapannya, selanjutnya masuk *batch* 2 (semester 2) sesuai dengan pembobotan pada juknis pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2026. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi dan analisis untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	100	25	25.00	Perlu Upaya Keras ▼

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 sebesar 25% apabila dibandingkan dengan target tahunan (100%) dengan kategori perlu upaya keras. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis untuk menetapkan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan sehingga dapat memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I, BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian Triwulan I dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Atas capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2026, untuk peningkatan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor terkait;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala

Sepanjang Triwulan II, belum ada kendala yang dihadapi secara signifikan dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman berkat komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja. Target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Jumlah Desa Pangan Aman	5.207.000	2.597.100	49.88%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi *output* fisik. Berikut adalah capaian realisasi *output* yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian *Output*	Target *Output* TW II tahun 2026	Target *Output* TW II tahun 2026	Capaian Realisasi *Output*
BDB.002 Desa Pangan Aman*	25%	25%	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

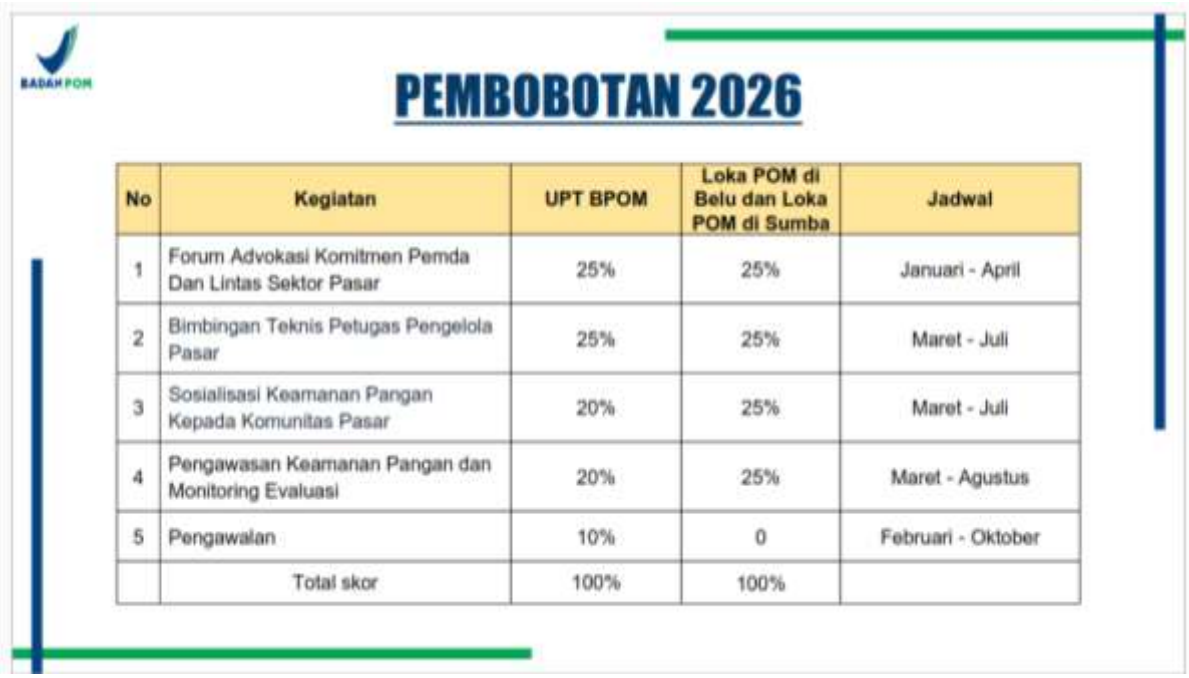
No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN PAKET INFORMASI KEAMANAN PANGAN	1,000,000	0	0.00
2	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	0	0	N/A
3	BIMTEK KOMUNITAS DESA	1,758,000	858,000	48.81
4	FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	1,230,000	1,229,100	99.93
5	MONITORING DAN EVALUASI DALAM GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA	1,219,000	510,000	41.84

20 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Sedangkan komunitas pasar adalah kelompok yang meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar dan anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar

di Pasar Rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Jumlah pasar aman berbasis komunitas adalah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas



PEMBOBOTAN 2026

No	Kegiatan	UPT BPOM	Loka POM di Belu dan Loka POM di Sumba	Jadwal
1	Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar	25%	25%	Januari - April
2	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	25%	25%	Maret - Juli
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	25%	Maret - Juli
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%	25%	Maret - Agustus
5	Pengawalan	10%	0	Februari - Oktober
	Total skor	100%	100%	

A. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target Triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian Terhadap Target TW II 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	80	90	112.50	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2026 ini, Pasar Desa Pamarunan, Kabupaten Pulang Pisau, merupakan target intervensi pasar yang ditetapkan berdasarkan pemilihan pasar yang ada di desa intervensi dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasar Pamarunan merupakan pasar mingguan yang beraktivitas setiap hari selasa setiap minggunya. Pada Triwulan II tahun 2026, tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas yang telah dilakukan adalah tahapan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 21 April 2026 di aula Kantor Desa Pamarunan yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) komunitas pasar yang terdiri dari pedagang dan pengelola pasar.

Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar yang dilaksanakan dalam jangka waktu bulan Mei sampai dengan Juni 2026 kepada komunitas Pasar dengan melaksanakan Sosialisasi melalui pembuatan konten 5 (lima) video bersama pada pedagang dan tim keamanan pangan pasar yang diunggah di media sosial dan disebarkan melalui *WhatsApp Grup* dengan tema: 1. Cek KLIK; 2. BPOM Mobile; 3. Pengenalan Bahan Berbahaya pada Pangan;4. 5 Kunci Keamanan Pangan. Selanjutnya, pelaksanaan tahapan pengawasan keamanan pangan di pasar tahap I pada tanggal 16 Juni 2026 dan tahap II pada tanggal 30 Juni 2026.

Persentase realisasi tahapan program pasar aman berbasis komunitas pada Triwulan II ini sebesar 90% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 112.5% dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Capaian pada Triwulan II ini melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan pelaksanaan tahapan pengawasan keamanan pangan tahap II yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli 2026, tapi dikarenakan keterbatasan anggaran dilaksanakan pada bulan Juni 2026 bersamaan dengan sosialisasi keamanan pangan tahap IV.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	25	25	100.00
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	80	90	112.50

Target dan realisasi kinerja Triwulan II 2026 (80% dan 90%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 55% dan 60% apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja Triwulan I 2025 (25%), di mana capaian Triwulan I sebesar 100% sedangkan Triwulan II sebesar 112.5%. Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Hal ini ke depannya akan dijadikan bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan target tahapan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun selanjutnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	90	90,00	▼ Akan Tercapai

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 sebesar 90% apabila dibandingkan dengan target tahunan (100%) dengan kategori akan tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan dan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis untuk menetapkan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan sehingga dapat memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian Triwulan II ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
2. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Akan tetapi pencapaian pada Triwulan II ini mengalami anomali dengan capaian 112.5% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran akibat efisiensi anggaran mengakibatkan pelaksanaan tahapan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar tahap II dilaksanakan pada bulan Juni 2026 bersamaan dengan pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar tahap IV, yang mana seharusnya target pelaksanaannya di bulan Juli 2026 (Triwulan III).

Atas capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2026, untuk peningkatan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor terkait;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala

Sepanjang Triwulan II, belum ada kendala yang dihadapi secara signifikan dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman berkat komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan

perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di Triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	17.642.000	11.303.838	64.07%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi *output* fisik. Berikut adalah capaian realisasi *output* yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian *Output*	Target *Output* TW II tahun 2026	Target *Output* TW II tahun 2026	Capaian Realisasi *Output*
BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas*	80%	90%	112.50%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	4,716,000	3,390,982	71.90
2	PENGADAAN RAPID TES KIT	4,757,000	0	0.00
3	SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	948,000	948,000	100.00
4	PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	5,691,000	5,218,856	91.70
5	MONITORING DAN EVALUASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	0	0	N/A
6	LOMBA PROGRAM PRO PN	1,530,000	1,746,000	114.12

4 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
c		d	e	f=e/f	g	h	i	j=d/i	k
21	*Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**	*73,57*	*73*	*100,78*	*100,78*	Sangat Baik	*100*	*73,57*	*Akan Tercapai*
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**100,78**				

21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Pemenuhan standar keamanan dan mutu ditandai dengan UMKM mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang Baik (CPOBAB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang baik (CPKB) yang dibuktikan dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK, Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) dan/atau Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi meliputi:
UMKM Pangan Olahan:

1. Diutamakan UMK yang memproduksi jenis pangan olahan selain yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
2. Telah memiliki nomor P-IRT, namun berdasarkan perkembangan skala usaha telah wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM RI MD;
3. Tidak memiliki nomor P-IRT, tetapi mau mengajukan Nomor Izin Edar BPOM RI MD sesuai ketentuan;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memiliki nilai minimal B; dan/atau
5. Dapat mengangkat produk pangan lokal/khas daerah atau mendukung program pemerintah

UMKM Obat Bahan Alam:

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/atau Tahap 3); dan
6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

UMKM Kosmetik:

1. UMKM yang memproduksi kosmetik;
2. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan menggunakan Rumus:

Perhitungan target tahunan (B12):
((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:
((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100%

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73	73.57	100.78	100.78	Sangat Baik

Realisasi pendampingan UMKM pada Triwulan II tahun 2026 mencapai 73.57% melebihi target yang ditetapkan sebesar 73% dengan capaian kinerja sebesar 100.78% dimana kategori capaian Sangat Baik.

Capaian Kinerja pada Triwulan II ini sangat dipengaruhi oleh adanya inovasi percepatan Bimtek CPPOB yang dilaksanakan secara *Hybrid* dan penggunaan kanal pelatihan *online* KAHAYAN INPRO yang menyederhanakan dan mengefisienkan bimtek pelaku usaha.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	23	31.82	141.42
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	73	73.57	100.78

Pada Triwulan I 2026, BBPOM di Palangka Raya menetapkan target kinerja sebesar 23%. Namun, realisasi di lapangan melompat signifikan hingga 31.82%, menghasilkan capaian kumulatif triwulanan sebesar 141.42%. Tingginya realisasi pada awal tahun anggaran ini dipicu antusiasme pelaku usaha dalam memenuhi

tahapan pendampingan terutama pelaku usaha pangan olahan dan adanya *carry over* pendampingan dari tahun sebelumnya.

Memasuki Triwulan II 2026, target kumulatif yang ditetapkan meningkat secara progresif menjadi 73%, sebagai akibat adanya perubahan/penyesuaian target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Melalui pengelolaan tahapan pendampingan yang konsisten dan intensif, realisasi kumulatif berhasil dijaga pada angka 73.57% atau setara dengan capaian kinerja sebesar 100.78%. Angka ini menunjukkan bahwa program pendampingan tetap berjalan *on-track*, efektif, dan berhasil memenuhi ekspektasi target kuartalan dengan kategori penilaian Sangat Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100	73.57	73.57	▼ Akan Tercapai

Realisasi kinerja Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahunan pada tahun 2026 karena perbedaan rumus perhitungan target B1-B11 dengan target B12. Dimana rumus perhitungan capaian kinerja B1-B11 berupa akumulasi persen tahapan pendampingan pelaku usaha yang telah diselesaikan, sementara untuk perhitungan B12 adalah jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha target renstra.

Berdasarkan hasil kinerja pada Triwulan II dan diproyeksikan hingga akhir tahun, kinerja pada indikator ini akan tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun capaian menunjukkan potret yang sangat positif ("Sangat Baik"), terdapat catatan evaluasi penting yang bersumber dari dinamika realisasi pada Triwulan I dan konsekuensi pemotongan/efisiensi anggaran yang dilakukan. Pada awal tahun anggaran (Triwulan I), pelaksanaan tahapan pendampingan awal melompat jauh melampaui estimasi awal yang tertuang dalam perencanaan tahunan. Tahapan awal ini meliputi pengumpulan data dan penetapan target, hal tersebut terjadi karena antusiasme pelaku usaha dalam memenuhi tahapan pendampingan terutama pelaku usaha pangan olahan dan adanya *carry over* pendampingan dari tahun sebelumnya.

Tingginya realisasi di awal periode berimplikasi pada persentase capaian kumulatif yang menjadi sangat tinggi *(overachievement)* pada awal tahun berjalan. Untuk menjaga akuntabilitas, akurasi, dan objektivitas dalam mengukur kinerja organisasi secara riil, kondisi ini memerlukan tindakan penyesuaian target kinerja.

Apabila target tetap dipertahankan pada angka awal (60%) pada akhir Triwulan kedua, maka evaluasi triwulan kedua akan menghasilkan *overperformance* yang kurang mencerminkan lima komponen hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja,. Oleh karena itu, pada triwulan ini diusulkan adanya perubahan/penyesuaian target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Oleh karena itu, pada triwulan ini diusulkan adanya perubahan/penyesuaian target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor : PR.07.21.05.26.263 tanggal 25 Mei 2026 menjadi 73%.

Penyesuaian target melalui RAPK ini merupakan wujud fungsi *controlling* yang responsif terhadap dinamika riil di lapangan. Penyesuaian ini menjamin target akhir tahun tetap menantang namun tetap realistis.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, namun tetap terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja, hal tersebut telah diidentifikasi sebagai kendala/permasalahan dalam laporan kinerja tahun 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I th 2026			sd .Triwulan II tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	**Rekomendasi**	**Rencana Tindak Lanjut**	**Evaluasi Tindak Lanjut**	**Status TL**
	Terhentinya keterlibatan mahasiswa non-magang sebagai fasilitator inovasi **UMKM BERDIKARI**	Mengubah model kemitraan dengan perguruan tinggi dari skema tugas mata kuliah biasa menjadi skema Magang Terstruktur yang Setara SKS (seperti program MBKM/MSIB)	Rekrutmen Fasilitator Melalui Jalur Magang Khusus	Telah mengajukan kebutuhan mahasiswa magang resmi melalui Disnaker	Selesai
2	Capaian tahapan pendampingan UMKM pada Triwulan I melampaui target awal	Perubahan/penyesuaian target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	Menyampaikan draf kertas kerja RAPK yang telah disesuaikan kepada pimpinan dan bagian perencanaan untuk mendapatkan persetujuan resmi sebagai dasar penilaian kinerja triwulan berikutnya	• Memastikan seluruh administrasi revisi RAPK telah terdokumentasi dengan baik di dalam sistem informasi kinerja organisasi. • Memastikan nilai capaian kinerja pada Triwulan II tidak lagi mengalami anomali	Selesai

Evaluasi tindak lanjut tidak hanya difokuskan pada status penyelesaian rekomendasi, tetapi juga pada efektivitasnya dalam menyelesaikan akar penyebab permasalahan. Oleh karena itu, dilakukan analisis kondisi sebelum dan sesudah untuk menilai perubahan yang dicapai setelah implementasi rencana tindak lanjut. Hasil pengukuran efektivitas tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindak lanjut telah memadai atau masih diperlukan rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan *(continuous improvement)* seperti pada tabel berikut:

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I th 2026		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Terhentinya keterlibatan mahasiswa non-magang sebagai fasilitator inovasi **UMKM BERDIKARI**	Rekrutmen Fasilitator Melalui Jalur Magang Khusus	Fasilitator mahasiswa kesulitan dalam menjadwalkan kegiatan pendampingan pelaku usaha karena masih ada jadwal kuliah rutin	Fasilitator mahasiswa dapat fokus melaksanakan pendampingan pelaku usaha yang ditugaskan	Efektif
2	Capaian tahapan pendampingan UMKM pada Triwulan I melampaui target awal	Perubahan/penyesuaian target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	*Overtarget* sehingga kinerja tidak dapat disimpulkan	Capaian kinerja tidak mengalami anomali dan *ontrack* tahapan pendampingan	Efektif

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan serta memastikan pencapaian indikator kinerja yang lebih optimal, diperlukan penguatan pengendalian risiko melalui perbaikan pada aspek monitoring dan evaluasi kinerja, sebagai berikut:

- Mengidentifikasi UMKM yang memiliki komitmen tinggi dan infrastruktur dasar yang memadai berdasarkan GAP persyaratan sarana sehingga potensi kelulusan dan percepatan proses rekomendasi lebih besar
- Mengantisipasi putusnya kemitraan dengan Perguruan tinggi dalam melanjutkan inovasi UMKM BERDIKARI dengan mengubah skema fasilitator mahasiswa dari mahasiswa dengan mata kuliah kewirausahaan menjadi mahasiswa magang.
- Meningkatkan kualitas pendampingan yang kurang optimal dengan melaksanakan tahapan pendampingan dan *coaching* sesuai dengan juknis pendampingan pelaku usaha serta fokus pada poin-poin krusial dalam pemenuhan persyaratan GMP serta pengembangan kompetensi fasilitator agar memiliki dedikasi tinggi dan kompeten, serta mampu membangun komunikasi

yang baik dengan UMKM, sehingga meningkatkan motivasi dan kepatuhan UMKM
- Mengantisipasi adanya hubungan keluarga antara pelaku usaha dan petugas fasilitator dengan mengendalikan integritas petugas melalui surat pernyataan benturan kepentingan
- Mengantisipasi adanya praktik pemberian gratifikasi dan pemerasan dengan mengendalikan integritas petugas fasilitator melalui Surat Tugas yang mencantumkan QR code survei integritas sebagai bentuk pengendalian.

Selain faktor-faktor diatas yang mendukung tercapainya kinerja, tetap ada kemungkinan yang dapat menghambat kinerja triwulan berikutnya sesuai dengan risiko yang telah dievaluasi yaitu:

1. Terjadinya praktik gratifikasi dimana pelaku usaha yang belum paham mengenai aturan gratifikasi seringkali merasa perlu memberikan sesuatu agar hubungan profesional dengan instansi pengawas tetap terjaga dengan baik.
2. Keterbatasan anggaran dalam melakukan pendampingan untuk pelaku usaha yang berada di luar Kota Palangka Raya.
3. Keterlambatan pemenuhan rekomendasi perbaikan oleh pelaku usaha
4. Terjadinya perlambatan proses pelayanan akibat adanya masa transisi dan penyesuaian sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* pasca-terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta perlunya sinkronisasi tingkat risiko usaha pada sistem OSS sesuai amanat PP Nomor 28 Tahun 2025.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Penyampaian informasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan SMAP dan kanal pengaduan,
2. Menjaga Integritas petugas dengan penegasan mencantumkan kalimat “Petugas Tidak Diperkenankan Menerima Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun“ dalam surat tugas serta QR code survei integritas untuk diisi oleh pelaku usaha.
3. Evaluasi anggaran untuk pengajuan usulan tahun berikutnya agar petugas dapat melaksanakan tugas tanpa kekurangan hak nya.
4. Kolaborasi lintas sektor dan integrasi kegiatan untuk menanggulangi akibat efisiensi anggaran yang berimbas pada pemotongan alokasi anggaran kegiatan pendampingan pelaku usaha.
5. Koordinasi intensif dengan tim PUSDATIN untuk percepatan *update* sistem, melakukan *bridging* data secara berkala, serta proaktif melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (*coaching clinic*) penyesuaian regulasi baru kepada pelaku usaha agar proses sertifikasi tetap berjalan linier.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Tidak Ada Kendala	Perhatikan tahapan pendampingan untuk UMK komoditi OBA dan Kosmetik	evaluasi pemenuhan standar untuk UMK Kosmetik	Juli 2026	Tidak		

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	4.728.000	5.273.000	111.53%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Realisasi Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	*60%*	*73.57%*	122.62%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	UMKM BERDIKARI FASILITASI/PENDAMPINGAN PEMENUHAN PERSYARATAN REGISTRASI PRODUK UMKM	4.728.000	4.388.000	92.81
2	BIMTEK GMP / SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN BAGI PELAKU USAHA/LAYANAN INKLUSIF	0	885,000	N/A

5 Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
c		d	e	f=e/f	g	h	i	j=d/i	k
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	66	151,52	110,00	Tidak dapat Disimpulkan	100	100,00	Tercapai
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**110,00**				

Sasaran Kegiatan Kelima yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, pelaksanaan penindakan dilakukan melalui tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Definisi Indikator Kinerja *Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* adalah bahwa Penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dari operasi intelijen untuk mengumpulkan informasi, yang selanjutnya dianalisis guna memastikan kebenaran atas dugaan terjadinya tindak pidana di masyarakat, sampai dengan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%. -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perkara *Carry Over* dapat dihitung jika terdapat *progress* perkara pada tahun berjalan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	66	100	151.52	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh dari penyelesaian pemberkasan terhadap 2 (dua) perkara yang telah mencapai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II). Dengan target kinerja sebesar 66%, capaian indikator kinerja mencapai 151.52% dan setelah dilakukan normalisasi menjadi 110%.

Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan karena pada perencanaan awal ditargetkan penanganan 1 (satu) perkara, namun dalam proses penyidikan

berkembang menjadi 2 (dua) berkas perkara yang dipisahkan (*split*). Informasi kinerja tersebut telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam mendukung pencapaian target kinerja. Berdasarkan kategori penilaian kinerja, capaian indikator termasuk dalam kriteria ***Tidak Dapat Disimpulkan.***

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	36	36.67	101.86
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	66	100	151.52

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya mencatat realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 100%. Capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 36.67%. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya percepatan dalam penyelesaian perkara serta peningkatan efektivitas pelaksanaan proses penyidikan pada periode berjalan.

Dengan target kinerja sebesar 66%, capaian indikator kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 151.52% dan selanjutnya dilakukan normalisasi menjadi 110%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja, capaian indikator tersebut termasuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	100	100.00	▲ Tercapai

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan II sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yaitu sebesar 100% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan II tahun 2026 sebesar 100% dengan kriteria "**Tercapai/Melampaui**".

Indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan gambaran *progress* penanganan perkara sekaligus pencapaian output perkara. Target sebesar 100% pada akhir tahun tercapai jika target sebanyak 2 (dua) perkara dapat diselesaikan seluruhnya sampai dengan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada pihak kejaksaan).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan selama triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Ketidaksesuaian antara perencanaan target RAPK dengan perkembangan realisasi penanganan perkara	Direkomendasikan untuk melakukan penyesuaian target RAPK untuk IKU ini	Mengusulkan revisi target RAPK sesuai dengan realisasi dan penyesuaian target RO penyidikan	Agustus 2026	T		

Capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 151.52% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh terselesaikannya penanganan 2 (dua) perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II), sementara pada perencanaan awal target kinerja ditetapkan untuk penanganan 1 (satu) perkara.

Kendala yang teridentifikasi bukan berupa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan, melainkan adanya perbedaan antara target yang ditetapkan dalam RAPK dengan perkembangan dan realisasi penanganan perkara. Dalam proses penyidikan, 1 (satu) perkara berkembang menjadi 2 (dua) berkas perkara yang dipisah *(split)*, sehingga realisasi kinerja melebihi target awal yang telah ditetapkan dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara target RAPK, target RO penyidikan, dan realisasi kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja yang melebihi target, Balai Besar POM di Palangka Raya akan Mengusulkan penyesuaian atau revisi target RAPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat perubahan kondisi dan perkembangan penanganan perkara yang mempengaruhi target kinerja.

Efektivitas pelaksanaan RTL akan dimonitor melalui evaluasi berkala terhadap kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan perkembangan dan realisasi penanganan perkara. Monitoring dilakukan melalui pemantauan perkembangan setiap perkara, evaluasi terhadap potensi perubahan jumlah atau status perkara, serta peninjauan berkala terhadap kesesuaian target RAPK dan target RO penyidikan.

Efektivitas RTL dinilai berdasarkan semakin baiknya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, tersedianya informasi perkembangan perkara secara tepat waktu, serta terlaksananya penyesuaian target atau perencanaan apabila terjadi perubahan kondisi yang signifikan dalam proses penanganan perkara.

Before *RTL:*
Perencanaan target kinerja dalam RAPK ditetapkan berdasarkan proyeksi awal penanganan 1 (satu) perkara. Dalam perkembangannya, perkara tersebut mengalami pemisahan berkas perkara *(split)* menjadi 2 (dua) perkara, sehingga realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya potensi ketidaksesuaian antara target RAPK, target RO penyidikan, dan realisasi kinerja.

After *RTL:*
Dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penanganan perkara serta peningkatan koordinasi antara proses perencanaan dan pelaksanaan penyidikan. Setiap perubahan signifikan dalam perkembangan perkara akan diidentifikasi dan dianalisis lebih awal sebagai bahan evaluasi serta dasar pengusulan penyesuaian target RAPK dan target RO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja dapat ditingkatkan, tanpa mengurangi efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan penyidikan.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	81.876.610	87.444.220	106.80%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	2	2	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	188.000	0	0.00
2	Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	38.775.000	33.855.500	87.31
3	Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	0	0	N/A
4	Gelar Kasus dan Pelaporan	0	0	N/A
5	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan. Skenario Penindakan. dan Olah TKP	0	0	N/A
6	Operasi Penindakan	8.007.260	8.007.260	100.00
7	Penangkapan dan Penahanan	1.570.000	1.564.810	99.67
8	Pemberkasan	10.193.350	10.482.100	102.83
9	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	12.900.000	12.900.000	100.00
10	Gelar Perkara	0	489.600	N/A
11	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	3.000.000	3.000.000	100.00

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
12	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	3.213.000	5.013.000	156.02
13	Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	885.000	0	0.00
14	Pelaksanaan Wasmatlitrik	3.145.000	0	0.00
15	PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA. PROFESIONALISME. DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM TAHUN 2026 DI JAWA BARAT	0	12.131.950	N/A

6 Sasaran Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
c		d	e	f=e/f	g	h	i	j=d/i	k
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00	Baik	100	50,00	Perlu Upaya Keras
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**100,00**				

23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Sasaran Kegiatan Keenam yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif. Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penjejakan Digital adalah hasil kegiatan *patroli siber* dan *profiling* yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran obat dan makanan yang diperjualbelikan/didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT Badan POM; yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; dan
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Dihitung berdasarkan jumlah laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan:

1. Analisis penjejakan digital dihitung 12 (12 bulan);
2. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun);
3. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara perhitungan dan Formula Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%);
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%);
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Keterangan:

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun;
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25);
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	100.00	Baik

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar 50% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan II tahun 2026 sebesar 100% dengan kriteria “Baik”.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	50	50	100.00

Realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja triwulan I tahun 2026 sebesar 50%, maka tidak terdapat perbedaan karena mekanisme perhitungannya berdasarkan Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan BBPOM di Palangka Raya telah tepat waktu dengan capaian sebesar 100%.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100	50	50.00	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yaitu sebesar 100% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan II tahun 2026 sebesar 50% dengan kriteria “Perlu Upaya Keras”.

Indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan gambaran kepatuhan dan pemenuhan dari pelaporan yang menjadi kewajiban Balai sesuai deadline agar dapat dinilai maksimal. Target sebesar 100% pada akhir tahun akan tercapai jika target seluruh pelaporan telah disampaikan dengan persentase realisasi maksimal.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palangka Raya periode Triwulan II tahun 2026 dengan nilai capaian 100% dan kriteria Baik. Analisis pendukung penyebab capaian persentase keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Besar POM di Palangka Raya periode Triwulan II tahun 2026 dengan kategori Baik, antara lain:

1. Capaian Target Laporan Analisis Triwulan II tahun 2026, target penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditetapkan sebesar 50%. Target ini dihitung berdasarkan persentase ketepatan waktu pelaporan hasil Analisis Penelusuran Siber yang dilakukan selama periode April hingga Juni 2026. Ketepatan waktu pelaporan menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja dan efektivitas proses analisis siber yang dilaksanakan
2. Komitmen petugas dan dukungan pimpinan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kegiatan Analisis Penelusuran Siber (meliputi Patroli Siber dan Penjejakan Digital/Profiling Siber) berjalan dengan baik. Dukungan tersebut tercermin dalam arahan strategis, fasilitas sumber daya, yang secara signifikan berkontribusi terhadap kualitas dan ketuntasan laporan yang disusun tanpa melewati deadline yang ditetapkan.
3. Dukungan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI. Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan patroli siber dan profiling kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Palangka Raya berupa evaluasi rutin setiap bulan. Dukungan ini memperkuat tindak lanjut rekomendasi takedown terhadap konten ilegal melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Indonesian E Commerce Association (IdEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing, sehingga mempercepat proses penanganan pelanggaran di *platform* digital.

Pelaksanaan IKU Analisis Kejahatan Obat dan Makanan pada Triwulan II, telah berjalan dengan baik dan tidak menemukan kendala. Evaluasi berkala oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM terhadap pelaksanaan patroli siber di UPT semakin meningkatkan komitmen dan kinerja petugas pelaksana dalam mengemban fungsi siber. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Siber, BBPOM di Palangka Raya telah melaporkan kegiatan secara rutin dan tepat waktu. Namun demikian dalam penyampaian proses pelaporan siber yang menggunakan aplikasi https://inawebcrawler-siber.pom.go.id/login dari sisi pengguna masih terdapat kendala yaitu : master data produk ilegal/palsu/mengandung bahan berbahaya/TMS lainnya nama produk dan jenisnya terbatas, petugas pelaporan bisa mengusulkan

penambahan daftar produk melalui menu *product suggestion* akan tetapi proses *approval*-nya membutuhkan waktu sehingga hasil patroli siber yang sudah diperoleh tidak bisa segera dilaporkan saat itu.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	3.395.250	1.142.400	33.65%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6	6	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	290.250	1.142.400	393.59
2	VERIFIKASI DATA HASIL PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN	0	0	N/A

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
	OBAT DAN MAKANAN			
3	KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PENINDAKAN	3.105.000	0	0.00

Pencapaian indikator kinerja *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar* pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi output mencapai sebesar 100%.

Dari sisi anggaran terdapat realisasi dengan capaian sebesar 393.59% pada sub komponen PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN dari target. Sedangkan sub komponen KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PENINDAKAN pada Triwulan II belum terdapat realisasi dan akan ditargetkan pada Triwulan III.

7 Sasaran Kegiatan
Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran Kegiatan 7 yaitu Layanan Publik UPT yang Prima di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target Triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
25	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	N/A	N/A	N/A	4.97	N/A	N/A
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**N/A**				

24 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di instansi pemerintah merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Untuk memantau kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan BPOM dilaksanakan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Implementasi PEKPPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023, memiliki peran krusial sebagai bagian integral dari indikator kinerja bagi UPT BPOM dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur Kualitas dan Kinerja Pelayanan secara Objektif

Tujuan utama PEKPPP adalah untuk memperoleh gambaran riil mengenai sejauh mana BBPOM di Palangka Raya telah menjalankan fungsi Pelayanan Publik. Evaluasi ini mencakup enam aspek besar, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan. Dengan adanya alat ukur ini, kita dapat menentukan **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** yang akurat dan berbasis data (*evidence-based*).

2. Menjamin Standarisasi Pelayanan di Seluruh UPT

BPOM memiliki UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. PEKPPP bertujuan untuk memastikan adanya **standardisasi kualitas**. Masyarakat di daerah seperti Kalimantan Tengah berhak mendapatkan kualitas layanan, kecepatan, dan kepastian yang sama dengan masyarakat di kota besar. Evaluasi ini menjaga agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antar wilayah.

3. Menstimulasi Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Hasil dari PEKPPP memberikan potret kelemahan dan kekuatan kita. Tujuan intinya adalah untuk mendapatkan (1) Identifikasi Celah (*Gap Analysis*) yang bermanfaat untuk mengetahui di mana letak kekurangan kita, dan (2) Rekomendasi Strategis guna memberikan dasar bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan sarana, pelatihan SDM, atau simplifikasi regulasi.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Sebagai instansi pemerintah, kita bertanggung jawab kepada publik. PEKPPP memaksa setiap UPT untuk mendokumentasikan proses bisnisnya dan membuka akses informasi bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) bahwa BBPOM di Palangka Raya bekerja secara profesional, bersih, dan bebas dari maladministrasi.

5. Mendorong Budaya Inovasi Pelayanan

Dalam instrumen PEKPPP, aspek Inovasi memiliki bobot tersendiri. Tujuannya adalah memacu setiap UPT untuk tidak hanya bekerja sesuai standar minimal, tetapi juga menciptakan terobosan yang memudahkan pelaku usaha (UMKM) dalam mengurus izin edar atau mempermudah masyarakat dalam melaporkan temuan obat dan makanan berbahaya.

6. Integrasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara organisasional, implementasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kinerja individu dan unit dengan target organisasi besar. Nilai IPP yang dihasilkan dari PEKPPP menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat UPT, yang secara langsung berdampak pada penilaian kinerja organisasi BPOM secara nasional.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan kepada seluruh unit pelayanan publik di Lingkungan BPOM dan diukur berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Untuk seluruh UPT BPOM pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik dihitung melalui:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Berikut kategori untuk nilai Indeks yang didapat:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW 2 Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW 2 Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya dilakukan pada triwulan III tahun 2026 dengan target sebesar 4.97. Pada Triwulan II belum dilaksanakan PEKPPP Tahun 2026, sehingga pengukuran indikator belum dapat dilakukan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian TW 1 2026

Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	N/A	N/A
	Target TW 2 2026	**Realisasi TW 2 2026**	**Capaian TW 2 2026**
	N/A	N/A	N/A

Triwulan II tahun 2026 merupakan triwulan kedua pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2026. Pada dokumen tersebut, target indikator 4.97 ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2026, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.97	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya diperoleh setelah mengikuti PEKPPP Tahun 2026, sehingga capaian realisasi kinerja triwulan II terhadap target tahunan belum dapat diperoleh. Namun demikian, dengan pelaksanaan program pelayanan publik yang optimal dan berkesinambungan maka target tahun 2026 optimis dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam mengawal pelaksanaan Pelayanan Publik yang prima di BBPOM di Palangka Raya, strategi keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Untuk mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP), BBPOM di Palangka Raya melakukan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain :

   - Melakukan survei berkala, forum diskusi, atau kotak saran untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Memastikan pengguna layanan benar-benar telah mendapatkan pelayanan prima dan juga disediakan kanal untuk tempat menyampaikan pengaduan terhadap layanan yang diberikan.
   - Memanfaatkan data pengaduan sebagai sumber informasi berharga untuk mengidentifikasi area layanan yang perlu diperbaiki.

- Memahami dan menyediakan layanan publik bagi kelompok rentan/pelanggan prioritas
- Memberikan pelatihan yang relevan terkait keterampilan pelayanan, komunikasi, teknologi informasi, dan pemahaman peraturan perundang-undangan baik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan dan sosialisasi
- Menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik dalam memberikan pelayanan publik
- Mendorong nilai-nilai empati, responsivitas, profesionalisme, dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Penggunaan anggaran yang tepat dapat mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini dengan capaiannya belum mencapai 100% yang artinya anggaran pada indikator ini belum terserap sepenuhnya sesuai perencanaan. Hal tersebut dikarenakan terjadi kendala penyesuaian timeline dalam realisasi anggaran tersebut, sehingga penyerapan tertunda pada triwulan berikutnya.

3. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Upaya penyesuaian untuk mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) salah satunya dilakukan dengan melakukan permohonan pemasangan perangkat Smart Laura di Kabupaten Barito Timur guna mendekatkan layanan kepada masyarakat di kabupaten tersebut. Kini masyarakat tidak perlu menuju ke Kota Palangka Raya untuk mendapatkan layanan cukup dengan hadir pada MPP/Kantor DPMPTSP yang berada di masing-masing kabupaten tersebut. Melalui pengajuan pemasangan perangkat Smart Laura di Kabupaten Barito Timur nantinya, Smart Laura akan memenuhi 100% jangkauan kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

   Upaya penyesuaian untuk mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga dilakukan dengan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kalimantan Tengah guna menjamin pelayanan publik yang diberikan senantiasa mengutamakan hak asasi pelanggan yang berkunjung. Dimana hingga saat ini masih dalam proses penilaian dan hasilnya belum diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Layanan Publik pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Telah membuat publikasi hasil SKM Mandiri bulan April-Juni tahun 2026 pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya
- Telah memperhatikan kebijakan jam pelayanan/kerja bagi pelanggan dan aturan pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan
- Telah menerapkan aturan terkait penerapan 5S di di area layanan publik
- Telah melaksanakan sosialisasi terkait konsultasi dan pengaduan menggunakan SP4N LAPOR kepada masyarakat/publik
- Melaksanakan pelaporan layanan melalui www.simpellpk.pom.go.id
- Menyusun Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagai PPID Pelaksana BBPOM di Palangka Raya
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam mempersiapkan pemasangan Inovasi Tele Public Service SMART LAURA pada Kabupaten Barito Timur
- Melakukan tindaklanjut terhadap penyempurnaan sarana prasarana layanan publik terutama bagi kelompok rentan atas masukan yang telah diberikan saat *Open House*.

Atas capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya, untuk perbaikan kinerja pada triwulan II direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan
2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik
3. Mengembangkan Inovasi Layanan Publik
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya *frontliner* dan petugas *security* terkait sensitivitas terhadap pengguna layanan dari kelompok rentan
5. Menyempurnakan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan

5. Informasi kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Pemanfaatan informasi kinerja pada fungsi Informasi dan Komunikasi (Infokom) bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi pelaporan interim, melainkan sebuah instrumen strategis yang merefleksikan dan menggerakkan transformasi budaya kerja organisasi. Sepanjang Triwulan II, data capaian kinerja Infokom, baik yang terkait dengan efektivitas edukasi masyarakat, kecepatan respons pengaduan, maupun diseminasi informasi obat dan makanan telah menjadi cermin sekaligus katalis dalam mengubah pola pikir dan pola tindak pegawai.

Keterkaitan mendalam antara pemanfaatan informasi kinerja fungsi Infokom dengan internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK dapat dijabarkan melalui poin-poin strategis berikut:

1. Berorientasi Pelayanan: Menakar Responsivitas Melalui Data

Informasi kinerja Infokom, seperti indeks kepuasan masyarakat dan durasi waktu penyelesaian pemberian informasi/pengaduan, memberikan umpan balik langsung (*real-time feedback*) mengenai kualitas layanan instansi. Data ini memaksa organisasi untuk terus menggeser orientasi kerja dari yang bersifat prosedural kaku menjadi berbasis kebutuhan masyarakat *(citizen-centric*). Kesadaran terhadap angka capaian kinerja ini mendorong ASN untuk selalu proaktif, ramah, dan solutif demi menjaga serta meningkatkan standar pelayanan publik di Kalimantan Tengah.

2. Akuntabel: Membangun Integritas Berbasis Transparansi Data

Pemanfaatan informasi kinerja secara terbuka di internal organisasi menumbuhkan budaya tanggung jawab yang tinggi. Ketika capaian target triwulanan fungsi Infokom disajikan secara transparan, setiap elemen di dalam organisasi memahami kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan instansi. Hal ini memicu pergeseran budaya kerja di mana setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan (*data-driven decision making*), menghindari manipulasi, dan mengedepankan integritas dalam pemanfaatan sumber daya.

3. Kompeten & Adaptif: Memicu *Continuous Improvement* dan Kelincahan Strategis

Evaluasi terhadap informasi kinerja Triwulan II mendeteksi adanya dinamika perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Informasi ini menjadi dasar bagi ASN untuk terus meningkatkan kompetensi diri (belajar hal baru) guna menjawab tantangan tersebut. Secara organisasional, data kinerja ini mendorong budaya kerja yang Adaptif yaitu kemampuan memodifikasi strategi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) secara cepat dan tangkas (*agile*) agar tetap relevan dengan kebutuhan publik.

4. Harmonis & Kolaboratif: Mengikis Ego Sektoral Melalui Integrasi Informasi

Fungsi Infokom tidak dapat menghasilkan kinerja yang optimal tanpa adanya pasokan data teknis dari fungsi pengujian, pemeriksaan, maupun penindakan. Informasi kinerja Infokom yang tersaji di Triwulan II ini memperlihatkan interdependensi antarfungsi secara jelas. Kesadaran akan keterkaitan data ini membangun budaya kerja yang Harmonis dan Kolaboratif, di mana sekat-sekat ego sektoral terkikis dan digantikan oleh semangat gotong royong serta sinergi internal demi mencapai target makro BBPOM di Palangka Raya.

5. Loyal: Menjaga Reputasi Institusi di Ruang Publik

Kinerja Infokom dalam mengelola sentimen publik dan menangkal hoaks terkait obat dan makanan merupakan wujud nyata dari nilai Loyal. Pemanfaatan informasi kinerja di area ini memastikan bahwa seluruh pegawai bergerak selaras untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan institusi. Data performa komunikasi publik menjadi jangkar pengingat bagi organisasi untuk tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menyebarkan informasi yang mengedukasi dan menenteramkan masyarakat.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,863,000	680,000	17.60%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW 2 tahun 2026	Target Output TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Output
BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	226	291	128.76%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran

1	PEMBERIAN/PECABUTAN SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI/DISTRIBUSI/PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN	3,863,000	680,000	17.60
2	LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	0	0	N/A
3	BLOKIR - LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	0	0	N/A

8 Sasaran Kegiatan

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Kegiatan 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan 2 tahun 2026	Perbandingan terhadap target triwulan 2				Perbandingan terhadap target Tahunan		
			Target	Capaian	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian	Target	Capaian	Kategori Capaian
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.9	-	N/A	N/A	N/A	89.15	101.96	▲ Melampaui
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	N/A	N/A	N/A	81.2	N/A	N/A
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	N/A	N/A	N/A	2.95	N/A	N/A
Capaian Sasaran Kegiatan = Rata-rata Normalisasi Capaian per IKU					**N/A**				

25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik. efektif. dan efisien. sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat. tepat. dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi. Kolusi. dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan dan menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17.5 %

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW 2 Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW 2 Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	90.90	N/A	N/A	N/A

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dilakukan secara periodik tahunan melalui mekanisme penilaian formal oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI). Penilaian tersebut didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Meskipun target antara (interim) untuk Triwulan II ini tidak ditetapkan karena target kinerja indikator ini secara definitif melekat pada target akumulatif di akhir tahun anggaran. BBPOM di Palangka Raya telah berhasil memperoleh nilai total hasil evaluasi PMPZI oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) sebesar 90.90.

Mengingat belum adanya formula pembanding target triwulanan yang resmi pada periode ini. persentase capaian kinerja kumulatif terhadap target serta status kategorisasi formal belum dapat dikalkulasikan secara proporsional. Namun demikian. capaian realisasi sebesar 90.90 ini menjadi indikasi kuat bahwa progres pembangunan Zona Integritas berjalan sangat positif dan berada pada jalur yang tepat (*on-track*) menuju target akhir tahun yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian TW 1 2026
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	N/A	N/A
	Target TW 2 2026	**Realisasi TW 2 2026**	**Capaian TW 2 2026**
	N/A	90.90	N/A

Capaian kinerja Triwulan II pada tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I. Hal ini dikarenakan pada awal tahun anggaran. fokus kinerja masih berada pada tahap pemenuhan dokumen administratif. penyusunan rencana aksi. serta pembentukan Pokja Pembangunan Zona Integritas. Pada periode tersebut. belum dilaksanakan desk evaluation maupun penilaian mandiri formal. sehingga belum ada angka realisasi berbasis data dukung yang dapat dikeluarkan.

Memasuki Triwulan II 2026. terjadi perkembangan progresif yang sangat signifikan. Melalui pelaksanaan penilaian mandiri oleh tim Auditor Internal serta evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (LKE PMPZI) yang dilakukanoleh Inspektorat utama selaku Tim Penilai Internal (TPI). instansi berhasil mencatatkan nilai realisasi riil sebesar 90.90. Kehadiran angka realisasi ini menunjukkan lompatan kinerja yang terukur dari Triwulan I (yang sebelumnya belum terpetakan/N/A) menuju Triwulan II.

Meskipun realisasi pada Triwulan II telah mencapai angka 90.90. persentase Capaian Kinerja untuk kedua triwulan ini tidak dapat dinyatakan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator Nilai Pembangunan ZI yang penargetannya bersifat tahunan (akumulatif di akhir tahun) tanpa adanya pembagian target per triwulan. Akibat ketiadaan target pembagi antara (*interim target*) tersebut. formula persentase capaian kinerja kumulatif belum dapat disajikan secara administratif pada laporan triwulanan ini.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89.15	90.90	101.96	▲ Melampaui

Target tahunan yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar 89.15. Berdasarkan hasil pengukuran interim pada Triwulan II 2026. realisasi nilai yang berhasil dicapai telah menyentuh angka 90.90. Melalui perbandingan rasio tersebut. persentase Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2026 mencatatkan angka 101.96%. Dengan demikian. status evaluasi indikator ini pada pertengahan tahun berjalan secara formal masuk ke dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Keberhasilan melampaui target tahunan lebih awal pada Triwulan II ini didorong oleh komitmen akselerasi seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas. Melalui capaian positif ini. BBPOM di Palangka Raya optimistis dapat menjaga tren performa terbaik demi mengamankan serta mengokohkan predikat Zona Integritas yang akuntabel hingga akhir tahun anggaran berjalan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2025 dan 2026 pada Balai Besar POM di Palangka Raya sebagaimana berikut :

PENILAIAN				Tahun 2025			Tahun 2026		
				Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
A.	Komponen Pengungkit								
	I.	Manajemen Perubahan		3.43	3.91	7.34	3.43	4.00	7.43
	II.	Penataan Tatalaksana		2.81	2.50	5.31	2.43	2.83	5.26
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM		4.38	4.25	8.63	4.52	3.00	7.52
	IV.	Penguatan Akuntabilitas		4.01	4.60	8.61	4.84	4.26	9.10
	V.	Penguatan Pengawasan		5.57	7.50	13.07	6.29	7.50	13.79
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		4.81	3.76	8.57	4.68	4.58	9.26
TOTAL PENGUNGKIT						51.53			52.36
B.	Komponen Hasil								
	I	Birokrasi Bersih dan Akuntabel				19.69			21.25
		1	Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)			17.19			17.5
		2	Capaian Kinerja lebih baik			2.5			3.75
	II	Pelayanan Publik yang Prima				16.98			17.28
		Nilai Survei Persepsi Kualitas				16.98			17.28
TOTAL HASIL						36.67			38.53
NILAI PMPZI						88.20			90.90

Secara keseluruhan. total nilai capaian Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada tahun 2026 mengalami **kenaikan** dibandingkan tahun 2025. Total nilai tertimbang meningkat dari **88.20** pada tahun 2025 menjadi **90.90** pada tahun 2026 (terdapat kenaikan sebesar **+2.70** poin). Kenaikan ini didorong oleh penguatan yang signifikan pada aspek pemenuhan serta optimalisasi beberapa area pemenuhan dan reform.

Analisis kausalitas terhadap aspek yang mengalami peningkatan mencatatkan tren sangat positif pada beberapa area perubahan utama. dengan lonjakan tertinggi diraih oleh Area Penguatan Pengawasan sebesar +0.72 poin (menjadi 13.79) berkat lompatan nilai pemenuhan melalui optimalisasi SPIP dan Whistleblowing System (WBS). Pertumbuhan signifikan juga diikuti oleh Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (+0.69 poin) dari inovasi layanan dan simplifikasi birokrasi serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja (+0.49%) yang didorong kualitas draf SAKIP. Sementara itu. Area Manajemen Perubahan terus mempertahankan kinerja sangat baik (+0.09%) dengan nilai *reform* sempurna (4.00) berkat internalisasi budaya kerja dan peran pimpinan sebagai *role model* yang kuat.

Sebaliknya. penurunan indeks kinerja teridentifikasi pada Area Penataan Tata Laksana yang mengalami koreksi minor sebesar -0.05 poin sehingga nilainya menjadi 5.26. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kritis berdasarkan hasil evaluasi TPI. di antaranya belum seluruh SOP dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan organisasi. Selain itu. meskipun penggunaan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja telah diimplementasikan melalui inovasi. pemanfaatannya masih terbatas sebagai media pengumpulan informasi realisasi kinerja. Instansi juga tercatat telah melakukan monev atas

pemanfaatan teknologi informasi tersebut. namun belum ditindaklanjuti dengan analisis dampak yang mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi secara menyeluruh.

Catatan evaluasi paling krusial terjadi pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM yang mengalami kemerosotan signifikan sebesar -1.11 poin. sehingga nilainya menyusut menjadi 7.52. Walaupun indikator pemenuhan administratifnya mengalami kenaikan. penurunan tajam pada aspek *reform* (dari 4.25 menjadi 3.00) mengindikasikan adanya kendala esensial dalam implementasi nyata di lapangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. di mana hasil evaluasi TPI secara spesifik menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) terhadap hasil pengembangan kompetensi belum dikaitkan secara optimal dengan perbaikan kinerja organisasi. serta masih terdapat pegawai yang tidak memenuhi aturan disiplin maupun penegakan hukuman disiplin pegawai yang belum berjalan maksimal.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif. namun tetap terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja. hal tersebut telah diidentifikasi sebagai kendala/permasalahan dalam laporan kinerja tahun 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I th 2026			sd .Triwulan II tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Kompilasi inovasi yang telah diimplemantasikan sejak tahun 2022 yang tidak lengkap monev dan pelaporan	Menetapkan PIC untuk seluruh inovasi agar implementasi dan pelaporan terjaga	Membuat SK perumusan inovasi beserta PIC penanggung jawab implementasi serta monev pelaporan	Telah dibuatkan SK Kepala BBPOm di Palangka Raya nomor OT.01.03.16A.01.26.54 tahun 2026. tentang Penetapan Inovasi Unit Kerja dan Matriks Keterlibatan Pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BBPOm di Palangka Raya	Selesai
2	Inovasi masih dalam tahap pengembangan	membuat SK inovasi agar jelas road map inovasi	monitoring evaluasi terhadap penyusunan SK inovasi makro	Telah dibuatkan SK masing-masing inovasi makro yang didalamnya telah memuat roadmap inovasi serta pelaporan inovasi oleh tim AOC	Selesai
3	Renja yang terlalu detail pada butir rencana aksi menyulitkan dalam pengisian tabel monev yang diinginkan	penyederhanaan monev Renja agar mudah dilakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang belum terlaksana	monitoring evaluasi rencana aksi yang belum terlaksana di TW 1 dan di jabarkan dalam laporan monev renja	Telah menyusun Renja TW 2 yang disertai dengan RATL TW I yang belum terlaksana	Selesai

Evaluasi tindak lanjut tidak hanya difokuskan pada status penyelesaian rekomendasi. tetapi juga pada efektivitasnya dalam menyelesaikan akar penyebab permasalahan. Oleh karena itu. dilakukan analisis kondisi sebelum dan sesudah untuk menilai perubahan yang dicapai setelah implementasi rencana tindak lanjut. Hasil pengukuran efektivitas tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindak lanjut telah memadai atau masih diperlukan rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) seperti pada tabel berikut:

No	RATL tahun 2025 s/d Triwulan I th 2026		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Kompilasi inovasi yang telah diimplemantasikan sejak tahun 2022 yang tidak lengkap monev dan pelaporan	Membuat SK perumusan inovasi beserta PIC penanggung jawab implementasi serta monev pelaporan	Tidak ada monitoring siklus hidup suatu inovasi mulai dari lahir. monitoring evaluasi implementasi. dan kemanfaatan inovasi tersebut	Inovasi terkendali dan termonitor secara baik	Efektif
2	Inovasi masih dalam tahap pengembangan	monitoring evaluasi terhadap penyusunan SK inovasi makro	SK inovasi kurang komprehensif. sehingga tidak terpantau/terlaporkan implementasinya	Penyeragaman *template* SK inovasi sehingga terlihat konektifitas antar inovasi serta terlaporkannya inovasi secara teratur	Efektif
3	Renja yang terlalu detail pada butir rencana aksi menyulitkan dalam pengisian tabel monev yang diinginkan	monitoring evaluasi rencana aksi yang belum terlaksana di TW 1 dan di jabarkan dalam laporan monev renja	tidak terdapat kendala/hambatan yang dihadapi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk rencana kerja yang belum terlaksana.	Laporan monev renja yang terintegrasi dan berkesinambungan	Efektif

Kinerja pada indikator Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Palangka Raya telah berhasil memperoleh realisasi dari hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) sebesar 90.90. Berikut beberapa faktor yang dapat menunjang kinerja pada indikator ini. antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan tim penggerak sangat kuat.dengan terbentuknya struktur tim kerja sesuai dengan penempatan tugas fungsi teknisnya dan pengalaman penugasan sebelumnya untuk memperkaya kinerja setiap kim kerja serta mendorong partisipasi setiap pegawai dalam pembangunan Zona Integritas serta draf rencana aksi prioritas pembangunan ZI juga telah berhasil ditetapkan pada pengembangan inovasi.

2. Inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang efisiensi pengukuran kinerja internal telah berjalan secara konsisten dimana pelaksanaan kinerja yang mendukung indikator kinerja utama dan pelaporan hasil kinerja yang tertelusur dan valid sejalan dengan nilai Capaian Kinerja Lebih Baik dari tahun sebelumnya pada indikator yang sama.
3. *Levelling up* peran AoC dari yang awalnya sebagai penanggung jawab rencana aksi yang *scope*nya kecil. kurang prospektif dan sulit dievaluasi menjadi pengawal inovasi-inovasi unggulan unit kerja yang *scope*nya besar. potensi untuk dikembangkan serta dapat dimonitoring evaluasi implementasi dan dampaknya.
4. Pembenahan siklus dan manajemen Inovasi yang dikelola oleh BBPOM di Palangka Raya melalui integrasi dalam inovasi besar unit kerja : Batang Garing. yang menjamin pengawalan implementasi sampai dengan monitoring evaluasi serta pelaporan inovasi yang komprehensif.
5. Internalisasi dan *public campaign* terkait gratifikasi secara rutin dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial dan *voice over* dalam bentuk lagu bertema Anti Korupsi. Gratifikasi dan Anti Penyuapan serta lagu bertema *Core Values* BerAKHLAK secara berkala.

Selain faktor-faktor diatas yang mendukung tercapainya kinerja. tetap ada kemungkinan yang dapat menghambat kinerja sesuai dengan risiko yang telah dievaluasi yaitu:

1. Belum seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dievaluasi dan diperbaharui sesuai kebutuhan organisasi.
2. Dari sisi digitalisasi. teknologi informasi yang dibangun masih sebatas media pengumpul informasi realisasi kinerja. serta monev pemanfaatan IT yang dilakukan belum disertai dengan analisis dampak (*impact analysis*) yang nyata terhadap organisasi.
3. Belum ada keterkaitan antara pelaksanaan monev hasil pengembangan kompetensi pegawai dengan peningkatan/perbaikan kinerja organisasi secara riil.
4. Faktor internal lainnya adalah masih ditemukannya pegawai yang tidak mematuhi aturan disiplin. serta penegakan hukuman disiplin yang belum berjalan optimal.
5. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) baru menjangkau sebagian pihak terkait.
6. Laporan monev WBS belum menginformasikan tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya. dan laporan penanganan benturan kepentingan triwulanan belum dilengkapi bukti implementasi fisik (dokumentasi) yang memadai.
7. Reviu standar pelayanan dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
8. Kebijakan *reward & punishment* bagi petugas pelayanan belum diterapkan secara konsisten. Selain itu. kebijakan pemberian kompensasi layanan belum sempurna karena justru memuat klausul hukuman (*punishment*) bagi penerima layanan.
9. Inovasi pelayanan yang dibangun belum diukur dampaknya secara komprehensif bagi masyarakat.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja. target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	1.733.799.652	1.592.403.348	91.84%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran. namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW 2 tahun 2026	Realisasi Output TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Output
*BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT**	*50%*	*50%*	100.00%
*EBA.956 Layanan BMN**	*49.98%*	*49.98%*	100.00%
*EBA.994 Layanan Perkantoran**	*49.98%*	*49.98%*	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja. berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja. maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGELOLAAN ARSIP	4.500.000	0	0.00
2	PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN	21.192.860	22.352.860	105.47

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
	TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT			
3	PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	3.000.000	3.000.000	100.00
4	PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN UNIT DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	15.159.100	14.778.318	97.49
5	PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	10.040.000	7.562.000	75.32
6	Penatausahaan BMN	2.250.000	1.852.300	82.32
7	PENGADAAN JASA OUTSOURCING	791.232.682	791.225.314	100.00
8	LANGGANAN DAYA DAN JASA	269.429.683	247.238.549	91.76
9	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	158.187.050	123.145.850	77.85
10	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	31.026.000	22.382.850	72.14
11	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG	35.389.600	19.702.440	55.67
12	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	73.337.224	43.112.605	58.79
13	JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT	532.000	383.000	71.99
14	KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	89.489.353	77.335.612	86.42
15	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	56.440.000	45.737.550	81.04
16	PEMERIKSAAN RISIKO KESEHATAN	138.632.000	138.632.000	100.00
17	PEMUSNAHAN BMN	0	0	N/A
18	OPERASIONAL PIMPINAN	33.962.100	33.962.100	100.00

26 Nilai AKIP UPT BPOM

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BBPOM di Palangka Raya merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain **Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang** Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instrumen strategis, penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel, serta memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. SAKIP merupakan suatu rangkaian sistematis yang mencakup berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pelaporan kinerja. Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkesinambungan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya kepada masyarakat Kalimantan Tengah.

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM Tahun 2026 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpedoman pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan penilaian SAKIP mengacu pada Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.04.7.08.25.03 Tahun 2025 tentang Subkriteria Lembar Kerja Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi terhadap implementasi SAKIP di lingkungan BBPOM di Palangka Raya dilakukan melalui penilaian terhadap komponen utama SAKIP yang mencerminkan siklus manajemen kinerja secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil (outcome). Secara umum, komponen penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

Penilaian AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2026 dilaksanakan pada triwulan III oleh Inspektorat Utama menggunakan Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang dinilai secara mandiri oleh Satuan Kerja dengan pembobotan penilaian per sub komponen sebagai berikut:

Komponen	Sub Komponen			
	1 Keberadaan (20%)	2 Kualitas (30%)	3 Pemanfaatan (50%)	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	4.8	7.2	12	24
Pengukuran Kinerja	4.8	7.2	12	24
Pelaporan Kinerja	2.4	3.6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pengukuran indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan terhadap seluruh rangkaian implementasi SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya. Penilaian AKIP dilaksanakan secara tahunan oleh Inspektorat Utama BPOM, dengan proses evaluasi pada triwulan III dan hasil penilaian diterbitkan pada akhir tahun. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), target sampai dengan triwulan II ditetapkan sebesar 0, sehingga pengukuran capaian belum dilakukan pada periode tersebut.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian TW 1 2026
Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	N/A	N/A
	Target TW 2 2026	**Realisasi TW 2 2026**	**Capaian TW 2 2026**
	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai AKIP merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal, bersama dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai Kinerja Anggaran, dan Nilai Maturitas Risiko sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025–2029. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), penilaian SAKIP dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada triwulan I dan triwulan II belum dilakukan pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	81.2	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai AKIP merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal, bersama dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai Kinerja Anggaran, dan Nilai Maturitas Risiko sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025–2029. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), penilaian SAKIP dilakukan pada akhir tahun, sehingga sampai pada triwulan II belum dilakukan pengukuran.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi capaian Nilai AKIP tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya belum berhasil mencapai target dan terdapat penurunan nilai dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan nilai tersebut sebagaimana tabel berikut:

Komponen	Bobot	Nilai		
		2024	2025	Gap
Perencanaan Kinerja	24	20.16	20.16	0
Pengukuran Kinerja	24	18.96	18.96	+1.2
Pelaporan Kinerja	12	9.72	10.08	+0.36
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15.80	16.80	+1
Capaian Kinerja	20	18.73	13.61	-5.12
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	83.37	80.81	-2.56

Berdasarkan hasil penilaian, capaian kinerja outcome yang lebih baik dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 62.07% serta terdapat 23.53% IKU yang tidak mencapai target. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan penyesuaian perencanaan target indikator Nilai AKIP tahun 2026. Pada dokumen Renstra 2025-2029 dan dokumen RKT 2026 target semula ditetapkan sebesar 84.37 kemudian disesuaikan menjadi 81.2 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang ditetapkan pada 26 Februari 2026.

Kegagalan pencapaian kinerja tersebut, telah diidentifikasi sebagai kendala/permasalahan dalam laporan kinerja tahun 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	Lakip tahunan tahun 2025			sd .Triwulan II tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Tata kelola dokumen kinerja masih lemah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penyusunan SK TIM SAKIP, serta mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk menjamin keselarasan dokumen, konsistensi nomenklatur IKU, dan ketepatan target kinerja di seluruh instrumen perencanaan.	Menyusun dan memperbarui SK Penetapan IKU serta SK Tim SAKIP dengan pembagian penugasan yang spesifik untuk melakukan verifikasi data guna memastikan keselarasan seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), konsistensi nomenklatur, serta ketepatan target di seluruh	Telah ditunjuk PIC Verifikator data dalam SK Tim SAKIP tahun 2026 dengan tugas melakukan reviu kesesuaian narasi dan data pada dokumen kinerja dan pelaporan kinerja dengan output kertas kerja evaluasi perbandingan data	Selesai

No	Lakip tahunan tahun 2025			sd .Triwulan II tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
			dokumen perencanaan.		
2	Pengisian data tersebut belum dilakukan secara tertib dan konsisten setiap bulan, khususnya dalam pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, termasuk pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, dan memanfaatkan aplikasi untuk pelaporan dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL pada Aplikasi Simetris	Telah input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal serta akan dimonitoring setiap bulan	Dalam Proses
3	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum konsisten. Pelaksanaan evaluasi internal belum memadai, analisa data belum berbasis perbaikan kinerja	Menyajikan pembahasan pemanfaatan informasi kinerja dalam lakip dan menerapkan siklus evaluasi berbasis PDCA	Menyajikan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan evaluasi internal dan lapkin	Telah menyelesaikan laporan kinerja interim I, berproses untuk laporan kinerja interim II	Dalam Proses
4	Laporan Kinerja Interim belum seluruhnya menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya dan belum terlihat adanya kondisi sebelum dan sesudah adanya rencana aksi	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan) dengan menyajikan hasil monitoring rencana aksi yang selaras antar periode (termasuk status penyelesaian dan perbandingan kondisi before-after), serta menyusun analisis mendalam mengenai pencapaian terhadap target akhir Renstra dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi	Menggunakan aplikasi untuk pelaporan RTL dari ketua tim untuk pemantauan dan pelaporan RTL laporan kinerja interim dan tahunan agar konsisten dan termonitoring secara berkala	Sosialisasi penggunaan Aplikasi Matriks Analisis, Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Progres RTL telah dilaksanakan pada bulan April dan telah mulai diimplementasikan dalam pelaporan kinerja Triwulan 1 tahun 2026	Selesai

Evaluasi tindak lanjut tidak hanya difokuskan pada status penyelesaian rekomendasi, tetapi juga pada efektivitasnya dalam menyelesaikan akar penyebab permasalahan Oleh karena itu, dilakukan analisis kondisi sebelum dan sesudah untuk menilai perubahan yang dicapai setelah implementasi rencana tindak lanjut. Hasil pengukuran efektivitas tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindak lanjut telah memadai atau masih diperlukan rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) seperti pada tabel berikut:

No	Lakip tahunan tahun 2025		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Tata kelola dokumen kinerja masih lemah	Menyusun dan memperbarui SK Penetapan IKU serta SK Tim SAKIP dengan pembagian penugasan yang spesifik untuk melakukan verifikasi data guna memastikan keselarasan seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), konsistensi nomenklatur, serta ketepatan target di seluruh dokumen perencanaan.	Dokumen kinerja terdapat perbedaan narasi dan data antar dokumen	Telah dilakukan reviu silang Penunjukan PIC verifikator Terdapat kertas kerja perbandingan dokumen	Efektif
2	Pengisian data tersebut belum dilakukan secara tertib dan konsisten setiap bulan, khususnya dalam pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, dan memanfaatkan aplikasi untuk pelaporan dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL pada Aplikasi Simetris	Validasi data belum baku, rekonsiliasi data belum terjadwal, data masih berubah menjelang pelaporan (perbedaan perhitungan otomatis by system antara aplikasi e performance dengan excel/spreadsheet)	Validator data telah ditetapkan, penetapan batas waktu pelaporan, pengendalian perubahan data	Cukup efektif
3	Monitoring dan evaluasi capaian	Menyajikan pemanfaatan	Monitoring RTL belum mengukur	Matriks RTL telah disusun,	Belum efektif

No	Lakip tahunan tahun 2025		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
	kinerja belum konsisten. Pelaksanaan evaluasi internal belum memadai, analisa data belum berbasis perbaikan kinerja	informasi kinerja pada laporan evaluasi internal dan lapkin	efektivitas penyelesaian, analisis evaluasi belum menunjukkan perubahan kinerja sebelum dan sesudah RTL	analisis kondisi sebelum dan sesudah mulai dimanfaatkan namun belum dilakukan pemantauan efektivitas RTL	
4	Laporan Kinerja Interim belum seluruhnya menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya dan belum terlihat adanya kondisi sebelum dan sesudah adanya rencana aksi	Menggunakan aplikasi untuk pelaporan RTL dari ketua tim untuk pemantauan dan pelaporan RTL laporan kinerja interim dan tahunan agar konsisten dan termonitoring secara berkala	Informasi hasil evaluasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan.	Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam laporan evaluasi internal dan menjadi salah satu bahan penyusunan/ perbaikan perencanaan	Efektif

Terhadap kendala berupa monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang belum konsisten, pelaksanaan evaluasi internal yang belum memadai, serta analisis data yang belum berorientasi pada perbaikan kinerja, telah dilakukan rencana tindak lanjut berupa penyajian pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan evaluasi internal dan Laporan Kinerja (Lapkin). Berdasarkan hasil evaluasi, rencana tindak lanjut tersebut belum efektif karena pelaksanaannya masih berfokus pada penyelesaian administratif dan belum mengukur dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menetapkan indikator efektivitas rencana tindak lanjut, mengukur dampak implementasinya terhadap capaian kinerja, serta mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam Peta Kendali Risiko dan penyusunan rencana kerja pada periode berikutnya. .

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.04.71.7.01.26.57 tanggal 27 Januari 2026, terhadap implementasi AKIP yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi mandiri, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan, direkomendasikan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	LHE AKIP 2025		sd. Triwulan II Tahun 2026		
	Komponen	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
1	Perencanaan	a. Menyusun SK	Menyusun dan	Telah disusun SK	Selesai

No	LHE AKIP 2025		sd. Triwulan II Tahun 2026		
	Komponen	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
	Kinerja	Penetapan IKU yang menyajikan seluruh IKSP/ IKSKP/ IKU pada Perjanjian Kinerja (PK)	memperbarui SK Penetapan IKU serta SK Tim SAKIP dengan pembagian penugasan yang spesifik untuk melakukan verifikasi data guna memastikan keselarasan seluruh indikator kinerja (IKSP/IKSK/IKU) pada Perjanjian Kinerja (PK), konsistensi nomenklatur, serta ketepatan target di seluruh dokumen perencanaan.	Penetapan IKU tahun 2026 dengan nomor HK.02.02.16A.02.26.70 tanggal 26 Februari 2026 dan SK tim SAKIP 2026 dengan nomor HK.02.02.16A.03.26.72 yang telah menambahkan PIC sebagai verifikator data yang bertugas memastikan keselarasan narasi dan data yang dituangkan dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan	
		b. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: - Keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; - Tidak adanya perbedaan nomenklatur antara beberapa IKU - Tidak adanya perbedaan target kinerja			
2	Pengukuran Kinerja	5. Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, termasuk pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, dan memanfaatkan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL pada Aplikasi Simetris	Telah dilakukan pembaharuan data pada aplikasi SIMETRIS dan sudah diimplementasikan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim yang digunakan untuk memonitoring RLT dan Pelaporannya tindak lanjutnya	Berprogres sampai akhir tahun 2026
3	Pelaporan Kinerja	6. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun	Pembagian tugas anggota tim SAKIP untuk melaksanakan reviu berjenjang (Anggota 1 direviu Anggota 2 dikompilasi pic Anggota 4)	Ditetapkan SK tim SAKIP 2026 dengan nomor HK.02.02.16A.03.26.72 tanggal 26 februari 2026 yang telah dicantumkan pembagian tugas reviu berjenjang (Anggota 1 direviu Anggota 2 dikompilasi pic Anggota 4)	Selesai

No	LHE AKIP 2025		sd. Triwulan II Tahun 2026		
	Komponen	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
		pelaporan kinerja			
		7. Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/ rencana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai)	Menggunakan aplikasi untuk pelaporan RTL dari ketua tim untuk pemantauan dan pelaporan RTL laporan kinerja interim dan tahunan agar konsisten dan termonitoring secara berkala	Pada triwulan 1 sudah diimplementasikan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim yang digunakan untuk memonitoring RLT dan Pelaporannya tindak lanjutnya	Berprogres sampai akhir tahun 2026
		8. Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan pemanfaatan informasi yang dikaitkan dengan capaian IKU sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Menyajikan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan evaluasi internal dan lapkin	Pada Laporan Kinerja Tahunan telah dituangkan dalam Bab 3.3 Pemanfaatan Informasi kinerja untuk laporan kinerja interim dalam proses	Berprogres sampai akhir tahun 2026
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5. Melengkapi penyusunan LEI dengan mencantumkan evaluasi terhadap RAPK secara lengkap, meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, program/ kegiatan, rencana aksi, target dan realisasi kinerja serta anggaran bulanan beserta	Melakukan reviu kesesuain format laporan evaluasi internal terhadap pedoman sakip terbaru dan kesesuaian analisis didalamnya	Laporan Evaluasi Internal triwulan 1 telah disusun sesuai pedoman SAKIP terbaru	Selesai

No	LHE AKIP 2025		sd. Triwulan II Tahun 2026		
	Komponen	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
		kertas kerja pendukungnya			
		6. Melakukan reviu berjenjang dalam rangka memastikan kesesuaian angka capaian pada LEI dan Lapkin Interim dengan data pada Aplikasi SIMETRIS (menu e-Performance) sebelum batas input tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, untuk menghindari perbedaan data kinerja antar dokumen	Penetapan PIC verifikator data pada tim SAKIP dengan penugasan melakukan verifikasi data yang dilaporkan	Dalam SK tim SAKIP 2026 dengan nomor HK.02.02.16A.03.26.72 yang telah menambahkan PIC sebagai verifikator data yang bertugas memastikan keselarasan narasi dan data yang dituangkan dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan	Selesai
		7. Melaksanakan pemantauan RTL atas IKU yang tidak mencapai target secara berkala, dengan membuat tabel tindak lanjut berisi status pelaksanaan, hasil/ efektivitas RTL, serta rekomendasi lanjutan jika RTL dinilai tidak lagi relevan	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, dan memanfaatkan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL pada Aplikasi Simetris	Telah dilakukan pembaharuan data pada aplikasi SIMETRIS dan sudah diimplementasikan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim yang digunakan untuk memonitoring RLT dan Pelaporannya tindak lanjutnya	Berprogres sampai akhir tahun 2026
		8. Melakukan reviu berjenjang dalam rangka memastikan kesesuaian penyajian data kendala, hambatan dan RTL di Aplikasi SIMETRIS dengan yang tercantum pada LEI, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja tahunan, melalui reviu	• Menggunakan aplikasi untuk pelaporan RTL dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL laporan kinerja interim dan tahunan • Penetapan PIC verifikator data pada tim SAKIP dengan penugasan melakukan	Telah dilakukan pembaharuan data pada aplikasi SIMETRIS dan sudah diimplementasikan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim yang digunakan untuk memonitoring RLT dan Pelaporannya tindak lanjutnya dan dalam SK tim SAKIP 2026 dengan nomor HK.02.02.16A.03.26.72 yang telah menambahkan PIC sebagai verifikator data	Berprogres sampai akhir tahun 2026

No	LHE AKIP 2025		sd. Triwulan II Tahun 2026		
	Komponen	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
		silang antar dokumen sebelum penyelesaian laporan	verifikasi data yang dilaporkan	yang bertugas memastikan keselarasan narasi dan data yang dituangkan dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan	
5	Capaian Kinerja	Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja	Monitoring realisasi indikator kinerja setiap bulan dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dan target tahun mendatang	Dalam laporan Capaian RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja telah dilakukan perbandingan antara capaian kinerja setiap bulan dengan target tahunannya	Berprogres sampai akhir tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian, capaian kinerja outcome yang lebih baik dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 62.07% serta terdapat 23.53% IKU yang tidak mencapai target yang tercantum pada LHE SAKIP tahun 2025, telah diidentifikasi risiko indikator Nilai AKIP yang dilakukan pada semester 1 tahun 2026, sebagai berikut :

No	Sumber risiko	Risk event	Aktivitas pengendalian			Evaluasi keberlanjutan	
			Kode risiko	Aktivitas	Efektivitas		Justifikasi
1	Risk register semester 1 tahun 2026 dan dialog kinerja MPH 2026	capaian kinerja organisasi menurun dibandingkan tahun sebelumnya	S08-02.01	- menyusun rencana aksi, target, dan strategi pencapaian indikator kinerja - monitoring dan evaluasi berkala capaian IKU terjaga dalam rentang 100%-110%. dan evaluasi efektivitas rencana aksi tindak lanjut untuk IKU dengan capaian diatas 110% dan dibawah 100%	Efektif	Ya	• Masih relevan dengan kegagalan pencapaian indikator kinerja tahun 2025
2	Risk	Ketidakkonsistenan	S08-	Rekonsiliasi	Efektif	Ya	• Masih relevan

No	Sumber risiko	Risk event	Aktivitas pengendalian			Evaluasi keberlanjutan	
			Kode risiko	Aktivitas	Efektivitas		Justifikasi
	register semester 1 tahun 2026 dan dialog kinerja MPH 2026	data kinerja antar sistem dan dokumen pelaporan(SIMETRIS, LEI dan Laporan Kinerja)i	02.02	bulanan kesesuaian data			dengan adanya realisasi indikator kinerja yang melebihi target akhir jangka menengah dan tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 terhadap lima komponen utama, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja, masih terdapat kelemahan yang berdampak pada belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja. Kelemahan tersebut terletak pada belum efektifnya monitoring realisasi kinerja serta evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya, sehingga pengendalian risiko yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja belum berjalan optimal. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan target kinerja dan penyajiannya dalam laporan yang berimplikasi pada kurang akuratnya pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP serta memastikan pencapaian indikator kinerja yang lebih optimal, diperlukan penguatan pengendalian risiko melalui perbaikan pada aspek monitoring dan evaluasi kinerja, sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring realisasi kinerja berbasis tren secara berkala setiap bulan dengan membandingkan capaian tahun berjalan, realisasi tahun sebelumnya serta target tahun mendatang dan akhir periode Renstra.
2. Mengidentifikasi dan memetakan risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja pada setiap IKU serta melakukan pemantauan secara berkala dalam evaluasi internal.
3. Melakukan penajaman evaluasi atas indikator kinerja yang tidak tercapai atau memiliki gap signifikan terhadap target, melalui analisis akar penyebab, faktor internal dan eksternal, serta efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan.
4. Memperkuat monitoring tindak lanjut (RTL) melalui reviu berkala untuk memastikan rencana aksi dilaksanakan secara konsisten dan tetap relevan dengan kondisi terkini.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan rapat evaluasi internal dengan fokus pada indikator yang tidak mencapai target, mengalami penurunan, memiliki deviasi signifikan, serta risiko yang berpotensi menghambat capaian kinerja kedepan.

Sebagai tindak lanjut atas penguatan monitoring dan evaluasi kinerja tersebut, dilakukan langkah-langkah perbaikan berupa penyesuaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja, penyesuaian alokasi anggaran sebagai dukungan sumber daya, serta penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur. Selain itu, mengoptimalkan penerapan nilai budaya kerja organisasi BerAKHLAK antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas melalui pelaksanaan tugas secara cermat dan bertanggungjawab, serta penyelesaian permasalahan hingga akar penyebabnya.
2. Meningkatkan kompetensi untuk mendorong pencapaian kinerja organisasi, inovasi, serta ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif.
4. Mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan kreativitas guna meningkatkan efektivitas proses kerja.
5. Memberikan ruang partisipasi bagi seluruh anggota tim dalam penyelesaian permasalahan melalui penyampaian ide dan solusi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai AKIP UPT BPOM	80,597,075	70,781,260	87.82%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW II tahun 2026	Target Output TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Output
EBA.994 Layanan Perkantoran*	*49.98%*	*49.98%*	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW II tahun 2026	Realisasi Anggaran TW II tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	28,480,000	28,330,000	99.47
2	OPERASIONAL PERKANTORAN	52,117,075	42,451,260	81.45

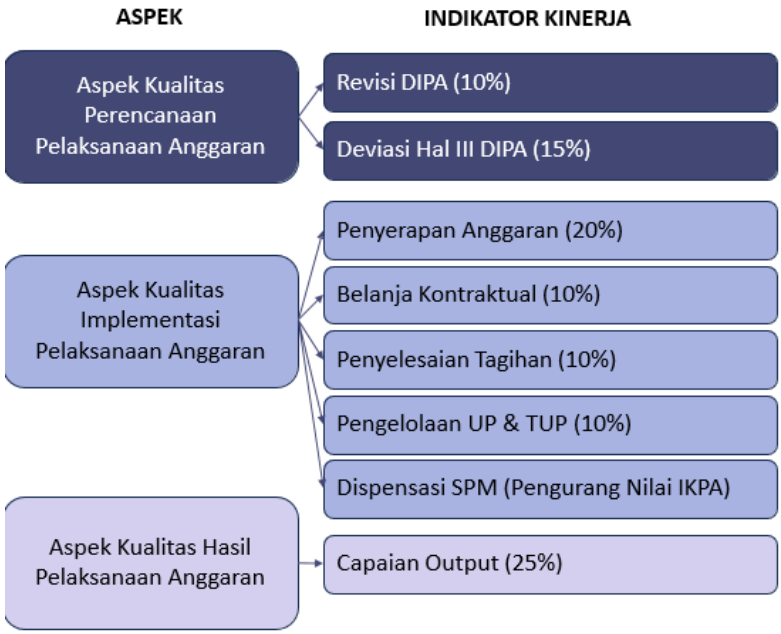
27 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Nilai tersebut menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
Penilaian Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian EKA pada tingkat satuan kerja dilakukan terhadap aspek kinerja perencanaan anggaran diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), dimana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran.

Penilaian IKPA tahun 2026 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian IKPA dilakukan terhadap 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran (25%),

aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran (50%) dan aspek kualitas hasll pelaksanaan anggaran (25%), sebagai berikut:



Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

(Nilai EKA x 50%)+(Nilai IKPA x 50%)

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berjalan mengalami perubahan baik dari sisi frekuensi maupun metode penilaian. Pada periode sebelumnya, pengukuran dilakukan secara berkala setiap bulan dengan menggunakan persentase sebagai dasar penilaian. Pendekatan tersebut memungkinkan pemantauan kinerja anggaran secara periodik, namun belum sepenuhnya menggambarkan kinerja anggaran secara komprehensif dalam satu siklus tahun anggaran.

Seiring dengan penyempurnaan kebijakan pengukuran kinerja anggaran, mulai tahun 2025 dilakukan perubahan metode pengukuran, yaitu penilaian dilakukan pada akhir tahun anggaran dan dinyatakan dalam bentuk indeks. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara keseluruhan, serta meningkatkan akurasi dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran.

Dengan penggunaan metode indeks, penilaian NKA diharapkan mampu mencerminkan aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara lebih objektif dan terukur. Selain itu, perubahan ini juga mendukung peningkatan akuntabilitas dan

kualitas pengelolaan anggaran, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

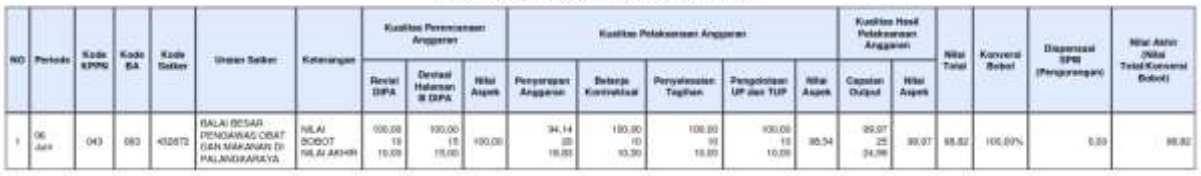
Nilai NKA	Kategori	Konversi indeks
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50.01 s.d 60	Kurang	2
60.01 s.d 80	Cukup	3
80.01 s.d 90	Baik	4
90.01 s.d 1000	Sangat Baik	5

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

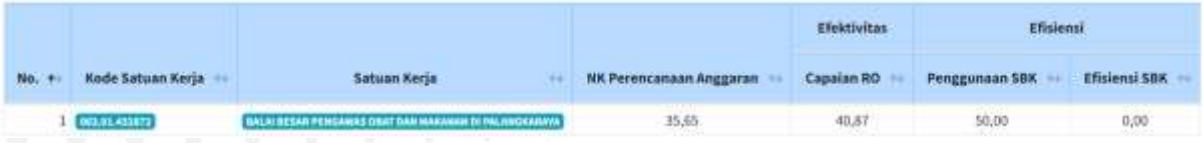
Indikator Kinerja	Target TW 2 Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW 2 Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun, namun demikian penilaian NKA yang terdiri dari penilaian IKPA dan EKA dapat dimonitor secara berkala setiap bulan. Nilai IKPA pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,82 sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER



Nilai EKA pada triwulan II tahun 2026 yang dapat dimonitor melalui aplikasi smart dja diperoleh nilai 35,65 sebagaimana tabel berikut :



Berdasarkan hasil penilaian IKPA dan EKA tersebut, dapat diperoleh nilai NKA triwulan II tahun 2026 adalah 67,10 yang dapat dikonversikan dalam bentuk indeks menjadi 3 atau sangat cukup sebagaimana tabel berikut :

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	063.01.432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	35,65	98,55	67,10

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	N/A	N/A
	Target TW II 2026	**Realisasi TW II 2026**	**Capaian TW II 2026**
	N/A	N/A	N/A

Sejak tahun 2025, Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur pada akhir tahun dalam bentuk indeks. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), target pada triwulan II ditetapkan sebesar 0 sehingga pengukuran capaian belum dilakukan pada periode tersebut. Meskipun demikian, realisasi komponen penilaian tetap dimonitor dan dibandingkan sebagai upaya memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan serta mengendalikan risiko ketidaktercapaian indikator, baik pada komponen IKPA maupun EKA.

Nilai NKA pada triwulan I tahun 2026 sebesar 37.5, yang merupakan hasil dari nilai IKPA 75 dan nilai EKA sebesar 0. Pada triwulan II tahun 2026, nilai NKA tercatat sebesar 67,10, yang merupakan hasil dari nilai IKPA 98,82 dan nilai EKA sebesar 35,65. Terdapat kenaikan nilai NKA ini dikarenakan pada triwulan II keseluruhan indikator dalam IKPA telah terukur namun belum mencapai nilai optimal.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	N/A	N/A	N/A

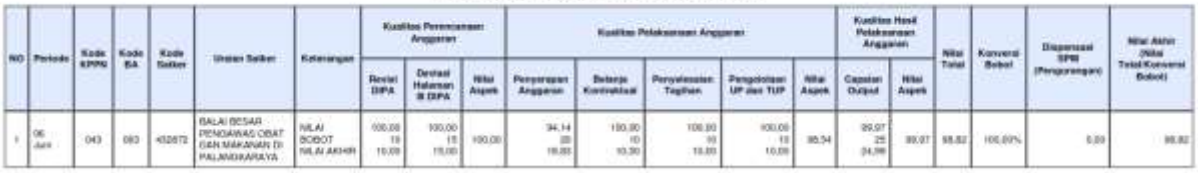
Realisasi Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, karena dalam dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), tidak ditetapkan target pada triwulan II. Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring realisasi indikator NKA pada triwulan II tercatat sebesar

67,10 yang setelah dikonversi ke dalam bentuk indeks memperoleh nilai 3 dengan kategori cukup. Dengan demikian, capaian NKA tersebut belum berhasil memenuhi target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 5, dengan capaian baru 20% termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Alokasi pagu anggaran BBPOM di Palangka Raya tahun 2026 berdasarkan nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2026 sebesar Rp17,418,072,000,00. Pada tanggal 24 Desember 2025 terdapat revisi anggaran yaitu Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama tanggal 12 Desember 2025 nomor PR.04.02.2.12.25.771 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 15,575,335,000,00.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER



Berdasarkan penilaian IKPA triwulan II tahun 2026, kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran BBPOM di Palangka Raya memperoleh nilai 100. Capaian ini menunjukkan bahwa pada triwulan II 2026, BBPOM di Palangka Raya berhasil mengelola anggaran secara optimal, baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan. Keberhasilan tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2025, dimana dalam pengelolaan anggaran, masih terdapat kendala, antara lain belum terjaganya deviasi halaman III DIPA dibawah 5%, belum tercapainya target penyerapan belanja barang pada triwulan II, serta keterlambatan pembayaran pengadaan barang akibat adanya perubahan kebijakan integrasi pembayaran. Kegagalan pencapaian kinerja tersebut, telah diidentifikasi sebagai kendala/permasalahan dalam laporan kinerja tahun 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	Lakip tahunan tahun 2025			Triwulan II tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Deviasi halaman III DIPA belum mencapai target	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target	Melakukan Pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan	Telah ditindaklanjuti dan efektif dilaksanakan dan ditekankan pengendalian	dilanjutkan

No	Lakip tahunan tahun 2025			Triwulan II tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
		penyerapan anggaran triwulan dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut	kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan.	pada pengadaan belanja barang	
2	Penyerapan anggaran tidak sesuai	Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya	Melakukan pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan	Telah ditindaklanjuti dan efektif dilaksanakan dan ditekankan pengendalian pada pengadaan belanja barang	dilanjutkan

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, telah dilakukan mitigasi risiko melalui penerapan langkah-langkah perbaikan berupa pengendalian dan monitoring yang lebih ketat oleh PPK bersama ketua tim kerja terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran agar selaras dengan target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

No	Sumber risiko	Risk event		Aktivitas pengendalian		Evaluasi keberlanjutan	
			Kode risiko	Aktivitas	Efektivitas		Justifikasi
1	Risk register semester 1 tahun 2026 dan dialog kinerja MPH 2026	RPD tidak tercapai	S08-03.01	Monitoring dan evaluasi (monev) realisasi RPD secara berkala (bulanan)	Efektif	Ya	• Risiko masih relevan • Narasi risk event diubah menjadi Deviasi halaman III DIPA belum mencapai target • Pelaksanan aktivitas pengendalian belum optimal dilaksanakan
2	Risk register semester 1 tahun 2026 dan dialog kinerja MPH 2026	Penyerapan anggaran tidak optimal	S08-03.02	Monitoring dan evaluasi (monev) penyerapan anggaran secara berkala (bulanan)	Efektif	Ya	• Risiko masih relevan • Pelaksanan aktivitas pengendalian belum optimal dilaksanakan

Pada triwulan II, telah dilaksanakan audit kinerja oleh Inspektorat II. Atas ketidaksesuaian audit tersebut, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah menambahkan identifikasi risiko dan pengendalian risiko atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana pada tabel berikut :

No	Sumber risiko	Risk event		Aktivitas pengendalian			Evaluasi keberlanjutan
			Kode risiko	Aktivitas	Efektivitas		Justifikasi
1	TL audit kinerja	Keterlambatan pendaftaran dan pembayaran kontrak.	S08-03.03	- Penetapan jadwal pendaftaran dan pembayaran kontrak - checklist kelengkapan dokumen kontrak sebelum didaftarkan - monitoring berkala terhadap kontrak yang belum didaftarkan atau belum dibayarkan	Risk register baru		●
2	TL audit kinerja	Penyetoran dan pelaporan pajak tidak sesuai ketentuan dan batas waktu.	S08-03.04	- monitoring ketepatan waktu pembayaran pajak - Verifikasi setelah pembayaran pajak	Risk register baru		●
3	TL audit kinerja	Penggunaan akun belanja tidak sesuai BAS	S08-03.05	- Reviu PPK kesesuaian penggunaan akun belanja - Pemeriksaan SPM	Risk register baru		●
4	TL audit kinerja	Pembayaran belanja melebihi atau tidak sesuai SBM.	S08-03.06	- Reviu RAB - Verifikasi pembayaran	Risk register baru		●
		Honorarium dibayarkan tidak sesuai ketentuan dan realisasi kegiatan	S08-03.07	- Verifikasi nominal - Reviu PPSPM	Risk register baru		●
	TL audit kinerja	Pembayaran uang harian, transport lokal dan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	S08-03.08	- Laporan perjalanan dinas oleh pelaksana - Verifikasi pembayaran oleh PPK	Risk register baru		●

Pada triwulan II, satu dari tiga aspek yang diukur pada IKPA yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran berhasil mempertahankan nilai 100 dari triwulan I. Sedangkan

dua aspek lainnya yaitu aspek kualitas pelaksanaan anggaran turun menjadi 97.87, penurunan terjadi pada penyerapan anggaran (94.14) dan belanja kontraktual (97.33) realisasi penyerapan anggaran tercapai 46.63% dari target 50%. Aspek terakhir yaitu kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan 1 indikator yaitu capaian output turun menjadi 98.97 yang disebabkan terdapat 1 rincian output yang tidak tercapai targetnya yaitu sampel makanan yang diperiksa oleh UPT hanya tercapai 98,98%.
Penurunan nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko belum optimal dalam mendukung pencapaian output. Hal ini antara lain disebabkan oleh aktivitas pengendalian pada proses bisnis sampel makanan yang diperiksa belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi akar penyebab permasalahan, sehingga belum mampu mencegah terjadinya risiko yang berdampak pada pencapaian target output pada penilaian IKPA. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan aktivitas pengendalian agar lebih tepat sasaran, berorientasi pada proses bisnis, dan mampu mendukung pencapaian target kinerja serta peningkatan nilai IKPA.

Dalam rangka mengawal akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas agar lebih transparan, efektif, dan sesuai ketentuan, BBPOM di Palangka Raya mengembangkan inovasi TALAWANG (Pengawalan Akuntabilitas Perjalanan Dinas). Inovasi ini hadir sebagai sistem pengendalian yang memastikan seluruh tahapan perjalanan dinas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, berjalan selaras dengan tujuan kinerja dan penggunaan anggaran. Melalui mekanisme monitoring yang terstruktur dan penekanan pada keterkaitan antara output kegiatan dan realisasi anggaran, TALAWANG mampu meminimalkan potensi deviasi, meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran, serta mendorong terbentuknya budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Untuk memastikan kualitas kinerja pengelolaan anggaran tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki perencanaan kegiatan untuk triwulan mendatang antara lain melalui penyusunan RPD halaman III DIPA, rencana pelaksanaan kegiatan yang mendorong penyerapan anggaran serta perencanaan proyeksi target output secara lebih akurat.
2. Melakukan reviu atas rencana pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sebagai upaya mendorong penyerapan anggaran.
3. Mengoptimalkan penerapan nilai budaya kerja organisasi BerAKHLAK antara lain:
    - Memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan dengan proaktif menyelesaikan permasalahan, menawarkan alternatif solusi, dan melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
    - Menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan, serta merawat dan memanfaatkan BMN secara bertanggungjawab.

- Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan untuk mendorong peningkatan kinerja, inovasi, serta ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif.
- Mendorong terciptanya budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan kreativitas guna meningkatkan efektivitas proses kerja.
- Memberikan ruang partisipasi bagi seluruh anggota tim dalam penyelesaian permasalahan melalui penyampaian ide dan solusi.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pengelolaan anggaran, beberapa langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan perlu terus ditingkatkan meliputi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan dan target capaian output dan melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga deviasi halaman III DIPA tetap dibawah 5%, memastikan penyerapan sesuai rencana, serta melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran atau pagu minus.
3. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap perencanaan kegiatan.
4. Melakukan pembayaran kontrak secara tepat waktu sesuai kemajuan pekerjaan dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
5. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pendukung sebagai dasar proses pencairan anggaran.
6. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) serta melakukan efisiensi anggaran melalui identifikasi target yang belum tercapai dan penyusunan strategi percepatannya.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2,789,889,667	2,794,725,335	100.17%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW 2 tahun 2026	Target Output TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Output
EBA.994 Layanan Perkantoran*	*49.98%*	*49.98%*	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,293,018,511	2,295,457,781	100.11
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	496,871,156	499,267,554	100.48

28 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interirn Pemerintah (SPIP) mengatur kerangka kerja dan proses pengendalian yang digunakan pemerintah dalam mengelola, mengawasi, dan memantau operasional serta sumber daya, guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko melalui identifikasi dan analisis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen risiko sendiri merupakan pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur untuk mengelola ketidakpastian serta menentukan langkah mitigasi yang tepat. Tingkat maturitas risiko digunakan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko telah terintegrasi secara efektif dalam proses organisasi, dengan tujuan memastikan kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko, memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja, serta menjamin konsistensi penerapan prinsip manajemen risiko.

Pada perencanaan strategis Renstra 2025–2029, manajemen risiko menjadi landasan penting dalam pengelolaan kinerja karena berperan dalam mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini dan mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Oleh karena itu, tingkat maturitas manajemen risiko ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendukung pencapaian sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal”.

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko. Penilaian dilakukan melalui evaluasi mandiri oleh unit kerja, yang selanjutnya direviu oleh Inspektorat Utama pada Triwulan III, dengan hasil penilaian ditetapkan dan diterbitkan pada akhir tahun.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja	Target TW 2 Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target TW 2 Tahun 2026	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko. Penilaian dilakukan melalui evaluasi mandiri oleh unit kerja, yang selanjutnya direviu oleh Inspektorat Utama pada Triwulan III, dengan hasil penilaian ditetapkan dan diterbitkan pada akhir tahun. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), target Triwulan II ditetapkan sebesar 0, sehingga pengukuran capaian belum dilakukan pada periode tersebut.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW 1 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian TW 1 2026
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	N/A	N/A
	Target TW 2 2026	**Realisasi TW 2 2026**	**Capaian TW 2 2026**
	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko. Penilaian dilakukan melalui evaluasi mandiri oleh unit kerja, yang selanjutnya direviu oleh Inspektorat Utama pada Triwulan III, dengan hasil penilaian ditetapkan dan diterbitkan pada akhir tahun. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), target Triwulan II ditetapkan sebesar 0, sehingga pengukuran capaian belum dilakukan pada periode tersebut.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW 2 Tahun 2026	Capaian Terhadap Target Tahun 2026	Kategori Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko. Penilaian dilakukan melalui evaluasi mandiri oleh unit kerja, yang selanjutnya direviu oleh Inspektorat Utama pada Triwulan III, dengan hasil penilaian ditetapkan dan diterbitkan pada akhir tahun. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), target Triwulan II ditetapkan sebesar 0, sehingga pengukuran capaian belum dilakukan pada periode tersebut.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan realisasi hasil penilaian tingkat maturitas risiko tahun 2025, sebesar 2.93 dengan capaian 97.67, telah dilakukan penyesuaian perencanaan target indikator Indeks Manajemen risiko tahun 2026. Pada dokumen Renstra 2025-2029 dan dokumen RKT 2026 target semula ditetapkan sebesar 3.05 kemudian disesuaikan

menjadi 2.95 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang ditetapkan pada 26 Februari 2026.

Kegagalan pencapaian kinerja tersebut, telah diidentifikasi sebagai kendala/permasalahan dalam laporan kinerja tahun 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	Lakip tahunan tahun 2025			Triwulan 2 tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
1	Pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Pembentukan tim manajemen risiko dan pelatihan dasar manajemen risiko	1. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko	Telah dilaksanakan	Selesai
			2. Pembentukan tim manajemen risiko disetiap fungsi dan bagian 3. Pelatihan dasr tim manajemen risiko	Telah dilaksanakan	Selesai
			4. Implementasi hasil pelatihan, sbb:		
			a. Reviu usulan daftar risiko yang disusun pada dialog kinerja terhadap pedoman	Telah dilaksanakan	Selesai
			b. Penyusunan risk register final dilengkapi dengan dokumentasi kerja penentuan level kemungkinan dan dampak	Telah dilaksanakan dengan poin f, g dan h dilaksanakan di bulan Juli sebelum batas waktu submit pada sapa apip dengan batas waktu tanggal 20 Juli 2026	Belum Selesai
			c. Penetapan risk register baru		
			d. Evaluasi penetapan dan efektivitas aktivitas pengendalian risiko		
			e. Reviu penentuan level kemungkinan dan dampak pada risiko residual		
			f. Penyusunan RTP untuk risiko inheren dengan level risiko lebih dari 16		
			g. Menguji RTP dengan dokumentasi kerja hasil pengujian		

No	Lakip tahunan tahun 2025			Triwulan 2 tahun 2026	
	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Status TL
			h. Memutakhirkan risk register sapa apip		

Evaluasi tindak lanjut tidak hanya difokuskan pada status penyelesaian rekomendasi, tetapi juga pada efektivitasnya dalam menyelesaikan akar penyebab permasalahan Oleh karena itu, dilakukan analisis kondisi sebelum dan sesudah untuk menilai perubahan yang dicapai setelah implementasi rencana tindak lanjut. Hasil pengukuran efektivitas tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindak lanjut telah memadai atau masih diperlukan rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) seperti pada tabel berikut:

No	Lakip tahunan tahun 2025		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
1	Pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko	Belum terdapat program pengembangan kompetensi yang terencana sehingga pemahaman pegawai mengenai manajemen risiko belum merata.	Program pengembangan kompetensi telah disusun dan diberikan kepada tim manrisk dan tim evaluator	Cukup efektif
		Pembentukan tim manajemen risiko di setiap fungsi dan bagian Pelatihan dasar tim manajemen risiko	Belum terdapat tim manajemen risiko	Tim Manajemen Risiko telah dibentuk pada setiap fungsi dan bagian sehingga koordinasi implementasi lebih terstruktur.	Efektif
		Pelatihan dasar Tim Manajemen Risiko	Anggota tim belum memiliki pemahaman	Pelatihan dasar telah dilaksanakan sehingga anggota tim memiliki pemahaman mengenai konsep manajemen risiko	Cukup efektif
		Reviu usulan daftar risiko yang disusun pada dialog	Daftar risiko masih beragam dan belum seluruhnya	Usulan daftar risiko telah direviu dan disesuaikan	Efektif

No	Lakip tahunan tahun 2025		Kondisi		Evaluasi efektivitas RTL
	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Sebelum	Sesudah	
		kinerja terhadap pedoman	sesuai pedoman manajemen risiko.	dengan pedoman	
		Penyusunan risk register final dilengkapi dengan kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak	Penentuan level risiko belum memiliki dasar analisis yang terdokumentasi secara memadai.	*Risk register* telah dilengkapi dengan kertas kerja penilaian kemungkinan dan dampak.	Cukup efektif
		Penetapan risk register baru	*Risk register* belum menggambarkan kondisi risiko terkini dan belum sepenuhnya berbasis proses bisnis.	*Risk register* telah diperbarui sesuai hasil identifikasi dan evaluasi risiko.	Cukup efektif
		Evaluasi penetapan dan efektivitas aktivitas pengendalian risiko	Aktivitas pengendalian belum pernah diuji efektivitasnya sehingga belum diketahui kemampuan pengendalian dalam mengurangi risiko.	Evaluasi terhadap aktivitas pengendalian mulai dilaksanakan berdasarkan *risk register*.	Belum efektif
		Reviu penentuan level kemungkinan dan dampak pada risiko residual	Risiko residual belum dievaluasi kembali setelah pengendalian diterapkan.	Penilaian risiko residual telah dilakukan sebagai dasar evaluasi pengendalian	Cukup efektif
		Penyusunan RTP untuk risiko inheren dengan level risiko lebih dari 16	Risiko prioritas belum memiliki rencana penanganan yang terdokumentasi	RTP telah disusun untuk seluruh risiko inheren dengan kategori tinggi	Efektif

Terhadap rencana tindak lanjut berupa evaluasi penetapan dan efektivitas aktivitas pengendalian risiko dengan hasil penilaian belum efektif karena evaluasi masih berfokus pada keberadaan aktivitas pengendalian dan belum mengukur efektivitasnya dalam menurunkan tingkat risiko. Oleh karena itu perlu ditetapkan indikator efektivitas aktivitas pengendalian dengan melaksanakan pengujian secara berkala.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tingkat Maturitas Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.7.01.26.114 tanggal 09 Januari 2026, terhadap implementasi Manajemen risiko yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi mandiri, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan, direkomendasikan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No	LHE Manrisk 2025	Triwulan I Tahun 2026		
	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
1	Mensosialisasikan tujuan/ sasaran organisasi yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai dan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi secara memadai	Melaksanakan sosialisasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Telah dilaksanakan	Selesai
2	Menyusun rencana dan melaukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi / refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko	Menyusun matriks rencana pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko	Telah dilaksanakan	Selesai
3	Melakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level risiko ≥ 16 dan mendokumentasikan kertas kerja hasil pengujian secara memadai	Melakukan pengujian aktivitas pengendalian risiko untuk risiko inheren dengan level risiko ≥ 16	Dilaksanakan di bulan Juli sebelum batas waktu submit pada sapa apip dengan batas waktu tanggal 20 Juli 2026	Belum Selesai
4	Melakukan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko residual dengan memperhatikan catatan kelemahan yang disampaikan pada LHE (poin 5.d)	Melakukan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko residual	Dilaksanakan di bulan Juli sebelum batas waktu submit pada sapa apip dengan batas waktu tanggal 20 Juli 2026	Belum Selesai
5	Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan sebagaimana telah disampaikan pada LHE (poin 5.e)	Menyusun kembali risk register berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan manajemen risiko BPOM	Telah dilaksanakan	Selesai
6	Melakukan penilaian risiko sesuai pedoman serta melengkapi kertas kerja justifikasi penentian skor risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak	Melakukan penilaian kembali risk register	Telah dilaksanakan	Selesai
7	Melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk risiko yang berada di atas selera rsiko atau terhadap risiko yang	Memetakan daftar risiko sebagai bahan masukan risiko yang	Telah dilaksanakan	Selesai

No	LHE Manrisk 2025	Triwulan I Tahun 2026		
	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Tindak Lanjut	Status
	belum dapat dielola ke tingkat yang dapat diteima, melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal	dieskalasi ke tingkat lebih tinggi		

Berdasarkan realisasi hasil penilaian tingkat maturitas risiko tahun 2025, sebesar 2.93 dengan capaian 97.67 dan hasil penilaian berupa kelemahan dan rekomendasi perbaikan, telah diidentifikasi risiko indikator Indeks Maturitas Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada semester 1 tahun 2026, sebagai berikut :

No	Sumber risiko	Risk event		Aktivitas pengendalian		Evaluasi keberlanjutan	
			Kode risiko	Aktivitas	Efektivitas		Justifikasi
1	Risk register semester 1 tahun 2026	Pengendalian resiko belum dijalankan sesuai mitigasi	S08-04.01	sosialisasi manajemen resiko	Efektif	Tidak	Memperhatikan hasil penilaian tahun 2025 masih dijumpai penetapan risk register dan pengujian aktivitas pengendalian dan penilaian efektivitasnya yang belum sesuai yang merupakan baseline pengendalian risiko
2	Risk register semester 1 tahun 2026 dan dialog kinerja MPH 2026	Risk register yang disusun tidak menggambarkan risiko utama yang memengaruhi pencapaian IKU.	S08-04.02	Penetapan Tim Penyusunan risk event, perhitungan level kemungkinan dan level dampak berdasarkan penyebab risiko yang mengganggu proses bisnis (katim) reviu risk register kesesuaian risk event, perhitungan level kemungkinan	Efektif	Ya	Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi penilaian tahun 2025

No	Sumber risiko	Risk event		Aktivitas pengendalian			Evaluasi keberlanjutan
			Kode risiko	Aktivitas	Efektivitas		Justifikasi
				dan level dampak sesuai dengan pedoman (tim manrisk) Memperbaiki risk register berdasarkan hasil revi, monitoring, evaluasi dan rekomendasi auditor/evaluator			
3	Dialog kinerja MPH 2026	Pengujian efektivitas aktivitas pengendalian risiko tidak memadai.	Risiko baru	Melaksanakan pengujian efektivitas aktivitas pengendalian berdasarkan bukti implementasi dan pencapaian target kinerja (penguji) Mereviu dan memvalidasi hasil pengujian efektivitas aktivitas pengendalian risiko (tim manrisk) Melaksanakan pemeriksaan efektivitas aktivitas pengendalian risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian yang ditemukan	Efektif	Ya	Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi penilaian tahun 2025

Penerapan manajemen risiko dalam mendukung tata kelola pemerintahan unit organisasi diukur melalui komponen implementasi yang mencerminkan tingkat kematangan dan integrasi pengelolaan risiko dalam seluruh proses organisasi. Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2025, tingkat maturitas manajemen risiko BBPOM di Palangka Raya mencapai 2,938 dan masih berada pada Level 2 (*Risk Aware*), yang ditandai dengan pengelolaan risiko yang belum seragam serta kedisiplinan penerapan

proses yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka dasar manajemen risiko telah tersedia, namun implementasinya belum konsisten dan belum terintegrasi secara optimal dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Kelemahan utama terletak pada belum optimalnya keterkaitan antara risiko dengan indikator kinerja dan perencanaan kegiatan, belum konsistennya pelaksanaan monitoring dan reviu risiko, serta belum efektifnya evaluasi atas tindak lanjut mitigasi risiko. Selain itu, pengelolaan risiko masih cenderung bersifat administratif dan belum menjadi bagian dari budaya kerja, serta masih terbatasnya kompetensi SDM dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko. Oleh karena itu, peningkatan menuju Level 3 (*Defined/Integrated*) difokuskan pada penguatan kompetensi dan kesadaran SDM, penyelarasan risiko dengan kinerja dan perencanaan, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Dalam rangka mencapai kondisi tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan menekankan pada penguatan fondasi, integrasi, dan konsistensi implementasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan kompetensi dan budaya risiko
    1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan manajemen risiko
    2. Mendorong keterlibatan seluruh pegawai dalam aktivitas pengendalian risiko
    3. Mengintegrasikan aktivitas pengendalian risiko ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
2. Penguatan fondasi pengelolaan risiko
    1. Menyelaraskan rsiko dengan IKU dan perencanaan kegiatan
    2. Menyederhanakan dan memutakhirkan risk register berfokus pada risiko prioritas
    3. Menetapkan penanggungjawab dan jadwal monitoring risiko secara berkala
3. Integrasi manajemen risiko dengan kinerja dan penganggaran
    - Mengintegrasikan risiko dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
    - Mengaitkan setiap risiko dengan target kinerja dan output kegiatan
    - Menerapkan early warning system berbasis capaian kinerja
4. Penguatan monitoring dan evaluasi
    - Melaksanakan monitoring dan reviu risiko secara berkala
    - Melakukan analisis akar penyebab atas risiko yang berdampak pada pencapaian kinerja
    - Mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko secara berkelanjutan
5. Penguatan akuntabilitas

- Menyusun pelaporan risiko berbasis data
- Mengintegrasikan pembahasan risiko dalam rapat evaluasi internal

Sebagai tindak lanjut atas penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, dilakukan langkah perbaikan berupa penyesuaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja, penyesuaian alokasi anggaran sebagai dukungan sumber daya, serta penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur. Selain itu, mengoptimalkan penerapan nilai budaya kerja organisasi BerAKHLAK melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan hingga akar penyebab, peningkatan kompetensi untuk mendorong kinerja dan inovasi, pembangunan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif, serta penguatan budaya kerja yang terbuka terhadap ide, kreativitas, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Pencapaian target indikator kinerja pada periode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara target penyerapan dan realisasi anggaran yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan Indikator kinerja, target penyerapan berasal dari target rencana penarikan dana (RPD) yang ditetapkan di triwulan ini.

Indikator Kinerja	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	80,597,075	70,781,260	87.82%

Efektivitas pelaksanaan program kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, namun juga dilihat dari keselarasan dengan realisasi output fisik. Berikut adalah capaian realisasi output yang mendukung pencapaian Indikator kinerja ini.

Rincian Output	Target Output TW 2 tahun 2026	Target Output TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Output
EBA.994 Layanan Perkantoran*	*49.98%*	*49.98%*	100.00%

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alokasi anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja, berikut disajikan rincian realisasi pada tingkat sub-komponen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pos kegiatan mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja, maupun yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut pada periode mendatang.

No	Sub Komponen	Target Penyerapan Anggaran TW 2 tahun 2026	Realisasi Anggaran TW 2 tahun 2026	Capaian Realisasi Anggaran
1	OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	28,480,000	28,330,000	99.47
2	OPERASIONAL PERKANTORAN	52,117,075	42,451,260	81.45

3.2 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja Triwulan 2 tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan sampling untuk bulan Januari dilakukan pada minggu kedua karena minggu pertama masih penyusunan perencanaan di awal tahun anggaran 2026.	Melaksanakan sampling sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun.	Melaksanakan sampling sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun.	Selesai	Telah dilaksanakan sampling sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun	Februari 2026	Tidak	-	-
2	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel diterima pengujian setelah tanggal 15 Januari 2026, sehingga proses pengujian baru dapat dilaporkan pada bulan berikutnya.	Sampel diterima pengujian sebelum tanggal 10 pada bulan berjalan, sehingga dapat diupayakan hasil pengujian dapat dilaporkan pada bulan yang sama.	Berkoordinasi dengan petugas penyampling agar sampel sudah diterima di pengujian sebelum tanggal 10 pada setiap bulannya	Selesai	Telah dilakukan koordinasi dengan petugas penyampling agar sampel sudah diterima di pengujian sebelum tanggal 10 pada setiap bulannya	Februari 2026	Ya	S01-03.01	Pelaksanaan sampling tidak sesuai dengan perencanaan
3	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Evaluasi penandaan kosmetik TW 1 oleh Ditwas Kosmetik disampaikan pada bulan Mei ada perbedaan hasil penandaan UPT MK oleh DiwasKos TMK sehingga mempengaruhi hasil akhir IK 1 untuk sampel kosmetik	Akan bersurat ke DitwasKos untuk menjadi narasumber peningkatan kompetensi petugas terkait penandaan kosmetik.	Bimtek/sosialisasi peningkatan kompetensi petugas terkait penandaan kosmetik.	Selesai	Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi peningkatan kompetensi telah dilakukan tanggal 12 Juni	Juni 2026	Tidak	-	-
4	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	Tidak ada kendala	-	Memastikan waktu pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan	Dalam Proses	perhitungan terhadap waktu pengujian dilakukan sesuai	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan			penentuan kesimpulan akhir mempertimbangkan hasil pengujian dan hasil penilaian penandaan sampel		dengan pedoman sampling, dan penentuan kesimpulan akhir telah memperhatikan hasil pengujian dan hasil penilaian penandaan				
5	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	pemahaman terkait definisi operasional (manual IKU) pencapaian kinerja masih kurang sehingga dikhawatirkan capaian yang rendah diakibatkan cara pelaporan kinerja yang belum sesuai	Kendala bukan pada jumlah personil pengujian tetapi pemahaman terkait definisi operasional (manual IKU) pencapaian kinerja. Sehingga kita harus : 1. Menyepakati cara perhitungan pembilang dan penyebut yang dilaporkan sesuai definisi operasional 2. Capaian kinerja bulan april merupakan koreksi dari triwulan 1 dan bulan april	Arahan Pimpinan 1. Melakukan diskusi terkait definisi IKU dan pelaporan kinerja 2. Rearrange beban kerja pengujian obat	Selesai	Telah dilakukan diskusi terhadap manual IKU terkait dengan perhitungan capaian. Pada manual IKU sudah ada keterangan tambahan terkait jumlah sampel yang diuji. Dimana jika terdapat sampel yang belum selesai diuji namun masih memiliki sisa hari untuk SLA, maka sampel tersebut di perhitungkan pada bulan berikutnya (pembilang dan penyebut)	Desember 2026	Tidak		
6	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	Terbatasnya jenis dan jumlah sediaan kosmetik di sarana terutama	Melakukan komunikasi dengan unit	Melaksanakan sampling sesuai revisi renlak yang	Selesai	Telah dilakukan komunikasi dengan unit	Desember 2026	Ya	S01-03.01	Pelaksanaan sampling tidak sesuai

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	kategori kontrak produksi dan kuasa merek	pengampu untuk retargeting renlak sampling kosmetik	disetujui unit pengampu		pengampu untuk retargeting renlak sampling kosmetik dan melaksanakan sampling sesuai revisi renlak yang disetujui unit pengampu				dengan perencanaan
7	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kerusakan alat laboratorium	Melakukan perawatan rutin terhadap alat laboratorium	Melakukan kalibrasi antara dan verifikasi alat yang sesuai dengan jadwal	Selesai	kalibrasi antara dan verifikasi alat telah dilaksanakan sesuai jadwal	Desember 2026	Ya	S03.01.01	Kerusakan alat/ instrumen di Laboratorium
8	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala terletak pada jumlah personil penguji yang minim, yang menyebabkan tingginya beban kerja penguji di laboratorium. Sehingga pelaksanaan pengujian tidak dapat dipaksakan selesai pada bulan yang sama dengan sampel diterima, namun tidak melebihi batas waktu pengujian yang ditetapkan sesuai dengan pedoman sampling.	Penyelia masing-masing komoditi membuat rencana pengujian dengan mengatur pelaksanaan pengujian berdasarkan kompleksitas parameter uji dan kesulitan metode analisa yang digunakan	Mengatur jadwal pelaksanaan pengujian sesuai dengan kompleksitas parameter uji dan kesulitan metode analisanya	Selesai	Menetapkan rencana pengujian sesuai pedoman sampling dan kebijakan regionalisasi laboratorium dengan mempertimbangkan kompleksitas parameter uji dan kesulitan metode analisa yang digunakan	Desember 2026	Tidak	-	-
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rendahnya pelaporan KTD/ESO pasca menerima KIE Farmakovigilans	Monitoring Kualitas Laporan	Melaksanakan desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes yang telah mendapatkan KIE farmakovigilans	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S01-02.01	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										melaporkan KTD/ESO
10	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rendahnya pelaporan KTD/ESO pasca menerima KIE Farmakovigilans	Penguatan Jejaring Farmakovigilans Daerah melalui peran aktif focal point daerah yang telah dibentuk dan menjadikan fasyankes yang aktif melaporkan sebagai “role model” dalam menunjukan kinerja pelaporan KTD/ESO yang optimal.	Melibatkan fasyankes/focal point yang aktif melaporkan sebagai narasumber dalam kegiatan refreshment KIE farmakovigilans sebagai “local champion” yang membantu mengedukasi rekan sejawat di wilayahnya	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S01-02.01	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO
11	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rendahnya pelaporan KTD/ESO pasca menerima KIE Farmakovigilans	Sistem Reward dan Apresiasi, dengan memberikan apresiasi atau sertifikat penghargaan bagi fasyankes yang paling aktif dan konsisten dalam melaporkan KTD/ESO secara berkualitas.	Pemberian apresiasi berupa pemberian sertifikat dan surat apresiasi kepada fasyankes yang aktif melaporkan, dan memberikan gimmick yang menarik bagi tenaga kesehatan yang aktif melaporkan.	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S01-02.01	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO
12	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Beban kerja Laboratorium Pangan BBPOM Di Palangka Raya termasuk kategori tinggi apabila dibandingan dengan UPT	Pengajuan usulan penyesuaian target sampel makanan kepada pihak Ditwasdar	Pembuatan kertas kerja usulan penyesuaian jumlah sampel makanan untuk	Selesai	Telah disampaikan kertas kerja kepada Pihak Ditwasdar dan	Februari 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	setara di Regional Kalimantan.	sebelum ditetapkannya target sampel Tahun 2026.	BBPOM Di Palangka Raya. Adapun kertas kerja mencakup perbandingan terkait jumlah anggaran pengadaan sampel, perbandingan terkait anggaran perjadin dan perbandingan jumlah sampel per penguji antar Laboratorium Pangan yang tercakup dalam Regional Kalimantan.		telah mendapatkan hasil berupa pengurangan jumlah target yang semula sebanyak 441 sampel menjadi 375 sampel selama Tahun 2026.				
13	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kegiatan pengujian di Laboratorium difokuskan pada pekerjaan perbaikan untuk ketidaksesuaian Reakreditasi KAN yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2026.	Penyelesaian perbaikan untuk assesmen reakreditasi ISO 17025 diutamakan namun tetap memperhatikan timeline pengujian sampel rutin.	Laboratorium Pangan menyelesaikan perbaikan untuk assesmen reakreditasi KAN dengan status "memenuhi" untuk semua lembar ketidaksesuaian yang diterbitkan.	Selesai	Status temuan untuk laboratorium pangan telah memenuhi untuk semua lembar ketidaksesuaian. (Close)	April 2026	Tidak		
14	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 1 sampel PIRT tersampling sebagai sampel MD/ML yaitu No 25.098.301.13.01.0027	Sampling pangan targeted MD/ML dan sampel pangan PIRT dilakukan dalam waktu yang berbeda atau oleh	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.	Selesai	Sampling PIRT telah selesai dilakukan oleh petugas yang sama dengan petugas sampel MD/Ml namun	Juni 2026	Ya	S03-03.02	Label kemasan yang tidak dapat terbaca

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			petugas berbeda untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kategori sampling.			dilaksanakan dalam waktu yang berbeda untuk menghindari kejadian serupa.				dengan jelas dan lengkap
15	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum tersedianya baku Okratoksin sehingga terdapat 2 sampel kopi bubuk ataupun kopi instant yang belum disampling.	Sampling kekurangan sejumlah 2 sampel yang masuk pada Renlak bulan Juni akan dilaksanakan mengikuti ketersediaan Baku Okratoksin dan juga renlak regional untuk kopi instan yaitu direncanakan pada bulan Agustus 2026	Koordinasi dengan laboratorium/penyedia terkait pengadaan baku Okratoksin	Belum Dilaksanakan	Dalam progres	Agustus 2026	Tidak	-	-
16	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 1 sampel nomor25.098.301.13.01.0136 tidak sesuai berat sampel yang telah disampling sesuai pedoman	Dilakukan sampling terhadap pangan tertentu pada bulan-bulan berikutnya jika terdapat adanya kasus di masyarakat terkait isu keamanan pangan olahan untuk dapat memenuhi target yang telah dibuat hingga akhir tahun.	Dilakukan penggantian sampling Pangan Tertentu dengan jenis pangan lainnya sehingga target output tetap tercapai.	Selesai	Telah penggantian sampling Pangan Tertentu dengan jenis pangan lainnya sehingga target output tetap tercapai.	Desember 2026	Ya	S01-03.01	Tidak tersedianya jumlah sampel yang mencukupi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
17	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	pemahaman terkait definisi operasional (manual IKU) pencapaian kinerja masih kurang sehingga dikhawatirkan capaian yang rendah diakibatkan cara pelporan kinerja yang belum sesuai	Kendala bukan pada jumlah personil pengujian tetapi pemahaman terkait definisi operasional (manual IKU) pencapaian kinerja. Sehingga kita harus : 1. Menyepakati cara perhitungan pembilang dan penyebut yang dilaporkan sesuai definisi operasional 2. Capaian kinerja bulan april merupakan koreksi dari triwulan 1 dan bulan april	Arahan Pimpinan 1. Melakukan diskusi terkait definisi IKU dan pelaporan kinerja 2. Rearange beban kerja pengujian obat	Selesai	Telah dilakukan pembahasan terkait manual IKU dan hasilnya kesalahan ada pemahaman manual iku yang berbeda antara ketua tim kerja pengampu IKU, jadi telah disepakati cara pelaporan yang benar dan sesuai manual IKU	Desember 2026	Tidak		
18	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 5 sampel Pangan Olahan yang melewati timeline yaitu sampel jenis AMDK dengan parameter uji PK Bromat yang diuji di BBPOM Samarinda.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan laboratorium regional, khususnya dalam proses pengiriman sampel, penginputan data pada SIPT, serta tindak lanjut terhadap hasil pengujian guna memastikan kelancaran dan	Memperkuat koordinasi dengan laboratorium regional pada setiap tahapan proses, mulai dari pengiriman sampel, penginputan data ke dalam SIPT, hingga tindak lanjut atas hasil pengujian, sehingga pelaksanaan pengujian dapat	Belum Dilaksanakan	Dalam progres	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			ketepatan pelaksanaan proses pengujian.	berlangsung lebih efektif, akurat, dan tepat waktu.						
19	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Penentuan parameter uji disebabkan adanya inkubasi yang tidak lengkap	Perkuat komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan jika terjadi lagi kasus KLB-KP	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap adanya laporan KLB yang terjadi pada sampai dengan semester 1 dan dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan analisis epidemiologi serta pengujian oleh Lab Mikrobiologi BPOM di Palangka Raya sehingga agen penyebab terjadinya keracunan dapat diketahui.	Selesai	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat	Desember 2026	Ya	S01-04.01	Kompetensi petugas dalam menentukan etiologi dan parameter uji tidak tepat
20	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kapasitas dan Beban Kerja Laboratorium yang tinggi akibat penumpukan sampel dan jumlah SDM terbatas serta kendala peralatan laboratorium menyebabkan tekanan kerja tinggi dan potensi keterlambatan pelaporan hasil uji	Pemetaan kompetensi, job desk dan beban kerja tenaga penguji	Pengusulan ABK sesuai dengan hasil pemetaan dan kajian beban kerja penguji	Selesai	Pengusulan ABK sesuai dengan hasil pemetaan dan kajian beban kerja penguji telah dilakukan dan juga ditambah dengan pemenuhan personil dari kegiatan magang kementerian tenanga kerja	Maret 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
21	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 4 (empat) sampel PIRT yang tertunda pengujiannya akibat dari belum adanya baku pembanding Aflatoksin. Namun pengadaan telah dilakukan dan sedang berproses.	1. Mengawal proses pengadaan baku pembanding Aflatoksin agar segera dapat diterima oleh pihak Laboratorium. 2. Menerapkan sistem clock off untuk sampel yang belum dapat diuji akibat ketidaktersediaan baku pembanding	1. Fungsi Pengujian memastikan bahwa sampel pangan PIRT telah selesai uji sebelum semester I berakhir. 2. Fungsi Pemeriksaan melakukan tindak lanjut terhadap sampel-sampel yang hasil ujinya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).	Selesai	Sampel PIRT telah selesai uji pada semester I Tahun 2026	Juni 2026	Tidak	-	-
22	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat kendala pada 1 (satu) sampel jenis kopi, dimana parameter uji okratoksin tidak dapat dilakukan pengujian karena ada keterlambatan vendor menyediakan baku pembanding okratoksin.	Direkomendasikan pelaksanaan uji bersama dengan BBPOM Banjarbaru terhadap sampel kopi sebagai langkah percepatan penyelesaian pengujian sampel PIRT agar target penyelesaian pada Semester I Tahun 2026 dapat tercapai.	Menindaklanjuti pelaksanaan uji bersama dengan BBPOM Banjarbaru melalui koordinasi jadwal pengujian yang disepakati dan disesuaikan dengan kesiapan laboratorium.	Selesai	Telah dilakukan uji bersama untuk parameter uji PK Okratoksin	Juni 2026	Tidak	-	-
23	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel yang tidak dapat diuji dikarenakan proses pengadaan baku pembanding Okratoksin terhambat, dimana pihak	Mengawal proses pengadaan baku pembanding Okratoksin agar segera dapat diterima oleh	Mengawal proses pengadaan baku pembanding okratoksin agar sampel segera diuji sebelum semester	Selesai	Dari hasil komfirmasi dengan vendor penyedia baku sampel akan dikirimkan dan	Juni 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		vendor memperpanjang masa inden pengadaan.	pihak Laboratorium. Dan menerapkan sistem clock off untuk sampel yang belum dapat diuji akibat ketidaktersediaan baku pembanding	I Tahun 2026 berakhir.		pengujian akan dilaksanakan pada bulan Agustus				
24	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak Ada Kendala	Menyelesaikan pengujian sampel PIRT pada semester I Tahun 2026 sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Sampel PIRT Tahun 2026 diterima laboratorium hanya pada bulan Februari dan Maret sehingga hasil uji dapat dilaporkan selesai di Semester I Tahun 2026.	Selesai	100 % sampel PIRT telah selesai uji	Juni 2026	Tidak		
25	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat rekomendasi carry over yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Melakukan follow up permintaan feedback	Melakukan follow up permintaan feedback kepada pelaku usaha	Selesai	Terdapat 1 tambahan feedback dari pelaku usaha di bulan Februari tahun 2026	Februari 2026	Tidak	-	-
26	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat rekomendasi carry over yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Melakukan follow up permintaan feedback	Melakukan follow up permintaan feedback melalui Dinas Kesehatan	Selesai	Telah disampaikan kembali tindak lanjut untuk 4 toko obat di kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Katingan dan	Maret 2026	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						kabupaten Gunung Mas dan telah mendapatkan 2 feedback, untuk 2 sarana lainnya sudah tidak operasional				
27	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Tidak ada feedback atas rekomendasi/surat tindak lanjut yang disampaikan	Meningkatkan monitoring evaluasi	Petugas wajib update bukti penyampaian surat tindak lanjut di platform SI PAMELA	Selesai	Petugas belum secara konsisten mengupload bukti penyampaian surat tindak lanjut di SI PAMELA	Maret 2026	Ya	S01-06.01	Pelaku usaha terlambat menerima surat tindak lanjut
28	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sarana sudah tidak beroperasional/tutup, sementara rekomendasi belum mendapatkan feedback	"Close" untuk sarana yang sudah tidak beroperasional/tutup, sementara rekomendasi belum mendapatkan feedback	Untuk pelaku usaha yang sampai dengan bulan Maret belum menyampaikan feedback (carry over) namun saat ini sudah tutup, diasumsikan/dihitung sudah memberikan feedback	Selesai	Telah dilakukan perhitungan IKU sesuai dengan rencana tindak lanjut	April 2026	Tidak		
29	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat feedback yang dikirimkan melalui komunikasi whatsapp dengan petugas sehingga tidak dapat dilakukan monev	Bukti feedback dari pelaku usaha/lintas sektor diupload di googlesite SI PAMELA Feedback dari pelaku usaha diminta upload di	Seluruh bukti feedback CAPA diupload di SI PAMELA	Belum Dilaksanakan	Dalam progres	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			bitly yang tercantum pada surat.							
30	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terbatasnya kompetensi petugas untuk melakukan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan terkait pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi yang ada di IDEAS	Membuat matrik pelatihan peningkatan kompetensi petugas	Selesai	petugas telah mengikuti pelatihan terkait pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi yang ada di IDEAS	Maret 2026	Tidak	-	-
31	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan perencanaan	Melakukan peningkatan penyusunan renlak pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi dan melakukan monev setiap bulan	Menyusun renlak pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi dan melaksanakan monev yang ketat setiap bulannya	Selesai	telah disusun renlak pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi dan monev yang ketat setiap bulannya	Desember 2026	Tidak	-	-
32	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 3 sarana peredaran yang memiliki rating B tidak diberikan surat tindak lanjut sesuai pedoman	Dilakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan	Dilakukan sosialisasi kembali terkait Tindak Lanjut Pengawasan Pangan terhadap petugas	Selesai	Pada zoom tanggal 18 Mei 2026 disampaikan bahwa untuk sarana ritel tradisional (warung, los, kios) dengan rating A dan B tidak perlu diberikan surat tindak lanjut, jika	Juni 2026	Ya	S01-08.03	Kompetensi petugas belum memadai (Kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman)

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						rating C maka dapat diberikan surat peringatan				
33	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesalahan dalam menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan monev	Supervisi dan monev kesesuaian tindak lanjut	Selesai	Meningkatkan monev dalam menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilaksanakan selama triwulan 1 tahun 2026	Desember 2026	Ya	S01-09.01	Tindak Lanjut hasil pemeriksaan belum sesuai pedoman
34	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 6 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP yang tidak sesuai dengan pedoman	Dilakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan	Dilakukan Bimtek Tindak Lanjut Pengawasan Pangan terhadap petugas	Selesai	Telah dilaksanakan Bimtek TL Pengawasan pangan yang dilaksanakan oleh Pusat pada tgl 18 Mei 2026, termasuk pengawasan sarana produksi pangan olahan.	Juni 2026	Ya	S01.10.03	Kompetensi petugas belum memadai (Kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman)
35	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Untuk Iklan Sediaan farmasi Tidak Ada Kendala Untuk iklan pangan terkendala tidak terpenuhinya target iklan pada media cetak dari target 8 baru realisasi 4 iklan		Mengejar realisasi 4 target iklan pangan pada media cetak dibulan berikutnya	Selesai	Telah dilakukan pengawasan Iklan pangan olahan pada media cetak sebanyak 4 iklan pada bulan Mei 2026.	Mei 2026	Tidak	-	-
36	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terdapat 2 target iklan pangan olahan pada media cetak yang tidak	Upayakan lebih keras lagi pengawasan iklan	Membuat laporan realisasi pengawasan iklan	Selesai	Telah dilaksanakan pengawasan	Juli 2026	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang diawasi sesuai ketentuan	dapat dilaporkan pada bulan Maret 2026	pangan pada media cetak, jika memang tidak dapat ditemui dapat bersurat ke unit pengampu terkait.	pangan olahan dan usulan perubahan target pengawasan pada media cetak.		iklan pangan olahan pada media cetak bulan Mei 4 iklan dan bulan Juni 2 iklan. Informasi dari Pusat, terdapat perluasan kategori media iklan cetak, tidak hanya pada surat kabar, namun termasuk pada kalender atau katalog produk juga masuk pada kategori media iklan cetak.				
37	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal dikarenakan jumlah iklan yang terbatas (Ketepatan proporsi)	Melakukan koordinasi dengan dengan media penyiaran lokal (RRI)	Melakukan koordinasi deng unit pengampu untuk revisi target media penyiaran lokal dialihkan ke media lain	Selesai	telah dilakukan koordinasi dengan unit pengampu untuk revisi target media penyiaran lokal dialihkan ke media lain	Desember 2026	Ya	S01.11. 02	Tidak tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal dikarenakan iklan tidak ada yang ditayangkan (Ketepatan proporsi)
38	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan	Pelaporan maksimal tanggal 1 bulan berikutnya	Input hasil pengawasan label dari petugas maksimal tanggal terakhir pada bulan berjalan,	Selesai	Untuk laporan pengawasan label produk tembakau bulan Mei telah dilakukan sesuai	April 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		berikutnya Terdapat laporan yang belum diinput pada SIPT oleh petugas/operator		supervisor mengevaluasi dan meneruskan ke kepala balai maksimal tanggal 1 bulan berikutnya		dengan rencana tindak lanjut, input dari operator maksimal tanggal 31 Mei dan supervisor meneruskan ke kepala balai pada tanggal 1 Juni 2026				
39	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pada bulan Maret Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya sehingga ralisasi tidak mencapai target walaupun sampel pada bulan-bulan berikutnya telah tepat waktu. Berdasarkan excercise target bisa tercapai jika tidak ada keterlambatan pelaporan lagi sampai akhir tahun.	Memastikan pelaporan sampel melalui SIPT sesuai timeline ke pusat	Pada akhir bulan sebelum batas pelaporan ketua tim melakukan crosscek data dan status laporan pada aplikasi SIPT untuk sampel bulan juli	Belum Dilaksanakan	Dalam proses	Juli 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu
40	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Timeline label produk tembakau dan atau rokok elektronik tidak tercapai	Meningkatkan monev	Monitoring pelaporan pengawasan label tembakau melalui SIPT	Dalam Proses	Memastikan tidak ada keterlambatan pelaporan sampel di SIPT sampai bulan Juni 85 sampel telah dilaporkan tepat waktu dari 105 sampel	Desember 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
41	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pada bulan Maret Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya sehingga ralisasi tidak mencapai target walaupun sampel pada bulan-bulan berikutnya telah tepat waktu. Berdasarkan excercise target bisa tercapai jika tidak ada keterlambatan pelaporan lagi sampai akhir tahun.	Memastikan pelaporan sampel melalui SIPT sesuai timeline ke pusat	Pada akhir bulan sebelum batas pelaporan ketua tim melakukan crosscek data dan status laporan pada aplikasi SIPT untuk sampel bulan Juni	Selesai	Realisasi sampel bulan juni telah dilaporkan tepat waktu sebanyak 17 sampel	Juni 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu
42	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pada bulan Maret Ketua tim/supervisor lupa meneruskan laporan pengawasan penandaan rokok sampai dengan timeline pelaporan yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya sehingga ralisasi tidak mencapai target walaupun sampel pada bulan-bulan berikutnya telah tepat waktu. Berdasarkan excercise target bisa tercapai jika tidak ada keterlambatan pelaporan lagi sampai akhir tahun.	Memastikan pelaporan sampel melalui SIPT sesuai timeline ke pusat dan tidak ada keterlambatan perlaporan lagi	Pada akhir bulan sebelum batas pelaporan ketua tim melakukan crosscek data dan status laporan pada aplikasi SIPT untuk sampel bulan Mei	Selesai	Realisasi sampel bulan mei telah dilaporkan tepat waktu	Mei 2026	Ya	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu
43	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Kurangnya peserta yang hadir dalam kegiatan	Meningkatkan monev	Monitoring konfirmasi peserta yang diundang	Dalam Proses	Belum dilakukan bimtek, rencana dilakukan bersamaan	Desember 2026	Ya	S01-13.02	Jumlah peserta bimtek

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						dengan bimtek apotek yang diselenggarakan oleh Dinkes Kota Palangka Raya tanggal 11-12 Mei 2026				kurang dari 30
44	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pemeriksaan dan Pelaporan SIPT sarana apotek yang dilakukan petugas tidak menggunakan form AMR	Meningkatkan monev	Monitoring penyiapan form	Dalam Proses	Sampai dengan akhir April telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 apotek dan seluruhnya telah dilaporkan melalui SIPT lengkap dengan input form AMR sesuai ketentuan	Desember 2026	Ya	S01-13.01	Pemeriksaan dan pelaporan SIPT sarana apotek yang dilakukan petugas tidak menggunakan form AMR
45	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Reagen/media/baku pembanding/bahan habis pakai untuk melakukan verifikasi metode tidak tersedia	Melaksanakan stok opname secara berkala	Hasil stok opname digunakan untuk perencanaan pengadaaan Reagen/media/baku pembanding/bahan habis pakai uji verifikasi metode	Selesai	perencanaan pengadaaan Reagen/media/baku pembanding/bahan habis pakai telah mengunakan hasil laporan stock opname	Desember 2026	Tidak	-	-
46	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak Ada Kendala	Melanjutkan realisasi kegiatan sesuai dengan roadmap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium	Melaksanakan kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL : 1. Pelaksanaan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi alat	Belum Dilaksanakan	Dalam progres	Desember 2026	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			yang telah disusun	laboratorium dan pengadaan alat laboratorium , 2. Perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis internal, 3. Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, 4. Pengadaan baku pembanding						
47	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak Ada Kendala	Melanjutkan realisasi kegiatan sesuai dengan roadmap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang telah disusun	Melaksanakan kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL : 1. Pelaksanaan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi alat laboratorium dan pengadaan alat laboratorium , 2. Perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis internal, 3. Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, 4. Pengadaan baku pembanding dengan target akhir triwuln II	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan sampai akhir triwulan II tahun 2026, lalu dilakukan pergantian ketua tim SKL	Desember 2026	Tidak		
48	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	Kerusakan alat/instrumen di Laboratorium	Membuat jadwal pemeliharaan alat melalui kalibrasi	Melakukan kalibrasi antara dan verifikasi alat	Selesai	Telah dikalibrasi antara dan verifikasi alat	Desember 2026	Ya	S03.01.01	Kerusakan alat/instrumen di Laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		antara dan verifikasi alat	yang sesuai dengan jadwal		yang sesuai dengan jadwal				
49	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Keterbatasan kompetensi SDM dalam melaksanakan verifikasi metode	Merencanakan program pengembangan kompetensi SDM menyesuaikan dengan verifikasi metode	Menyelenggarakan bimbingan teknis internal masing-masing komoditi	Selesai	Telah dilaksanakan bimbingan teknis internal masing-masing komoditi	Desember 2026	Tidak	-	-
50	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak Ada Kendala	Meningkatkan intensifikasi audiensi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait di 10 (sepuluh) kabupaten/kota terutama target pendampingan tahun 2026, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur	-Melakukan audiensi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait	Selesai	Pada bulan Juni telah dilaksnakan audiensi dan koordinasi kepada pemda dan lintas sektor terkait di Kabupaten Gunung Mas yang merupakan salah satu target pendampingan di tahun 2026	Juni 2026	Ya	S01-15.01	OPD terkait belum memahami kesesuaian data dukung yang harus dilengkapi dalam pengisian tools penilaian
51	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Masih ada beberapa OPD terkait Kabupaten yang belum memiliki komitmen untuk mengikuti desk monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian	Meningkatkan intensifikasi audiensi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait yang	Melakukan audiensi ke OPD kabupaten yang belum terpapar terkait penilaian mandiri kabupaten/kota	Selesai	Telah dilaksanakan audiensi kepada Pemda dan OPD terkait di Kabupaten Gunung Mas	Juni 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		mandiri kabupaten/kota pangan aman	belum dan menjadi target tahun 2026	pangan aman, yaitu Kabupaten Gunung Mas		pada tanggal 23 Juni 2026				
52	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak Ada Kendala	Meningkatkan komunikasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam rangka pengisian tools dan data dukung penilaian mandiri melalui inovasi P3K PAMAN	Meningkatan efektifitas pemanfaatan Inovasi P3K PAMAN dalam rangka pendampingan pengisian tools dan data dukung penilaian mandiri KKPA	Selesai	Pemanfaatan Inovasi P3K PAMAN secara bertahap telah dimanfaatkan oleh seluruh OPD kab/kota Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Juni 2026	Tidak	-	-
53	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Masih ada beberapa kabupaten yang belum dilakukan audiensi terkait pentingnya pengisian tools penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman, antara lain Kabupaten Gunung Mas sebagai dampak dari adanya kebijakan efesiensi anggaran	Meningkatkan intensifikasi audiensi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait	- Melakukan audiensi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait	Dalam Proses	Dalam proses, akan diselesaikan sesuai target pada bulan Juli	Juli 2026	Ya	-	-
54	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program Keamanan Pangan secara mandiri dan berkelanjutan serta Program Keamanan	Melakukan audiensi kepada pemerintah daerah dan stake holder terkait	Mengintensifikasikan kegiatan koordinasi dan advokasi program Penilaian Kabupaten/kota Pangan Aman keseluruh kabupaten/kota di wilayah kerja	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Pangan bukan menjadi program prioritas		BBPOM di Palangka Raya						
55	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	Meningkatkan komunikasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam rangka pengisian tools dan data dukung penilaian mandiri melalui inovasi P3K PAMAN		Dalam Proses	Telah melakukan pengembangan dan memperkenalkan inovasi P3K PAMAN sebagai sarana komunikasi dan monev dalam rangka penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman	Desember 2026	Tidak	-	-
56	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sistem pengarsipan/dokumen administrasi pengawasan sarana dan tindak lanjut serta pelaporan hasil kinerja yang kurang efektif	Pembuatan link pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan yang tertelusur	Pengembangan inovasi PAMELA	Selesai	Sudah disite tersendiri untuk pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan sarana fotifikasi	Desember 2026	Ya	S02.01.02	Dokumentasi Pemeriksaan Tidak Lengkap dan Akurat
57	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Pemetaan kompetensi, penyusunan GAP analisis kompetensi dan perencanaan pelatihan berjenjang bagi petugas inspeksi	GAP analisis kompetensi dan penyusunan perencanaan pelatihan	Selesai	Sudah disusun GAP analisis kompetensi dan dilaksanakan pelatihan	Desember 2026	Ya	S02.01.01	Kompetensi petugas inspeksi yang kurang memadai
58	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	Tidak Ada Kendala	1. Meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE Obat dan Makanan melalui	Menyusun rencana KIE Tahun 2026 (KIE Rutin, KIE	Selesai	Rencana KIE Tahun 2026 (KIE Rutin, KIE Stunting, KIE	Februari 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Olahan di wilayah kerja UPT		pengembangan ragam kegiatan sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal, melibatkan influencer/ public figure serta mitra strategis BPOM lainnya 2. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2026 3. Melaksanakan pengukuran Tingkate efektivitas KIE Tahun 2026 secara berkesinambungan	Stunting, KIE Media sosial)		Media sosial) telah disusun				
59	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Fluktuasi nilai indeks Efektivitas KIE	Meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE Obat dan Makanan melalui pengembangan ragam kegiatan sesuai dengan	Menyusun perencanaan KIE selaras dengan agenda setting tahunan dan Melaksanakan KIE dan menghadirkan narasumber yang	Selesai	Telah disusun perencanaan KIE selaras dengan agenda setting tahunan dan Melaksanakan KIE dan menghadirkan	Desember 2026	Ya	S04.01.01 & S04.01.02	Pesan-pesan KIE tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik; Petugas KIE belum

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal, melibatkan influencer/ public figure serta mitra strategis BPOM lainnya	kompeten di bidangnya, influencer, dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik		narasumber yang kompeten di bidangnya				memiliki kompetensi yang memadai
60	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Fluktuasi nilai indeks Efektivitas KIE	Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025	Optimalisasi peran tim publikasi dalam mengawal konten KIE media sosial	Selesai	Telah dilakukan optimalisasi peran tim publikasi dalam mengawal konten KIE media sosial	Desember 2026	Ya	S04.01.01 & S04.01.02	Pesan-pesan KIE tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik; Petugas KIE belum memiliki kompetensi yang memadai
61	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak Ada Kendala	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Advokasi Komitmen Pemda Linsek sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Komitmen Pemda Linsek telah dilaksanakan pada tgl 24 Februari 2026 sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Februari 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
62	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jadwal Pelaksanaan Advokasi tidak sinkron dengan jadwal yang telah ditetapkan	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemda dan stakeholder terkait	Melakukan koordinasi dan komunikasi	Selesai	Pelaksanaan Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemda dan stakeholder terkait telah dapat dilaksanakan sehingga tahapan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor di Kabupaten yang menjadi target intervensi tahun 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Maret 2026	Ya	S04.02.01	Pelaksanaan Advokasi tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan
63	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Efisiensi anggaran membutuhkan strategi pelaksanaan, terutama bagi komunitas desa dimana pelaksanaan kegiatan secara daring terkendala pada jangkauan internet serta aktifitas komunikas 2 arah dengan peserta menjadi kendala	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	- Memastikan pelaksanaan pelaporan tepat waktu dan sesuai juknis - Melakukan survei lokasi, waktu, kondisi jaringan serta kondisi geografis dapat terpenuhi agar setiap tahapan program dalam berjalan dengan baik	Selesai	Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai juknis Telah dilakukan survei lokasi, waktu, kondisi jaringan serta kondisi geografis agar setiap tahapan program dalam berjalan dengan baik	April 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
64	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak Ada Kendala	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selanjutnya Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan	Selesai	Penyusunan perencanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	April 2026	Tidak	-	-
65	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kader Keamanan Pangan Sekolah tidak memahami materi yang diberikan	Memberikan materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video ataupun contoh-contoh	Dilakukan post test ulang untuk pertanyaan yang salah	Selesai	Dalam Proses sesuai target akan dilaksanakan pada Bulan Juni	Juni 2026	Ya	S04.02.03	Peningkatan pengetahuan kader dan komunitas sekolah tidak tercapai
66	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kesulitan transportasi pada sekolah dengan kondisi geografis tertentu	Menyusun strategi pelaksanaan dengan alternatif pelaksanaan secara hybrid (luring dan daring)	Melakukan sosialisasi langsung ke sekolah yang tidak dapat hadir	Dalam Proses	Dalam Proses sesuai target akan dilaksanakan pada Bulan Juni	September 2026	Ya	S04.02.02	Target sekolah tidak tercapai
67	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak melakukan rencana aksi surveilen secara keseluruhan	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi surveilen	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S04.02.05	Kemandirian dan Keberlanjutan program tidak tercapai
68	Jumlah desa pangan aman	Tidak Ada Kendala	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan	- Menyusun rencana pelaksanaan	Selesai	Pelaksanaan kegiatan Advokasi	Februari 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	kegiatan Advokasi Komitmen Pemda Linsek sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan		Komitmen Pemda Linsek di Kabupaten Pulang Pisau telah dilaksanakan pada tgl 24 Februari 2026 sesuai target yang telah ditetapkan				
69	Jumlah desa pangan aman	Jadwal Pelaksanaan Advokasi tidak sinkron dengan jadwal yg telah ditetapkan	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan stakeholder terkait	Melakukan koordinasi dan komunikasi	Selesai	Pelaksanaan Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan stakeholder terkait di Kabupaten Pulang Pisau sebagai kabupaten target intervensi telah dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor dapat terlaksana pada tgl 24 Fenriari 2026 sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Maret 2026	Ya	S04.03.01	Pelaksanaan Advokasi tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
70	Jumlah desa pangan aman	Komunitas tidak memahami materi yang diberikan	Memberikan materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video atau pun contoh-contoh	Dilakukan post test ulang untuk pertanyaan yang salah	Dalam Proses	Dalam Proses, karena kegiatan belum dilaksanakan	Juni 2026	Ya	S04.03.04	Peningkatan pengetahuan komunitas desa tidak tercapai
71	Jumlah desa pangan aman	Efisiensi anggaran berdampak terhadap perlu strategi khusus dalam pelaksanaan, terutama bagi komunitas desa dimana pelaksanaan kegiatan secara daring terkendala pada jangkauan internet serta aktifitas komunikas 2 arah dengan peserta menjadi kendala sehingga bonding dalam melaksanakan rangkaian tahapa dirasakan cukup berat	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	- Memastikan pelaksanaan pelaporan tepat waktu dan sesuai juknis - Melakukan survei lokasi, waktu, kondisi jaringan serta kondisi geografis dapat terpenuhi agar setiap tahapan program dalam berjalan dengan baik	Dalam Proses	Dalam Proses, sesuai target RTL akan selesai dilaksanakan dibulan Juli	Juli 2026	Tidak	-	-
72	Jumlah desa pangan aman	Tidak Ada Kendala	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selanjutnya Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan	Belum Dilaksanakan	Dalam proses	Juli 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
73	Jumlah desa pangan aman	Tidak melakukan rencana aksi sebagai wujud kemandirian desa dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi	Dalam Proses	Dalam Proses	Desember 2026	Ya	S04.03.02	Kemandirian dan Keberlanjutan program tidak tercapai
74	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak Ada Kendala	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Advokasi Komitmen Pemda Linsek sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan	Selesai	Tahapan Advokasi Komitmen Pemda Linsek telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2026 sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan	Februari 2026	Tidak	-	-
75	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jadwal Pelaksanaan Advokasi tidak sinkron dengan jadwal yg telah ditetapkan	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemda dan stakeholder terkait	Melakukan koordinasi dan komunikasi	Selesai	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemda dan stakeholder terkait telah dilakukan terhadap kabupaten Pulang Pisau yang menjadi target intervensi tahun 2026 sehingga pelaksanaan Advokasi Komitmen Pemda dan Linsek telah	Maret 2026	Ya	S04.04.01	Pelaksanaan Advokasi tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						dilaksanaan pada tanggal 24 Februari 2026 sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan				
76	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak Ada Kendala	Melakukan Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara berkala	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selanjutnya Bimbingan Teknis Komunitas Pasar Pengawasan Keamanan Pangan Pasar sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan	Selesai	Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan selanjutnya Bimbingan Teknis Komunitas Pasar Pengawasan Keamanan Pangan Pasar telah dilakukan dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Mei 2026	Tidak	-	-
77	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak semua penanggung jawab pasar dapat hadir mengikuti kegiatan Advokasi	Melakukan pendekatan kepada komunitas pasar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan program	- Memastikan pelaksanaan pelaporan tepat waktu dan sesuai juknis - Memanfaatkan peran aktif komunitas pasar untuk dapat terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan tahapan -Bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam	Selesai	Dalam Proses, sesuai target RTL akan diselesaikan di bulan Mei	Mei 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				pelaksanaan setiap tahapan program						
78	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pedagang pasar lebih memilih berjualan dibanding mengikuti kegiatan penyuluhan pasar	Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan komunitas pedagang pasar	Melaksanakan kegiatan penyuluhan pasar di waktu dan tempat yang memungkinkan pedagang dapat mengikuti	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S04.04.02	Target penyuluhan pasar tidak tercapai
79	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak semua komunitas pasar memiliki gadget	Melaksanakan tahapan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing pasar dan komunitasnya	Melaksanakan sosialisasi KP kepada komunitas pasar dengan 2 metoda, melalui konten media sosial dan pembagian stiker	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S04.04.03	Target pelaksanaan tahapan tidak tercapai
80	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Petugas Pasar belum memahami teknis pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	Memberikan materi-materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video ataupun contoh-contoh	Petugas BBPOM di Palangka raya melakukan pendampingan kepada petugas	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S04.04.04	Peningkatan pengetahuan petugas pasar tidak tercapai
81	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak melakukan rencana aksi dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri	rencana aksi dalam melaksanakan pembudayaan keamanan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi	Dalam Proses	Dalam proses	Desember 2026	Ya	S04.04.05	Kemandirian dan Keberlanjuta

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pangan secara mandiri Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan							n program tidak tercapai
82	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Data Lintas Sektor tidak lengkap	evaluasi potensi sarana yang berasal dari lintas sektor, jika tidak tidak lengkap dan potensial untuk naik kelas, tidak dimasukkan dalam data sarana	koordinasi dengan lintas sektor yang memiliki data sarana yang potensial untuk naik kelas	Selesai	telah bersurat ke lintas sektor untuk meminta update data sarana pelaku usaha obat dan makanan untuk dapat dilakukan evaluasi dan GAP Assesment potensi UMKM naik kelas	Februari 2026	Tidak	-	-
83	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Data Lintas Sektor tidak lengkap	evaluasi potensi sarana yang berasal dari lintas sektor, jika tidak tidak lengkap dan potensial untuk naik kelas, tidak dimasukkan dalam data sarana	meminta surat pernyataan komitmen pendampingan untuk UMKM yang telah masuk dalam target pendampingan	Selesai	telah meminta surat penyataan komitmen pendampingan terhadap target pelaku usaha pendampingan	Maret 2026	Ya	S04-01.02	pelaku usaha tidak melanjutkan proses pendamping an
84	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	Data Lintas Sektor tidak lengkap	evaluasi potensi sarana yang berasal dari lintas sektor, jika tidak tidak lengkap dan potensial untuk	anggaran yang terbatas disiasati dengan penugasan kolaborasi lintas fungsi	Selesai	telah dilakukan kolaborasi penugasan dalam	Juni 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		naik kelas, tidak dimasukkan dalam data sarana			penghematan biaya				
85	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Data Lintas Sektor tidak lengkap	evaluasi potensi sarana yang berasal dari lintas sektor, jika tidak tidak lengkap dan potensial untuk naik kelas, tidak dimasukkan dalam data sarana	koordinasi dengan laboratorium terkait sampel pendampingan UMKM	Selesai	telah dilakukan koordinasi pengujian sampel pendampingan dengan ketua tim kerja sampling dan manajer mutu	Juni 2026	Tidak	-	-
86	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	keterbatasan anggaran	penugasan kolaborasi dengan fungsi lain	penugasan kolaborasi lintas fungsi	Selesai	telah dilakukan penugasan kolaborasi tugas dengan lintas fungsi	Juni 2026	Tidak		
87	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Tidak Ada Kendala	Perhatikan tahapan pendampingan untuk UMK komoditi OBA dan Kosmetik	evaluasi pemenuhan standar untuk UMK Kosmetik	Belum Dilaksanakan	dalam proses	Juli 2026	Tidak	-	-
88	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan pendampingan on site	Kolaborasi antar kelompok kerja untuk efisiensi penggunaan	Penugasan bersama	Selesai	telah dilakukan penugasan bersama tim inspeksi untuk	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	hanya dapat dilakukan di Kota Palangka Raya	anggaran dan penugasan bersama			penghematan anggaran				
89	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Antrian pengujian sampel dalam rangka pendampingan pelaku usaha	Koordinasi dengan penguji terkait parameter uji dan jadwal pengujian	Penjadwalan sampling dan pengujian untuk pendampingan UMKM	Selesai	telah dilakukan koordinasi untuk pengujian sampel pendampingan dengan ketua tim sampling pangan dan Manajer mutu laboratorium	Desember 2026	Tidak	-	-
90	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	UMKM tidak memiliki motivasi yang kuat untuk memperoleh sertifikat, menganggap proses pendampingan sebagai beban, kurangnya keterbukaan terhadap perubahan	Pemetaan dan GAP assessment kesiapan pelaku usaha	Meminta surat pernyataan komitmen pendampingan pelaku usaha	Selesai	telah dilaksnakan pada bulan maret 2026 untuk progres pendampingan th 2026	Desember 2026	Ya	S05.01.01	UMKM berguguran/tidak melanjutkan selama proses pendampingan
91	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara ke-3 tahun 2025 telah dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (Tahap II) pada bulan November 2025 dan sedang dalam proses persidangan	Persidangan dijadwalkan awal tahun 2026, dengan terbatasnya anggaran tahun 2026 diperlukan strategi koordinasi dalam pelaksanaan sidang untuk menghadirkan saksi dan ahli	Koordinasi dengan CJS	Selesai	Telah dilakukan koordinasi dengan JPU terkait pelaksanaan sidang dimana keterangan saksi dan ahli dibacakan dari berkas perkara sehingga tidak perlu	Maret 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						menghadirkan secara offline.				
92	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak ada kendala	Direkomendasikan untuk melakukan penyesuaian target RAPK untuk IKU ini	Mengusulkan revisi target RAPK sesuai dengan realisasi dan penyesuaian target RO penyidikan	Belum Dilaksanakan	Dalam proses	Agustus 2026	Tidak	-	-
93	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak Ada Kendala	melaksanakan patroli siber, profilling dan rekomendasi analisis sesuai dengan rencana dan tepat waktu	melaksanakan patroli siber, profilling dan rekomendasi analisis sesuai dengan rencana dan tepat waktu	Selesai	patroli siber, profilling dan rekomendasi analisis telah dilaksanakan tepat waktu	Februari 2026	Tidak	-	-
94	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	Kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana	Peningkatan Kualitas Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan olahan	Dalam Proses	proses pembuatan laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan olahan	Desember 2026	Ya	S06.01.01	Kesimpulan dari kajian analisis belum menggambarkan fakta di lapangan
95	Indeks Pelayanan Publik UPT	(1) Pada implementasi Smart Laura di Kab. Katingan dan Kab. Barito Utara sempat terjadi offline dikarenakan data modem yang habis. Untuk di MPP Kapuas juga mengalami offline karena sedang terjadi renovasi pada gedung DPMPTSP Kab. Kapuas; (2) Pengajuan audiensi kepada Kanwil KemenHAM Prov.	(1) Akan dievaluasi terkait pembelian besaran paket data kuota modem untuk perangkat Smart Laura yang menggunakan modem sebagai sumber sinyal internetnya; (2) Menindaklanjuti	Menindaklanjuti sekretariat Kanwil KemenHAM Prov. Kalteng terkait surat permohonan audiensi yang sudah diajukan	Selesai	Audiensi telah dilakukan antara Kepala BBPOM di Palangka Raya dengan Kakanwil KemenHAM Kalteng	April 2026	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Kalteng terkait penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM belum mendapatkan jawaban dari pihak Kanwil KemenHAM Prov. Kalteng	sekretariat Kanwil KemenHAM Prov. Kalteng terkait surat permohonan audiensi yang sudah diajukan							
96	Indeks Pelayanan Publik UPT	(1) Pada implementasi Smart Laura di Kab. Katingan dan Kab. Barito Utara sempat terjadi offline dikarenakan data modem yang habis. Untuk di MPP Kapuas juga mengalami offline karena sedang terjadi renovasi pada gedung DPMPTSP Kab. Kapuas; (2) Pengajuan audiensi kepada Kanwil KemenHAM Prov. Kalteng terkait penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM belum mendapatkan jawaban dari pihak Kanwil KemenHAM Prov. Kalteng	(1) Akan dievaluasi terkait pembelian besaran paket data kuota modem untuk perangkat Smart Laura yang menggunakan modem sebagai sumber sinyal internetnya; (2) Menindaklanjuti sekretariat Kanwil KemenHAM Prov. Kalteng terkait surat permohonan audiensi yang sudah diajukan	Segera dilakukan pembelian paket data kuota modem untuk perangkat Smart Laura	Selesai	Telah dilakukan pembelian paket data kuota modem untuk perangkat Smart Laura	April 2026	Tidak		
97	Indeks Pelayanan Publik UPT	Efisiensi anggaran sehingga sulit dalam memenuhi kehadiran pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya pada MPP kab/kota catchment area	Mengembangkan Inovasi Layanan Publik	Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MPP Target (Kota Palangka Raya) dan kabupaten potensial lainnya	Selesai	Telah dilaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MPP Kota Palangka Raya dan	Desember 2026	Ya	S08. 01.02	Layanan tele public service melalui Inovasi Smart Laura pada MPP Kab/Kota mengalami gangguan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						Kabupaten Pulang Pisau				koneksi/ kerusakan dan atau kendala lainnya
98	Indeks Pelayanan Publik UPT	Masih terdapat GAP pada jangkauan/ akses edukasi dan/atau pengembangan kapasitas pengguna layanan dari kelompok rentan	Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan	Melaksanakan pemberdayaan kelompok rentan melalui pembentukan kader, fasilitator UMKM dan KIE	Dalam Proses	Kegiatan direncakan akan digantikan dengan Desk PIRT Pelaku Usaha Kelompok Rentan melalui inovasi "Klinik Laura" pada Triwulan 3 Tahun 2026	Desember 2026	Ya	S08. 01.03	Layanan publik BBPOM di Palangka Raya belum memadai untuk melayani kaum rentan
99	Indeks Pelayanan Publik UPT	Variabilitas kompetensi petugas pelayanan publik	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia	Meningkatkan kompetensi petugas pelajaran mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoring	Selesai	Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas yanblik melalui pembelajaran mandiri (ideas), pelatihan internal, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoring	Desember 2026	Ya	S04. 01.02	Petugas KIE belum memiliki kompetensi yang memadai
100	Indeks Pelayanan Publik UPT	Standar Pelayanan Tahun 2025 belum dipahami secara optimal dari masyarakat/ pengguna layanan	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan	Melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan 2026 pada berbagai media	Selesai	Telah dilakukan sosialisasi Standar Pelayanan 2026 pada berbagai media setelah	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						pelaksanaan FKP pada bulan Mei 2026				
10 1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Masih terdapat GAP dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan	Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik, dalam memenuhi pelayanan pelanggan prioritas/ kelompok rentan	Dalam Proses	Telah dilakukan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik untuk pelanggan prioritas/ kelompok rentan. Masih ada penambahan sarpras yang dibutuhkan meliputi: Tanda "TITIK KUMPUL" di Halaman Kantor, Tanda "ARAH JALUR EVAKUASI" sesuai dengan masukan dari Tim Penilai KemenHAM Kalteng	Desember 2026	Ya	S08. 01.03	Layanan publik BBPOM di Palangka Raya belum memadai untuk melayani kaum rentan
10 2	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Kompilasi inovasi yang telah diimplementasikan sejak tahun 2022 yang tidak lengkap monev dan pelaporan	menetapkan PIC untuk seluruh inovasi agar implementasi dan pelaporan terjaga	membuat SK perumusan inovasi beserta PIC penanggung jawab inmplementasi serta monev pelaporan	Selesai	telah diterbitkan SK perumusan inovasi BBPOM di Palangka Raya	Februari 2026	Tidak	-	-
10 3	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	inovasi masih dalam tahap pengembangan	membuat SK inovasi agar jelas road map inovasi	monitoring evaluasi terhadap penyusunan SK inovasi makro	Selesai	telah dikompilasi seluruh SK inovasi makro	Maret 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
104	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Renja yang terlalu detail pada butir rencana aksi menyulitkan dalam pengisian tabel monev yang diinginkan	penyederhanaan monev Renja agar mudah dilakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang belum terlaksana	monitoring evaluasi rencana aksi yang belum terlaksana di TW 1 dan di jabarkan dalam laporan monev renja	Dalam Proses	monitoring pengisian Renja oleh Katim	April 2026	Tidak		
105	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala	Hasil penilaian dari Inspektorat Badan POM seperti pada uraian di bawah	Peningkatan kualitas pembangunan ZI dengan melaksanakan perbaikan atas rekomendasi Inspektorat Badan POM	Selesai	telah dilakukan perbaikan terhadap LHE Nilai Pembanguan Zi BBPOM di Palangka Raya	Desember 2026	Ya	S09.01.02	Tidak semua orang siap untuk digitalisasi
106	Nilai AKIP UPT BPOM	Pengisian data tersebut belum dilakukan secara tertib dan konsisten setiap bulan, khususnya dalam pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, termasuk pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, dan memanfaatkan aplikasi untuk pelaporan dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL pada Aplikasi Simetris	Dalam Proses	telah input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal serta akan dimonitoring setiap bulan	Desember 2026	-	-	-
107	Nilai AKIP UPT BPOM	Tata kelola dokumen kinerja masih lemah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penyusunan SK TIM SAKIP, serta	Menyusun dan memperbarui SK Penetapan IKU serta SK Tim SAKIP dengan pembagian	Selesai	Telah disusun dan ditetapkan SK Penetapan IKU tahun 2026 dan SK Tim	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk menjamin keselarasan dokumen, konsistensi nomenklatur IKU, dan ketepatan target kinerja di seluruh instrumen perencanaan.	penugasan yang spesifik untuk melakukan verifikasi data guna memastikan keselarasan seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), konsistensi nomenklatur, serta ketepatan target di seluruh dokumen perencanaan.		SAKIP tahun 2026				
108	Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Kinerja Interim belum seluruhnya menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya dan belum terlihat adanya kondisi sebelum dan sesudah adanya rencana aksi	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan) dengan menyajikan hasil monitoring rencana aksi yang selaras antar periode (termasuk status penyelesaian dan perbandingan kondisi before-after), serta menyusun analisis mendalam mengenai pencapaian terhadap target akhir Renstra dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar	Menggunakan aplikasi untuk pelaporan RTL dari ketua tim untuk pemantauan dan pelaporan RTL laporan kinerja interim dan tahunan agar konsisten dan termonitoring secara berkala	Selesai	Sosialisasi pengunaan Aplikasi Matriks Analisis, Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Progres RTL telah dilaksanakan pada bulan April dan telah mulai diimplementasikan dalam pelaporan kinerja Triwulan 1 tahun 2026	Desember 2026	-	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			penyesuaian strategi							
109	Nilai AKIP UPT BPOM	Pemanfaatan informasi kinerja belum berorientasi strategis	Menyajikan pembahasan pemanfaatan informasi kinerja dalam lakip dan menerapkan siklus evaluasi berbasis PDCA	Menyajikan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan evaluasi internal dan lapkin	Dalam Proses	Dalam proses, untuk laporan kinerja interim 1 baru dilaksanakan dibulan April 2026	Desember 2026	Tidak	-	-
110	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Deviasi hal III DIPA belum mencapai target	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulan dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.	Melakukan pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan.	Dalam Proses	Pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan sepanjang tahun 2026	Desember 2026	Ya	S09.03.01	RPD tidak tercapai
111	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Pembentukan tim manajemen risiko dan pelatihan dasar manajemen risiko	1. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko. 2. Pembentukan tim manajemen	Dalam Proses	Dalam Proses, dengan progress kegiatan yang telah selesai yaitu Pembentukan tim manajemen risiko	Agustus 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline RTL	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				risiko di setiap fungsi dan bagian 3. Pelatihan dasar tim manajemen risiko 4. Implementasi hasil pelatihan sbb: a. Reviu usulan daftar risiko yang disusun pada dialog kinerja terhadap pedoman b. Penyusunan risk register final dilengkapi dengan dokumentasi kerja penentuan level kemungkinan dan dampak. c. Penetapan risk register baru. d. Evaluasi penetapan dan efektivitas aktivitas pengendalian risiko. e. Reviu penentuan level kemungkinan dan dampak pada risiko residual. f. Penyusunan RTP untuk risiko inheren dengan level risiko lebih dari 16. g. Menguji RTP dengan dokumentasi kerja hasil pengujian. h. Memutakhirkan risk register sapa apip		di setiap fungsi dan bagian dan Perencanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko				

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja di lingkungan BBPOM di Palangka Raya merupakan perwujudan nyata dari komitmen instansi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan manajemen kinerja yang berbasis data, di mana informasi yang dihasilkan dari pelaporan berkala tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat kendali manajemen yang strategis.

Evaluasi terhadap capaian di setiap periode menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran demi memastikan seluruh target tahunan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Berikut adalah rincian pemanfaatan informasi kinerja yang telah dilaksanakan selama triwulan 2 tahun 2026:

1) Penyesuaian aktivitas atau kegiatan

   Penyesuaian aktivitas atau kegiatan yang dilaporkan untuk Indikator triwulan sebelum tidak tercapai dan/atau Indikator yang belum dapat dinilai capaian pada triwulan sebelumnya untuk dapat menunjukan dampak dari penyesuaian aktivitas atau kegiatan pada periode pelaporan saat ini.

   a) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

      Indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan 1 tahun 2026 capaianya adalah 88,65% dengan kriteria capaian cukup, selama triwulan 2 telah dilakukan upaya untuk meningkatkan capaiannya dengan untuk pelaporan pada aplikasi SIPT harus diselesaikan maksimal tanggal 1 setelah bulan berjalan untuk menghindari keterlambatan pelaporan. Hasilnya di bulan akhir triwulan 2 capaiannya realisasinya adalah 97,52% telah meningkat 8,87% dan berdasarkan proyeksi capaian akan melampaui 100% diakhir tahun jika pelaporan tepat waktu ini terus dipertahankan.

   b) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

      Indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan 1 tahun 2026 capaiannya adalah 141,42% dan masuk dalam kriteria capaian tidak dapat disimpulkan oleh karena itu telah dilakukan penyesuaian target RAPK untuk indikator ini yang mulai dilaksanakan pada 13 Mei 2026 dengan mengusulkan revisi target kepada biro perencanaan dan keuangan dan hasilnya disetujui dengan nodin Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.07.21.05.26.263 hal Tanggapan Usulan Perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Bulanan Balai Besar POM Di Palangka Raya Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026. Sehingga capaian kinerja

indikator ini diakhir triwulan 2 tahun 2026 adalah 100,78% dengan capaian Sangat Baik.

c) Menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diputuskan untuk mengaktifkan kembali layanan on-call untuk penerimaan sampel pihak ke-3 pada hari Jumat dan Sabtu (hingga pukul 10 pagi).

2) Penyesuaian penggunaan anggaran

Penyesuaian pengunaan anggaran yang telah dilakukan selama triwulan II adalah sebagai berikut:

a) Menyikapi kenaikan harga bahan bakar solar, penggunaan kendaraan dinas operasional berbahan bakar solar (seperti mobil labling dan double gardan) akan dikurangi. Aktivitas lapangan bidang Infokom dialihkan menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin yang tersedia.

b) Strategi pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dioptimalkan melalui kolaborasi dengan kegiatan strategis instansi lain (seperti kegiatan vaksinasi) guna meminimalkan pengeluaran biaya transportasi peserta.

c) Melakukan efisiensi sisa anggaran bidang penindakan dengan dialihkan untuk operasi intelijen di dalam dan luar kota, perjalanan dinas forum komunikasi PPNS di Jawa Barat, serta sertifikasi pilot drone di bulan Juni.

3) Evaluasi hasil tindak lanjut atas rekomendasi atau rencana aksi kinerja sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya terlampir matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada sub bab 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya. Rekomendasi yang diberikan untuk ditindaklanjuti dari Akhir tahun 2025 sampai bulan Juni 2026 adalah sebanyak 111 rencana tindak lanjut sampai dengan Akhir triwulan 2 tahun 2026 75 rencana tindak lanjut telah selesai dan 36 rencana tidak lanjut masih dalam proses karena *timeline* penyelesaianya bukan di triwulan 2 tahun 2026. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Triwulan 2 tahun 2026 merupakan hasil nyata dari efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Hasil evaluasi capaian kinerja triwulan 2 tahun 2026 menjadi dasar dalam menyusun strategi dan rencana kegiatan pada triwulan 3 tahun 2026. BBPOM di Palangka Raya melakukan penyesuaian perencanaan untuk periode mendatang yang mencakup aspek-aspek berikut:

a) Penyesuaian Strategi untuk mencapai target kinerja

- Untuk Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar mempertahankan ketepatan waktu dalam pelaporan untuk dapat mencapai target diakhir tahun.
- Untuk Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT segera diusulkan perubahan target RAPK pada periode revisi target RAPK terdekat.
- Akibat perpindahan pegawai yang menjabat sebagai ketua tim kerja ke balai lain dilakukan perubahan dan pergantian personil ketua tim kerja per awal triwulan III.

b) Penyesuaian Perencanaan Anggaran
- diusulkan optimalisasi sisa anggaran belanja modal, yang diperuntukan untuk diprioritaskan pada perbaikan alat HPLC dan sisanya digunakan untuk pembelian laptop dalam rangka pemenuhan alat pengolah data.
- Karena kegiatan penyidikan telah selesai dan target output-nya sudah tercapai, maka anggaran penyidikan tersebut dialihkan untuk kegiatan penggalangan dan advokasi terkait obat-obat tertentu.
- Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
- Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.

3.3 Realisasi Anggaran

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.2.432872/2026 tanggal 01 Desember 2025 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp. 17.418.072.000. (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) sampai dengan triwulan 2 tahun 2026 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 7 (tujuh) kali Revisi DIPA, terdiri dari 2 kali revisi kewenangan KPA, 2 kali revisi kewenangan kanwil DJPb dan 3 kali revisi kewenangan DJA sebagai berikut :

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan
1	24/12/2025	Nota Dinas Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden	DJA	Pagu total : Rp 17,418,072,000 menjadi Rp 15,575,335,000 (- Rp 1,842,737,000) sumber dana RM Per Jenis Belanja : Belanja Pegawai tetap Rp 5.211.479.000 Belanja Barang dari Rp 9.093.176.000 menjadi Rp 7.873.122.000 (- Rp1.220.054.000) Belanja Modal dari Rp 3.113.417.000 menjadi Rp 2.490.734.000 (- Rp622.683.000) Blokir : awal Rp 0 menjadi Rp 20,000,000 sumber dana PNBP Per RO : AEA (Koordinasi): dari Rp10.000.000 menjadi Rp5.916.000 (- Rp4.084.000). BAH (Pelayanan Publik Lainnya): dari Rp17.725.000 menjadi Rp13.863.000 (- Rp3.862.000). BDB (Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga): dari Rp147.202.000 menjadi Rp89.982.000 (- Rp57.220.000). BDC (Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat): dari Rp89.232.000 menjadi Rp53.901.000 (- Rp35.331.000). BIA (Pengawasan dan Pengendalian Produk): dari Rp24.573.000 menjadi Rp16.863.000 (- Rp7.710.000). BKB (Pemantauan Produk): dari Rp312.633.000 menjadi Rp162.457.000 (- Rp150.176.000). BMB (Komunikasi Publik): dari Rp12.985.000 menjadi Rp8.926.000 (- Rp4.059.000). PDD (Standarisasi Lembaga): dari Rp1.737.506.000 menjadi

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan
				Rp1.592.864.000 (-Rp144.642.000). QCD (Perkara Hukum Badan Usaha): dari Rp358.335.000 menjadi Rp225.040.000 (-Rp133.295.000). QDC (Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat): dari Rp10.000.000 menjadi Rp6.120.000 (-Rp3.880.000). QDG (Fasilitasi dan Pembinaan UMKM): dari Rp12.179.000 menjadi Rp6.713.000 (-Rp5.466.000). QIA (Pengawasan dan Pengendalian Produk): dari Rp1.272.182.000 menjadi Rp1.225.141.000 (-Rp47.041.000). QIC (Pengawasan dan Pengendalian Lembaga): dari Rp512.124.000 menjadi Rp280.436.000 (-Rp231.688.000). RAB (Sarana Bidang Kesehatan): dari Rp3.113.417.000 menjadi Rp2.490.734.000 (-Rp622.683.000). EBA (Layanan Dukungan Manajemen Internal): dari Rp9.787.979.000 menjadi Rp9.396.379.000 (-Rp391.600.000).
2	21/01/2026	Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Tanggal 24 Januari 2025 Nomor S-37/MK.02/2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	KPA	Penyesuaian dengan pemotongan anggaran sebelumnya dan pemutakhiran anggaran sesuai kegiatan 2026
3	20/02/2026		Kanwil DJPb	Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana TW 1
4	25/04/2026	Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM Nomor : PR.05.03.2.04.26.260 perihal Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 tanggal 08 April 2026	DJA	Pagu total : Rp 15,575,335,000 menjadi Rp 15,571,430,000 (- Rp 3,905,000) sumber dana RM Per Jenis Belanja : Belanja Pegawai tetap Rp 5.211.479.000 Belanja Barang dari Rp 7.873.122.000 menjadi Rp 7.869.217.000 (- Rp 3,905,000) Blokir anggaran tetap Rp

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan
				20,000,000 sumber dana PNBP Per KRO : BAH Anggaran tetap target output dari 528 Dokumen menjadi 417 (-111) BDB Anggaran dari Rp 89.982.000 menjadi 89.129.000 (-Rp853.000), target dari 12 lembaga menjadi 8 (-4) BDC Anggaran tetap target output dari 600 Orang menjadi 440 (-160) BMB Anggaran tetap target output dari 7 Kegiatan menjadi 6 (-1) QCD Anggaran dari Rp 225.040.000 menjadi 222.310.000 (-Rp2.730.000), target dari 3 perkara menjadi 2 (-1). QDG Anggaran tetap target output dari 11 UMKM menjadi 7 (-4) QIA (Pengawasan dan Pengendalian Produk) Anggaran tetap target output dari 1.434 Sampel menjadi 1.326 (-108) QIC (Pengawasan dan Pengendalian Lembaga) Anggaran tetap target output dari 432 Sampel menjadi 206 (-226) EBA (Layanan Dukungan Manajemen Internal): dari Rp9.396.379.000 menjadi Rp9.396.057.000 (-Rp322.000).
5.	12/05/2026		Kanwil DJPb	- Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) - Update Rencana Penarikan Dana TW 2
6.	04/06/2026	Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM Nomor : PR.05.03.2.05.26.353 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 tanggal 11 Mei 2026	DJA	- Total pagu dari Rp 15,571,430,000 menjadi Rp 15,588,010,000 (+Rp16,580,000) QCD Anggaran dari Rp 222,310,000 menjadi Rp 238.890.000 (+Rp16,580,000)
7.	12/06/2026		KPA	- Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Pada akhir triwulan 2 tahun 2026 pagu yang dikelola menjadi Rp. Rp 15.588.010.000,- dengan blokir anggaran Rp 20.000.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp Rp 15.568.010.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2026 adalah Rp 7.259.677.509,- yang berarti 46.57% dari pagu awal dan 46,63% dari pagu efektif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu efektif paling rendah pada belanja barang yaitu 38.21% dan paling tinggi pada belanja pegawai yang telah direalisasikan 53.62%.

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	% terhadap Pagu Awal	% terhadap Pagu Aktif
1	Belanja Pegawai	5.211.479.000	-	5.211.479.000	2.794.540.273	53.62%	53.62%
2	Belanja Barang	7.885.797.000	20.000.000	7.865.797.000	3.012.769.659	38.21%	38.30%
3	Belanja Modal	2.490.734.000	-	2.490.734.000	1.452.367.577	58.31%	58.31%
TOTAL		**15.588.010.000**	**20.000.000**	**15.568.010.000**	**7.259.677.509**	**46.57%**	**46,63**

Strategi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

i. Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
ii. Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.
iii. Memastikan target tercapai dengan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil kerja output dan pengeluaran anggaran. Sehingga dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah yang bisa menghambat pencapaian target.
iv. Dengan adanya ketidakpastian dalam geopolitik dunia hal ini dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada proses pengadaan barang kebutuhan laboratorium yang berasal dari barang impor, untuk hal ini diusahakan untuk mencari penyedian yang berasal dalam negeri untuk menghindari kegagalan atau keterlambatan penyelesaian kontrak pengadaan.

B. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Output

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya didukung dengan 21 Rincian Output dan berikut hasil pengukuran capaian realisasi output dibandingkan dengan capaian realisasi anggarannya sampai triwulan 2 tahun 2026.

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Total Pagu	Target**	Realisasi	Capaian	Capaian thd Total Pagu
a	b	c	d	e	f=e/d	g=e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	6	100,00%	42,86%	5.916.000	3.395.250	1.142.400	33,65%	19,31%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	417	226	291	128,76%	69,78%	13.863.000	3.863.000	680.000	17,60%	4,91%
3	*BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**	5	70%	70%	100,00%	14,00%	32.021.000	24.830.025	29.056.917	117,02%	90,74%
4	*BDB.002 Desa Pangan Aman**	2	25%	25%	100,00%	12,50%	27.862.000	5.207.000	2.597.100	49,88%	9,32%
5	*BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**	1	80%	90%	112,50%	90,00%	29.246.000	17.642.000	11.303.838	64,07%	38,65%
6	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	440	340	757	222,65%	172,05%	53.901.000	23.504.000	20.189.160	85,90%	37,46%
7	BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	204	102	102	100,00%	50,00%	16.863.000	5.071.945	4.535.945	89,43%	26,90%
8	*BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT**	*1*	*50%*	*50%*	100,00%	50,00%	*162.457.000*	*53.891.960*	*47.693.178*	88,50%	29,36%
9	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	6	3	9	300,00%	150,00%	8.926.000	3.101.600	1.545.700	49,84%	17,32%
10	*PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice**	1	50,89%	63,39%	124,56%	63,39%	1.592.864.000	355.632.600	405.386.900	113,99%	25,45%
11	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	2	2	2	100,00%	100,00%	238.890.000	81.876.610	87.444.220	106,80%	36,60%
12	QDC.001 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	45	100,00%	100,00%	*6.120.000*	*4.876.290*	*4.876.290*	100,00%	79,68%
13	*QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT**	*7*	*60%*	*73,57%*	122,62%	10,51%	*6.713.000*	*4.728.000*	*5.273.000*	111,53%	78,55%
14	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	375	198	196	98,99%	52,27%	483.162.000	295.604.570	284.425.190	96,22%	58,87%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Total Pagu	Target**	Realisasi	Capaian	Capaian thd Total Pagu
a	b	c	d	e	f=e/d	g=e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
15	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	951	407	410	100,74%	43,11%	741.979.000	283.780.387	309.738.430	109,15%	41,74%
16	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	15	8	8	100,00%	53,33%	10.742.000	3.703.500	1.530.000	41,31%	14,24%
17	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	2.104.000	2.104.000	2.104.000	100,00%	100,00%
18	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	190	88	89	101,14%	46,84%	267.590.000	128.730.781	106.974.701	83,10%	39,98%
19	*RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice**	*1*	*75,00%*	*75,00%*	100,00%	75,00%	*2.490.734.000*	*1.452.367.577*	*1.452.367.577*	100,00%	58,31%
20	*EBA.956 Layanan BMN**	*1*	*49,98%*	*49,98%*	100,00%	49,98%	*4.500.000*	*2.250.000*	*1.852.300*	82,32%	41,16%
21	*EBA.994 Layanan Perkantoran**	*1*	*49,98%*	*49,98%*	100,00%	49,98%	*9.391.557.000*	*4.628.741.509*	*4.479.145.725*	96,77%	47,69%

** Target berdasarkan progres tahapan*

*** Target berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Aplikasi SAKT*

C. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Kinerja

Balai Besar POM di Palangka Raya dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 memiliki 28 Indikator Kinerja berikut hasil pengukuran capaian realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi anggarannya di triwulan 2 tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	99,79	100,90	100,90	283.780.387	309.738.430	109,15
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	N/A	N/A	N/A	4.876.290	4.876.290	100,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	96,58	103,29	103,29	132.207.385	127.065.145	96,11
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	21.289.800	22.743.900	106,83
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	98,33	105,73	105,73	132.207.385	127.065.145	96,11
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	94,74	111,46	110,00	740.700	306.000	41,31
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	1.481.400	612.000	41,31
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	110,00	1.481.400	612.000	41,31
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,67	100	102,39	102,39	55.683.150	49.104.710	88,19
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	96,25	106,94	106,94	55.683.150	49.104.710	88,19
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99,83	100,84	100,84	5.580.000	0	0,00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	91,67	97,52	97,52	5.071.945	4.535.945	89,43

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	N/A	N/A	N/A	11.784.480	8.765.280	74,38
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,7	78	100,39	100,39	1.808.000.177	1.857.754.477	102,75
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	N/A	N/A	N/A	9.900.000	7.551.000	76,27
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	2.104.000	2.104.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,88	94,24	101,46	101,46	26.605.600	21.734.860	81,69
		18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100,00	100,00	24.830.025	29.056.917	117,02
		19	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	100,00	5.207.000	2.597.100	49,88
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	90	112,50	110,00	17.642.000	11.303.838	64,07
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73	73,57	100,78	100,78	4.728.000	5.273.000	111,53
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	66	100	151,52	110,00	81.876.610	87.444.220	106,80
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00	3.395.250	1.142.400	33,65
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	N/A	N/A	N/A	3.863.000	680.000	17,60
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	90,9	N/A	N/A	1.733.799.652	1.592.403.348	91,84
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	N/A	N/A	N/A	80.597.075	70.781.260	87,82

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	N/A	N/A	N/A	2.789.889.667	2.794.725.335	100,17
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	N/A	N/A	N/A	80.597.075	70.781.260	87,82
Total Capaian PK							2060,25			
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							103,01			
Predikat NKO							**Istimewa**			

D. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain, efisiensi tercapai jika persentase capaian output sama atau lebih tinggi daripada persentase capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

1) Pengukuran Efisiensi Output

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	33,65%	2,97	1,97	75% (tidak efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	128,76%	17,60%	7,31	6,31	75% (tidak efisien)
3	BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*	100,00%	117,02%	0,85	-0,15	Tidak Efisien
4	BDB.002 Desa Pangan Aman*	100,00%	49,88%	2,00	1,00	86% (tidak efisien)
5	BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas*	112,50%	64,07%	1,76	0,76	90% (efisien)
6	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	222,65%	85,90%	2,59	1,59	80% (tidak efisien)
7	BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	100,00%	89,43%	1,12	0,12	100% (efisien)
8	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*	100,00%	88,50%	1,13	0,13	100% (efisien)
9	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	300,00%	49,84%	6,02	5,02	75% (tidak efisien)
10	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	124,56%	113,99%	1,09	0,09	100% (efisien)
11	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	100,00%	106,80%	0,94	-0,06	Tidak Efisien
12	QDC.001 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
13	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	122,62%	111,53%	1,10	0,10	100% (efisien)
14	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	98,99%	96,22%	1,03	0,03	100% (efisien)
15	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,74%	109,15%	0,92	-0,08	Tidak Efisien
16	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	41,31%	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
17	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
18	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,14%	83,10%	1,22	0,22	95% (efisien)
19	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
20	EBA.956 Layanan BMN*	100,00%	82,32%	1,21	0,21	95% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
21	EBA.994 Layanan Perkantoran*	100,00%	96,77%	1,03	0,03	100% (efisien)
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,89	88% (efisien)

Dari 21 Rincian output (RO) 13 RO telah efisien dengan dan 8 RO tidak efisien. Secara umum capaian efisiensi mulai dari -0.15 sampai 6.31 dan secara total capaian efisiensi BBPOM Palangka Raya triwulan 2 tahun 2025 adalah 0,89 dengan kriteria 88% efisien.

2) Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,90	109,15	0,92	-0,08	Tidak Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,29	96,11	1,07	0,07	100% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	106,83	0,94	-0,06	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	105,73	96,11	1,10	0,10	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	111,46	41,31	2,70	1,70	78% (tidak efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	41,31	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,94	41,31	2,78	1,78	78% (tidak efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102,39	88,19	1,16	0,16	100% (efisien)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106,94	88,19	1,21	0,21	95% (efisien)
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,84	0,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	97,52	89,43	1,09	0,09	100% (efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	N/A	74,38	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	100,39	102,75	0,98	-0,02	Tidak Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	N/A	76,27	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101,46	81,69	1,24	0,24	95% (efisien)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	117,02	0,85	-0,15	Tidak Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	49,88	2,00	1,00	86% (tidak efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	112,50	64,07	1,76	0,76	90% (efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,78	111,53	0,90	-0,10	Tidak Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	151,52	106,80	1,42	0,42	92% (efisien)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	33,65	2,97	1,97	75% (tidak efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	17,60	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	91,84	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
26	Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	87,82	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	100,17	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	87,82	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,50	92% (efisien)

N/A : periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang capaian efisiensi adalah dari -0,10 hingga 1,97 dari 28 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya. Dari 28 Indikator kinerja 7 Indikator kinerja belum dalam diukur, 11 Indikator kinerja telah efisien dan 10 indikator kinerja tidak efisien. secara total capaian efisiensi Indikator kinerja BBPOM Palangka Raya triwulan 2 tahun 2026 adalah 0,50 dengan kriteria 92% efisien.

3) Pengukuran Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pengukuran efisiensi per sasaran kegiatan dilakukan dengan merata-rata capaian Indikator kinerja dalam sasaran kegiatannya, hasil pengukuran untuk efisiensi per sasaran kegiatan di BBPOM Palangka raya pada tahun 2026 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
		Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja*	Total Realisasi Anggaran**	Capaian Realisasi anggaran***		
a	b	c	d	e	f	g=(d/f)-1	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15 Indikator	103,17	2.569.835.032	76,76	0,34	95% (efisien)
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	1 Indikator	100,00	2.104.000	100,00	0,00	100% (efisien)
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Indikator	102,87	64.692.715	78,17	0,32	95% (efisien)
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Indikator	100,78	5.273.000	111,53	-0,10	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Indikator	110,00	87.444.220	106,80	0,03	100% (efisien)
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	1 Indikator	100,00	1.142.400	33,65	1,97	75% (tidak efisien)
7	Layanan Publik UPT yang prima	1 Indikator	N/A	680.000	17,60	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	4 Indikator	N/A	4.528.691.203	91,92	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

* Hasil dari rata-rata Capaian Indikator kinerja yang dapat dinilai

** Jumlah realisasi anggaran indikator kinerja dalam sasaran kegiatan

*** Hasil dari Capaian realisasi anggaran Indikator kinerja

Pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran kegiatan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 0,34 dan dari rata-rata per sasaran kegiatan ini capaian efisiensi untuk BBPOM Palangka Raya di triwulan 2 tahun 2026 ini adalah 0,43 dan masuk dalam kriteria 100% Efisien. Berikut analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan:

I. Sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” terdiri atas 15 Indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini capaian efisiensinya adalah 0.34 dan masuk dalam kriteria efisien, dari 15 indikator kinerja yang diukur tingkat efisiensinya ada pada rentang -0.08 sampai 1.78 dari 15 Indikator ini 6 sudah efisien, 6 tidak efisien dan 3 belum dapat dinilai. Dimana ini telah meningkat dari capaian triwulan sebelumnya yang masuk kriteria tidak efisien.

II. Sasaran kegiatan 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi” terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian efisiensi 100% dimana capaian realisasi kinerjanya sama dengan capaian realisasinya anggaranya.

III. Sasaran kegiatan 3 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”. Terdiri atas 4 indikator kinerja dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,32 dari 4 indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini 2 indikator tidak efisien dan 2 indikator yang efisien. Dimana ini telah meningkat dari capaian triwulan sebelumnya yang masuk kriteria tidak efisien.

IV. Sasaran kegiatan 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian efisiensi -0.10% dan masuk kriteria tidak efisien dimana capaian realisasi anggaranya lebih besar dibandingkan capaian realisasi kinerjanya.

V. Sasaran kegiatan 5 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian efisiensi 0.42% dan masuk kriteria efisien.

VI. Sasaran kegiatan 6 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian efisiensi 1.97% dan masuk kriteria tidak efisien dimana capaian realisasi anggaranya jauh lebih kecil dibandingkan capaian realisasi kinerjanya.

VII. Sasaran kegiatan 7 “Layanan Publik UPT yang prima” terdiri atas 1 Indikator Kinerja sudah ada realisasi anggaran tapi belum ada capaian dari realisasi kinerja karena periode pelaporan kinerja indikator ini akan dilaporkan di akhir tahun.

VIII. Sasaran kegiatan 8 “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” terdiri atas 4 Indikator Kinerja sudah ada realisasi anggaran tapi belum ada capaian dari realisasi kinerja karena periode pelaporan kinerja indikator ini akan dilaporkan di akhir tahun.

BADAN POM

BAB 4

Penutup

- *Kesimpulan*
- *Rekomendasi*



Laporan Kinerja 2026

Balai Besar POM di Palangka Raya

BAB 4. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di triwulan 2 tahun 2026, Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil menunjukkan performa organisasi yang sangat baik dengan raihan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **103.01** dengan Predikat NKO **Istimewa.** Secara umum, keberhasilan ini merepresentasikan BBPOM Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan teknis operasional pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya yang mencakup pemeriksaan sarana produksi/distribusi, sertifikasi, sampling, pengujian laboratorium, hingga penindakan hukum terhadap pelanggaran aturan obat dan makanan dengan baik. Hasil kinerja dari tugas pokok tersebut dinilai dengan Indikator 28 dengan pencapaian per indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya pada triwulan 2 tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100,90% dengan kriteria Sangat Baik.
2. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 103,29% dengan kriteria Sangat Baik.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT berhasil tercapai dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik.
5. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 105,73% dengan kriteria Sangat Baik.
6. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berhasil tercapai dengan capaian 111,46% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan
7. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik.
8. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 114,94% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
9. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 102,39% dengan kriteria Sangat Baik.
10. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 106,94% dengan kriteria Sangat Baik.
11. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100,84% dengan kriteria Sangat Baik.

12. Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 97,52% dengan kriteria Baik.
13. Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT belum dapat dinilai pencapainnya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
14. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berhasil tercapai dengan capaian 100,39% dengan kriteria Sangat Baik.
15. Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
16. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
17. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 101,46% dengan kriteria Sangat Baik.
18. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
19. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
20. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berhasil tercapai dengan capaian 112,50% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
21. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPPCPOB Pangan Olahan berhasil tercapai dengan capaian 100,78% dengan kriteria Sangat Baik.
22. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT berhasil tercapai dengan capaian 151,52% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
23. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
24. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
25. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
26. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
27. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.
28. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum dapat dinilai pencapaiannya pada triwulan ini dan akan dapat dinilai pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan 2 tahun 2026, dari 8 sasaran kegiatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, berhasil tercapai dengan capaian 103,17% yang diukur dengan 15 indikator kinerja. Dari 15 indikator kinerja, 12 sudah dapat diukur capaiannya dengan hasil 11 telah capaian realisasinya telah mencapai atau melampaui 100% dan 1 indikator belum mencapai 100%.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi terdiri atas 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik.
3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 102,87% yang diukur dengan 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator tersebut capaian realisasinya telah mencapai atau melampaui 100%
4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu berhasil tercapai dengan capaian 100,78% yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB Pangan Olahan berhasil tercapai dengan capaian 100,78% dengan kriteria Sangat baik.
5. Sasaran Kegiatan Kelima, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 110,00% yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 151,52% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2026 adalah Rp 7.259.677.509,- yang berarti 46.57% dari pagu awal dan 46,63% dari pagu efektif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu efektif paling rendah pada belanja barang yaitu 38.21% dan paling tinggi pada belanja pegawai yang telah direalisasikan 53.62%. Dari 21 Rincian output (RO) 13 RO telah efisien dengan dan 8 RO tidak efisien. Secara umum capaian efisiensi mulai dari -0.15 sampai 6.31 dan secara total capaian efisiensi BBPOM Palangka Raya triwulan 2 tahun 2025 adalah 0,89 dengan kriteria 88% efisien. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang capaian efisiensi adalah dari -0,10 hingga 1,97 dari 28 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya. Dari 28 Indikator kinerja 7 Indikator kinerja belum dalam diukur , 11 Indikator kinerja telah efisien dan 10 indikator kinerja tidak efisien. secara total capaian efisiensi Indikator kinerja BBPOM Palangka Raya triwulan 2 tahun 2026 adalah 0,50 dengan kriteria 92% efisien.

B. Rekomendasi.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama mengingat pemenuhan SDM saat ini baru mencapai 70,97% dari kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). BBPOM di Palangka Raya perlu melakukan pemerataan kompetensi internal untuk mengatasi ketimpangan beban kerja yang berpotensi menurunkan kualitas kinerja. Selain itu, strategi multi-tasking yang telah diterapkan harus terus dipantau secara terukur dengan tetap mengedepankan keseimbangan kapasitas kerja dan kesehatan mental pegawai guna mencegah kelelahan kerja.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, organisasi disarankan untuk memperkuat pengelolaan anggaran berbasis *output* guna menjamin efektivitas penggunaan sumber daya. Pengembangan inovasi digital yang bersifat *low cost-high impact* seperti SMART LAURA perlu terus dioptimalkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah geografis Kalimantan Tengah yang luas dan sulit dijangkau. Fokus pada digitalisasi proses kerja ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pengawasan di media digital guna menghadapi kompleksitas kejahatan siber yang terus meningkat.

Terakhir, penguatan tata kelola organisasi harus difokuskan pada integrasi manajemen risiko yang lebih optimal dengan sistem kinerja. Penerapan *early warning system* kinerja perlu diintensifkan, terutama untuk memantau indikator-indikator yang baru dapat dinilai pada triwulan II atau akhir tahun anggaran. Langkah preventif ini sangat penting untuk memastikan bahwa deviasi kinerja dapat segera dimitigasi sehingga Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) "Istimewa" dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026.

BADAN POM

Lampiran

Lampiran



Laporan Kinerja 2026

Balai Besar POM di Palangka Raya

Lampiran

A. Perjanjian Kinerja tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALI YUDHI HARTANTO
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
ALI YUDHI HARTANTO	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.08 Persentase
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.88 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	3 Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	29.49 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.97 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89.15 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81.2 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 15,575,335,000 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,178,956,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,396,379,000

Palangka Raya, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2026

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	741,979,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.08	6,120,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	231,245,150
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,116,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	231,245,150
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	3,222,600
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,759,700
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	3,759,700
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	110,751,700
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110,751,700
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	18,200,000
		12 - Persentase label produk te	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	16,863,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar													
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	27,888,800
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			77	77	77	77.7	77.7	77.7	78.4	78.4	78.4	79	4,083,596,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	10,555,200
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,104,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	62,827,000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	25	45	70	70	70	72.5	75	82.5	100	8	32,021,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	5	20	25	25	25	25	50	50	70	80	100	3	28,717,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	60	70	80	100	100	100	100	100	1	29,244,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	12.5	22.5	42.5	50	60	72.5	82.5	92.5	92.5	100	29.49	6,713,000
5.	06 - Terlaksanannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		10	36	66	66	66	71	85	95	100	100	100	225,040,000
6.	07 - Terlaksanannya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	5,916,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.97	13,863,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89.15	216,457,250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81.2	75,665,250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	9,245,394,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	21,319,500
														Total	15,575,335,000

Palangka Raya, 26 February 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	741,979,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGADAAN SAMPEL OBAT	248,656,000	248,656,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	G - PENGIRIMAN SAMPEL OBAT KE LABORATORIUM REGIONAL	10,200,000	10,200,000
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL OBAT	90,000,000	90,000,000
4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	202,572,000	202,572,000
5.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, DAN SUPLEMEN KESEHATAN (SEDIAAN FARMASI)	168,155,000	168,155,000
6.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	7,545,000	7,545,000
7.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	10,060,000	10,060,000
8.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENYUSUNAN RENCANA DAN EVALUASI SAMPLING OBAT	4,791,000	4,791,000

	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			27.08	6,120,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE FARMAKOVIGILANS/MONEV PELAPORAN KTD ESO KEPADA PETUGAS TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	6,120,000	6,120,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	231,245,150

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	D - PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	4,560,000	2,280,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	182,133,000	89,245,170
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	147,772,000	72,408,280
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	C - PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	78,329,000	39,164,500
6.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	28,147,200

	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,116,500

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	182,133,000	3,642,660
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	147,772,000	2,955,440
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	3,518,400

	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	231,245,150

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	C - PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	78,329,000	39,164,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	182,133,000	89,245,170
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	28,147,200
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	D - PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	4,560,000	2,280,000
6.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	147,772,000	72,408,280

	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	3,222,600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti oleh stakeholder													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	5,367,000	1,610,100
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	5,375,000	1,612,500

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,759,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	5,375,000	1,881,250
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	5,367,000	1,878,450

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	3,759,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	5,367,000	1,878,450
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	5,375,000	1,881,250

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	110,751,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	30,516,000	12,206,400
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	19,070,000	9,535,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	4,800,000	2,400,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	108,917,000	43,566,800
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	86,087,000	43,043,500

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110,751,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	108,917,000	43,566,800
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	30,516,000	12,206,400
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	86,087,000	43,043,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	4,800,000	2,400,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	19,070,000	9,535,000

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	18,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN PERIKLANAN OMKA/ROKOK	18,200,000	18,200,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilawasi sesuai Standar	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		16,863,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	A - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	0	0
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	16,863,000	16,863,000

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	27,886,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	30,516,000	8,103,200
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	108,917,000	21,783,400

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			77	77	77	77.7	77.7	77.7	78.4	78.4	78.4	79		4,083,598,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - REAKREDITASI KAN BSN	83,030,000	83,030,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	112,695,000	112,695,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - BLOKIR - UJI PROFISIENSI/KOLABORASI/KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM	7,500,000	7,500,000

sesuai Standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Kemampuan Laboratorium												
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			A - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA FOOD SECURITY					39,200,000		39,200,000
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - UJI PROFISIENSI/KOLABORASI/KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM					69,750,000		69,750,000
		8.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium			A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM					1,781,132,000		1,781,132,000
		9.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium			B - PENGADAAN PENAMBAH NILAI ALAT LABORATORIUM					709,602,000		709,602,000
		10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			G - PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH					38,000,000		38,000,000
		11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			F - PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PENGUJIAN DAN BAHAN K3 LABORATORIUM					945,000		945,000
		12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			E - PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM					282,000,000		282,000,000
		13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - PENGADAAN BAKU PEMBANDING					47,700,000		47,700,000
		14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			C - PENGADAAN SUKU CADANG					769,407,000		769,407,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN GLASSWARE	32,910,000	32,910,000
16.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PELATIHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE MIKROBIOLOGI (TERPADU)	11,324,000	11,324,000
17.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PEMENUHAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BBPOM	55,403,000	55,403,000
18.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	Z - BLOKIR - PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	8,000,000	8,000,000
22.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	33,500,000	33,500,000
23.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	Z - BLOKIR - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA FOOD SECURITY	3,500,000	3,500,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	10,555,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	10,555,200

2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100		2,104,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI FORTIFIKASI	2,104,000	2,104,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	62,827,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - PENYEBARAN INFORMASI, PUBLIKASI, PAMERAN, SOSIALISASI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK	1,450,000	1,450,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN	13,400,000	13,400,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - PEMBERDAYAN MASYARAKAT BERSAMA MOBIL LABORATORIUM KELILING DAN PELAYANAN MELALUI INOVASI LAYANAN PUBLIK (LAURA JEMPOL)	18,305,000	18,305,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - FGD TERKAIT PERSEPSI LINTAS SEKTOR TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK DAN PROGRAM BADAN POM	4,760,000	4,760,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - SOSIALISASI PETUGAS/BIMTEK KADER DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK INKLUSIF DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	3,840,000	3,840,000
7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - KIE / BIMTEK/SOSIALISASI MELALUI INOVASI LAYANAN PUBLIK/KEGIATAN SAKA POM/KEGIATAN CFD (Car Free Day)	11,096,000	11,096,000
8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	H - PEMANTAUAN TOKSILOVIGILANCE	1,500,000	1,500,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN SECARA DARING/PODCAST	1,000,000	1,000,000
10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - PENYEBARAN INFORMASI, PAMERAN, PUBLIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN INDEKS KESADARAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT	7,476,000	7,476,000

		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	25	45	70	70	70	72.5	75	82.5	100	8	32,021,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR PJAS DI DAERAH	12,150,000	12,150,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	11,131,000	11,131,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	7,602,000	7,602,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - PENGADAAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	1,138,000	1,138,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Jumlah desa pangan aman	5	20	25	25	25	25	50	50	70	80	100	3	28,717,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	3,570,000	3,570,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA	6,184,000	6,184,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - MONITORING DAN EVALUASI DALAM GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA	9,500,000	9,500,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - PENGADAAN PAKET INFORMASI KEAMANAN PANGAN	1,080,000	1,080,000
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	8,383,000	8,383,000

		08 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	60	70	80	100	100	100	100	100	1	29,244,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	5,247,000	5,247,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	B - LOMBA PROGRAM PRO PIN	3,870,000	3,870,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	C - PENDAMPINGAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	11,880,000	11,880,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - PENGADAAN RAPID TES KIT	4,757,000	4,757,000
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	474,000	474,000
6.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - MONITORING DAN EVALUASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	1,000,000	1,000,000
7.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	2,016,000	2,016,000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan CBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	12.5	22.5	42.5	50	60	72.5	82.5	92.5	92.5	100	29.49	6,713,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - UMKM BERDIKARI FASILITASI/PENDAMPINGAN PEMENUHAN PERSYARATAN REGISTRASI PRODUK UMKM	5,309,000	5,309,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - BIMTEK GMP / SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN BAGI PELAKU USAHA/LAYANAN INKLUSIF	1,404,000	1,404,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	38	66	66	66	71	85	95	100	100	100	225,040,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	470,000	470,000
2.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	78,786,000	78,786,000
3.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	627,000	627,000
4.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	747,000	747,000
5.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,086,000	1,086,000
6.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	44,366,000	44,366,000
7.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	6,064,000	6,064,000
8.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	30,101,000	30,101,000
9.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	15,066,000	15,066,000
10.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1,803,000	1,803,000
11.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	5,400,000	5,400,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	13,328,000	13,328,000
13.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik	2,662,000	2,662,000
14.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmalitrik	15,223,000	15,223,000
15.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	C - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM TAHUN 2026 DI JAWA BARAT	9,301,000	9,301,000

6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	5,916,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	1,161,000	1,161,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - VERIFIKASI DATA HASIL PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	900,000	900,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PENINDAKAN	3,855,000	3,855,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.97	13,863,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - PEMBERIAN/PECABUTAN SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI/DISTRIBUSI/PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN	3,863,000	3,863,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	9,000,000	9,000,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	Z - BLOKIR - LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	1,000,000	1,000,000

8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89.15	216,457,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	53,240,000	16,634,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.958 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Penatausahaan BMN	4,500,000	4,500,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - OPERASIONAL PIMPINAN	24,900,000	24,900,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PEMUSNAHAN BMN	20,000,000	20,000,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	101,585,000	50,792,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENGELOLAAN ARSIP	4,500,000	4,500,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	17,825,000	6,238,750
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM	36,000,000	36,000,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	10,000,000	10,000,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN UNIT DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	40,892,000	40,892,000
02 - Nilai AKIP UPT BPOM				81.2	75,665,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	53,240,000	18,634,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	101,585,000	50,792,500
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	17,825,000	6,238,750
03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	9,245,384,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	216,000,000	216,000,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG	269,040,000	269,040,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	133,704,000	133,704,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1,040,385,000	1,040,385,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,171,094,000	4,171,094,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	524,347,000	524,347,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	69,000,000	69,000,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - LANGGANAN DAYA DAN JASA	631,219,000	631,219,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL PERKANTORAN	210,939,000	210,939,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PEMERIKSAAN RISIKO KESEHATAN	140,000,000	140,000,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN PAKAIAN DINAS	141,066,000	141,066,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PENGADAAN JASA OUTSOURCING	1,695,000,000	1,695,000,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT	3,600,000	3,600,000
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.95	21,319,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	17,825,000	5,347,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	53,240,000	15,972,000

Total 15,575,335,000

Palangka Raya, 26 February 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 tahun 2026

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	741,979,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.08	6,120,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	231,245,150
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,116,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	231,245,150
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	3,222,600
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,759,700
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	3,759,700
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	110,751,700
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110,751,700
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	16,200,000
		12 - Persentase label produk te	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	16,863,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar													
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	27,886,600
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			77	77	77	77.7	77.7	77.7	78.4	78.4	78.4	79	4,083,596,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	10,555,200
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,104,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	62,827,000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	25	45	70	70	70	72.5	75	82.5	100	8	32,021,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	5	20	25	25	25	25	50	50	70	80	100	3	28,717,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	60	70	80	100	100	100	100	100	1	29,244,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB pangan olahan	2.5	12.5	22.5	45.71	63	73	82	87	93	93	96	29.49	6,713,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		10	36	66	66	66	71	85	95	100	100	100	225,040,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	5,916,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Obatan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.97	13,883,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												88.15	218,457,250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81.2	75,665,250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	9,245,384,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	21,319,500
														Total	15,575,335,000

Palangka Raya, 29 May 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	741,979,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGADAAN SAMPEL OBAT	248,658,000	248,658,000
2.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	G - PENGIRIMAN SAMPEL OBAT KE LABORATORIUM REGIONAL	10,200,000	10,200,000
3.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL OBAT	90,000,000	90,000,000
4.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	202,572,000	202,572,000
5.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, DAN SUPLEMEN KESEHATAN (SEDIAAN FARMASI)	168,155,000	168,155,000
6.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	7,545,000	7,545,000
7.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	10,060,000	10,060,000
8.	OR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENYUSUNAN RENCANA DAN EVALUASI SAMPLING OBAT	4,791,000	4,791,000

	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			27.08	6,120,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE FARMAKOVIGILANS/MONEV PELAPORAN KTD ESO KEPADA PETUGAS TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	6,120,000	6,120,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	231,245,150

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	D - PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	4,560,000	2,280,000
3.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	182,133,000	89,245,170
4.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	147,772,000	72,408,280
5.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	C - PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	78,329,000	39,164,500
6.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	28,147,200

	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,116,500

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	182,133,000	3,642,660
2.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	147,772,000	2,955,440
3.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	3,518,400

	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	231,245,150

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	C - PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	78,329,000	39,164,500
2.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	182,133,000	89,245,170
3.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	28,147,200
4.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	D - PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	4,560,000	2,280,000
6.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	B - PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	147,772,000	72,408,280

	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	3,222,600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti oleh stakeholder													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	5,367,000	1,610,100
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	5,375,000	1,612,500

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,759,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	5,375,000	1,881,250
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	5,367,000	1,878,450

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	3,759,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	5,367,000	1,878,450
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	5,375,000	1,881,250

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	110,751,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	30,516,000	12,206,400
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	19,070,000	9,535,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	4,800,000	2,400,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	108,917,000	43,566,800
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	86,087,000	43,043,500

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110,751,700

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	108,917,000	43,566,800
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	30,516,000	12,206,400
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	86,087,000	43,043,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	4,800,000	2,400,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	19,070,000	9,535,000

11 - Persentase obat sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	18,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN PERIKLANAN OMKA/ROKOK	18,200,000	18,200,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		16,863,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	A - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	0	0
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	16,863,000	16,863,000

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	27,886,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	30,516,000	6,103,200
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, MAKANAN DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	108,917,000	21,783,400

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			77	77	77	77.7	77.7	77.7	78.4	78.4	78.4	79		4,083,596,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - REAKREDITASI KAN BSN	83,030,000	83,030,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	112,695,000	112,695,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - BLOKIR - UJI PROFISIENSI/KOLABORASI/KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM	7,500,000	7,500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO.	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Kemampuan Laboratorium											
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA FOOD SECURITY					39,200,000	39,200,000
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				B - UJI PROFISIENSI/KOLABORASI/KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM					69,750,000	69,750,000
		8.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/penemajaan alat laboratorium				A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM					1,781,132,000	1,781,132,000
		9.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/penemajaan alat laboratorium				B - PENGADAAN PENAMBAH NILAI ALAT LABORATORIUM					709,602,000	709,602,000
		10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				G - PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH					36,000,000	36,000,000
		11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				F - PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PENGUJIAN DAN BAHAN K3 LABORATORIUM					945,000	945,000
		12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				E - PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM					282,000,000	282,000,000
		13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				D - PENGADAAN BAKU PEMBANDING					47,700,000	47,700,000
		14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				C - PENGADAAN SUKU CADANG					769,407,000	769,407,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN GLASSWARE	32,910,000	32,910,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PELATIHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE MIKROBIOLOGI (TERPADU)	11,324,000	11,324,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PEMENUHAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BBPOM	55,403,000	55,403,000
18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	Z - BLOKIR - PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	8,000,000	8,000,000
22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	33,500,000	33,500,000
23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	058 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	Z - BLOKIR - OPERASIONAL LABORATORIUM KEULING DALAM RANGKA FOOD SECURITY	3,500,000	3,500,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	10,555,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	70,368,000	10,555,200

2.	02 – Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100		2,104,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI FORTIFIKASI	2,104,000	2,104,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	92.88	62,827,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - PENYEBARAN INFORMASI, PUBLIKASI, PAMERAN, SOSIALISASI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK	1,450,000	1,450,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN	13,400,000	13,400,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - PEMBERDAYAN MASYARAKAT BERSAMA MOBIL LABORATORIUM KELILING DAN PELAYANAN MELALUI INOVASI LAYANAN PUBLIK (LAURA JEMPOL)	18,305,000	18,305,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - FGD TERKAIT PERSEPSI LINTAS SEKTOR TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK DAN PROGRAM BADAN POM	4,760,000	4,760,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - SOSIALISASI PETUGAS/BIMTEK KADER DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK INKLUSIF DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	3,840,000	3,840,000
7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - KIE / BIMTEK/SOSIALISASI MELALUI INOVASI LAYANAN PUBLIK/KEGIATAN SAKA POM/KEGIATAN CFD (Car Free Day)	11,096,000	11,096,000
8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	H - PEMANTAUAN TOKSILOVIGILANCE	1,500,000	1,500,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN SECARA DARING/PODCAST	1,000,000	1,000,000
10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - PENYEBARAN INFORMASI, PAMERAN, PUBLIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN INDEKS KESADARAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT	7,476,000	7,476,000

	04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	25	45	70	70	70	72.5	75	82.5	100	8	32,021,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR PJAS DI DAERAH	12,150,000	12,150,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	11,131,000	11,131,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	7,602,000	7,602,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - PENGADAAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	1,138,000	1,138,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Jumlah desa pangan aman	5	20	25	25	25	25	50	50	70	80	100	3	28,717,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	3,570,000	3,570,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA	6,184,000	6,184,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - MONITORING DAN EVALUASI DALAM GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA	9,500,000	9,500,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - PENGADAAN PAKET INFORMASI KEAMANAN PANGAN	1,080,000	1,080,000
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	8,383,000	8,383,000

		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	60	70	80	100	100	100	100	100	1	29,244,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dan bahan berbahaya	B - PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	5,247,000	5,247,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	B - LOMBA PROGRAM PRO PN	3,870,000	3,870,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	C - PENDAMPINGAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	11,880,000	11,880,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - PENGADAAN RAPID TES KIT	4,757,000	4,757,000
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dan bahan berbahaya	A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	474,000	474,000
6.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - MONITORING DAN EVALUASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	1,000,000	1,000,000
7.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	2,016,000	2,016,000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	12.5	22.5	45.71	63	73	82	87	93	93	96	29.49	6,713,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - UMKM BERDIKARI FASILITASI/PENDAMPINGAN PEMENUHAN PERSYARATAN REGISTRASI PRODUK UMKM	5,309,000	5,309,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - BIMTEK GMP / SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN BAGI PELAKU USAHA/LAYANAN INKLUSIF	1,404,000	1,404,000

NO.															
9.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	36	66	66	66	71	85	95	100	100	100	225,040,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	470,000	470,000
2.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	78,786,000	78,786,000
3.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	627,000	627,000
4.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	747,000	747,000
5.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,096,000	1,096,000
6.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	44,366,000	44,366,000
7.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	6,064,000	6,064,000
8.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	30,101,000	30,101,000
9.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	15,066,000	15,066,000
10.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1,803,000	1,803,000
11.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	5,400,000	5,400,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	13,328,000	13,328,000
13.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmaltitrik	2,662,000	2,662,000
14.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)	B - Pelaksanaan Wasmaltitrik	15,223,000	15,223,000
15.	DR.3165.QCD.U32 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)	C - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM TAHUN 2026 DI JAWA BARAT	9,301,000	9,301,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	5,916,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	1,161,000	1,161,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - VERIFIKASI DATA HASIL PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	900,000	900,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PENINDAKAN	3,855,000	3,855,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.97	13,863,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - PEMBERIAN/PECABUTAN SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI/DISTRIBUSI/PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN	3,863,000	3,863,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	9,000,000	9,000,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	Z - BLOKIR - LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	1,000,000	1,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89.15	215,457,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	53,240,000	18,634,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Penatausahaan BMN	4,500,000	4,500,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - OPERASIONAL PIMPINAN	24,900,000	24,900,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PEMUSNAHAN BMN	20,000,000	20,000,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	101,585,000	50,792,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENGELOLAAN ARSIP	4,500,000	4,500,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	17,825,000	6,238,750
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM	36,000,000	36,000,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	10,000,000	10,000,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN UNIT DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	40,892,000	40,892,000
02 - Nilai AKIP UPT BPOM				81.2	75,665,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	53,240,000	18,634,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	101,585,000	50,792,500
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	17,825,000	6,238,750
03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	9,245,384,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	216,000,000	216,000,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG	269,040,000	269,040,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	133,704,000	133,704,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1,040,385,000	1,040,385,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,171,094,000	4,171,094,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	524,347,000	524,347,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	69,000,000	69,000,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - LANGGANAN DAYA DAN JASA	631,219,000	631,219,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL PERKANTORAN	210,939,000	210,939,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PEMERIKSAAN RISIKO KESEHATAN	140,000,000	140,000,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN PAKAIAN DINAS	141,066,000	141,066,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PENGADAAN JASA OUTSOURCING	1,695,000,000	1,695,000,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT	3,600,000	3,600,000
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			2.95	21,319,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	17,825,000	5,347,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	53,240,000	15,972,000

Total 15,575,335,000

Palangka Raya, 29 May 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Pengukuran Capaian Output Triwulan 2 tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Total Pagu	Target**	Realisasi	Capaian	Capaian thd Total Pagu
a	b	c	d	e	f=e/d	g=e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	6	100,00%	42,86%	5.916.000	3.395.250	1.142.400	33,65%	19,31%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	417	226	291	128,76%	69,78%	13.863.000	3.863.000	680.000	17,60%	4,91%
3	*BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**	5	70%	70%	100,00%	14,00%	32.021.000	24.830.025	29.056.917	117,02%	90,74%
4	*BDB.002 Desa Pangan Aman**	2	25%	25%	100,00%	12,50%	27.862.000	5.207.000	2.597.100	49,88%	9,32%
5	*BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**	1	80%	90%	112,50%	90,00%	29.246.000	17.642.000	11.303.838	64,07%	38,65%
6	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	440	340	757	222,65%	172,05%	53.901.000	23.504.000	20.189.160	85,90%	37,46%
7	BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	204	102	102	100,00%	50,00%	16.863.000	5.071.945	4.535.945	89,43%	26,90%
8	*BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat*	*1*	*50%*	*50%*	100,00%	50,00%	*162.457.000*	*53.891.960*	*47.693.178*	88,50%	29,36%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Total Pagu	Target**	Realisasi	Capaian	Capaian thd Total Pagu
a	b	c	d	e	f=e/d	g=e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
	*dan Makanan oleh UPT**										
9	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	6	3	9	300,00%	150,00%	8.926.000	3.101.600	1.545.700	49,84%	17,32%
10	*PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice**	1	50,89%	63,39%	124,56%	63,39%	1.592.864.000	355.632.600	405.386.900	113,99%	25,45%
11	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	2	2	2	100,00%	100,00%	238.890.000	81.876.610	87.444.220	106,80%	36,60%
12	QDC.001 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	45	100,00%	100,00%	*6.120.000*	*4.876.290*	*4.876.290*	100,00%	79,68%
13	*QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT**	*7*	*60%*	*73,57%*	122,62%	10,51%	*6.713.000*	*4.728.000*	*5.273.000*	111,53%	78,55%
14	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	375	198	196	98,99%	52,27%	483.162.000	295.604.570	284.425.190	96,22%	58,87%
15	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang	951	407	410	100,74%	43,11%	741.979.000	283.780.387	309.738.430	109,15%	41,74%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Total Pagu	Target**	Realisasi	Capaian	Capaian thd Total Pagu
a	b	c	d	e	f=e/d	g=e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
	Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT										
16	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	15	8	8	100,00%	53,33%	10.742.000	3.703.500	1.530.000	41,31%	14,24%
17	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	2.104.000	2.104.000	2.104.000	100,00%	100,00%
18	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	190	88	89	101,14%	46,84%	267.590.000	128.730.781	106.974.701	83,10%	39,98%
19	*RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice**	*1*	*75,00%*	*75,00%*	100,00%	75,00%	*2.490.734.000*	*1.452.367.577*	*1.452.367.577*	100,00%	58,31%
20	*EBA.956 Layanan BMN**	*1*	*49,98%*	*49,98%*	100,00%	49,98%	*4.500.000*	*2.250.000*	*1.852.300*	82,32%	41,16%
21	*EBA.994 Layanan Perkantoran**	*1*	*49,98%*	*49,98%*	100,00%	49,98%	*9.391.557.000*	*4.628.741.509*	*4.479.145.725*	96,77%	47,69%

** Target berdasarkan progres tahapan*

*** Target berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Aplikasi SAKTI*

E. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan 2 tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	99,79	100,90	100,90	283.780.387	309.738.430	109,15
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	N/A	N/A	N/A	4.876.290	4.876.290	100,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	96,58	103,29	103,29	132.207.385	127.065.145	96,11
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	21.289.800	22.743.900	106,83
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	98,33	105,73	105,73	132.207.385	127.065.145	96,11
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	94,74	111,46	110,00	740.700	306.000	41,31
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	1.481.400	612.000	41,31
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	110,00	1.481.400	612.000	41,31

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,67	100	102,39	102,39	55.683.150	49.104.710	88,19
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	96,25	106,94	106,94	55.683.150	49.104.710	88,19
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99,83	100,84	100,84	5.580.000	0	0,00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	91,67	97,52	97,52	5.071.945	4.535.945	89,43
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	N/A	N/A	N/A	11.784.480	8.765.280	74,38
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,7	78	100,39	100,39	1.808.000.177	1.857.754.477	102,75
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	N/A	N/A	N/A	9.900.000	7.551.000	76,27
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	2.104.000	2.104.000	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,88	94,24	101,46	101,46	26.605.600	21.734.860	81,69
		18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100,00	100,00	24.830.025	29.056.917	117,02
		19	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	100,00	5.207.000	2.597.100	49,88
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	90	112,50	110,00	17.642.000	11.303.838	64,07
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73	73,57	100,78	100,78	4.728.000	5.273.000	111,53
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	66	100	151,52	110,00	81.876.610	87.444.220	106,80
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00	3.395.250	1.142.400	33,65
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	N/A	N/A	N/A	3.863.000	680.000	17,60

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	90,9	N/A	N/A	1.733.799.652	1.592.403.348	91,84
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	N/A	N/A	N/A	80.597.075	70.781.260	87,82
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	N/A	N/A	N/A	2.789.889.667	2.794.725.335	100,17
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	N/A	N/A	N/A	80.597.075	70.781.260	87,82
Total Capaian PK							2060,25			
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							103,01			
Predikat NKO							**Istimewa**			

N/A : periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut.

F. Pengukuran Capaian efisiensi Output Triwulan 2 tahun 2026

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	33,65%	2,97	1,97	75% (tidak efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	128,76%	17,60%	7,31	6,31	75% (tidak efisien)
3	BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*	100,00%	117,02%	0,85	-0,15	Tidak Efisien
4	BDB.002 Desa Pangan Aman*	100,00%	49,88%	2,00	1,00	86% (tidak efisien)
5	BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas*	112,50%	64,07%	1,76	0,76	90% (efisien)
6	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	222,65%	85,90%	2,59	1,59	80% (tidak efisien)
7	BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	100,00%	89,43%	1,12	0,12	100% (efisien)
8	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*	100,00%	88,50%	1,13	0,13	100% (efisien)
9	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	300,00%	49,84%	6,02	5,02	75% (tidak efisien)
10	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	124,56%	113,99%	1,09	0,09	100% (efisien)
11	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	100,00%	106,80%	0,94	-0,06	Tidak Efisien
12	QDC.001 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
13	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	122,62%	111,53%	1,10	0,10	100% (efisien)
14	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	98,99%	96,22%	1,03	0,03	100% (efisien)
15	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,74%	109,15%	0,92	-0,08	Tidak Efisien
16	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	41,31%	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
17	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
18	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,14%	83,10%	1,22	0,22	95% (efisien)
19	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
20	EBA.956 Layanan BMN*	100,00%	82,32%	1,21	0,21	95% (efisien)
21	EBA.994 Layanan Perkantoran*	100,00%	96,77%	1,03	0,03	100% (efisien)
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,89	88% (efisien)

G. Pengukuran Capaian efisiensi Kinerja Triwulan 2 tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,90	109,15	0,92	-0,08	Tidak Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,29	96,11	1,07	0,07	100% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	106,83	0,94	-0,06	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	105,73	96,11	1,10	0,10	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	111,46	41,31	2,70	1,70	78% (tidak efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	41,31	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,94	41,31	2,78	1,78	78% (tidak efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102,39	88,19	1,16	0,16	100% (efisien)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106,94	88,19	1,21	0,21	95% (efisien)
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,84	0,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	97,52	89,43	1,09	0,09	100% (efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	N/A	74,38	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,39	102,75	0,98	-0,02	Tidak Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	N/A	76,27	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101,46	81,69	1,24	0,24	95% (efisien)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	117,02	0,85	-0,15	Tidak Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	49,88	2,00	1,00	86% (tidak efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	112,50	64,07	1,76	0,76	90% (efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,78	111,53	0,90	-0,10	Tidak Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	151,52	106,80	1,42	0,42	92% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	33,65	2,97	1,97	75% (tidak efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	17,60	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	91,84	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
26	Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	87,82	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	100,17	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	87,82	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,50	92% (efisien)

N/A : periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut.

H. RHPK Indikator Kinerja Triwulan 2 tahun 2026

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari		80.74	30.00	12.50	30.00	38.31
Februari	98.90	87.04	97.27	100.00	100.00	96.08
Maret	98.90	92.54	100.00	100.00	100.00	98.13
April	98.90	98.17	100.00	100.00	97.67	98.96
Mei	98.90	98.59	100.00	100.00	100.00	99.65
Juni	98.90	99.15	100.00	100.00	100.00	99.79

2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	93,50	50.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	93,50	84.21	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	96.05
Maret	93,50	74.36	100.00	100.00	94.87	100.00	#DIV/0!	92.95
April	93,50	78.31	100.00	100.00	97.59	100.00	#DIV/0!	94.28
Mei	93,50	86.78	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	96.69
Juni	93,50	88.26	100.00	100.00	100.00	96.12	#DIV/0!	96.58

4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)	TARGET INDIKATOR (n)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%					
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)		
Januari				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
Februari	Nasi putih, Telur ceplok asam manis, Tempe, Mix Vegetable, Melon	40	40	100%	30%	40	40	100%	35%	3	3	100%	35%	100,00	100%
Maret		40	40	100%	30%	40	40	100%	35%	3	3	100%	35%	100,00	100%
April		40	40	100%	30%	40	40	100%	35%	3	3	100%	35%	100,00	100%
Mei		40	40	100%	30%	40	40	100%	35%	3	3	100%	35%	100,00	100%
Juni		40	40	100%	30%	40	40	100%	35%	3	3	100%	35%	100,00	100%

5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	93,00	50.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	93,00	76.67	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	94.17
April	93,00	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	97.92
Mei	93,00	98.33	100.00	100.00	100.00	86.21	100.00	98.29
Juni	93,00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	98.33

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	85,00	33.33	100.00	66.67
Februari	85,00	41.67	100.00	70.83
Maret	85,00	86.67	100.00	93.33
April	85,00	78.95	100.00	89.47
Mei	85,00	92.86	100.00	96.43
Juni	85,00	89.47	100.00	94.74

7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Maret	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
April	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Mei	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Juni	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00

8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	87.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	
Februari	87.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	
Maret	87.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
April	87.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	100.00
Mei	87.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00
Juni	87.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00

9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari	97,67	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
Februari	97,67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Maret	97,67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
April	97,67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mei	97,67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juni	97,67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	90	5	5	20,00	5	5	70,00	5	5	10,00	100,00
Februari	90	9	11	16,36	9	9	70,00	9	9	10,00	96,36
Maret	90	15	15	20,00	15	15	70,00	15	15	10,00	100,00
April	90	19	18	20,00	19	19	70,00	17	19	8,95	98,95
Mei	90	21	21	20,00	21	21	70,00	19	21	9,05	99,05
Juni	90	24	24	20,00	23	24	67,08	22	24	9,17	96,25

11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Februari	99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,07	100,01
April	99	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50	99,50
Mei	99	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	99,80
Juni	99	100,00	100,00	100,00	100,00	99,17	99,83

12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)
Januari	94,00	100,00	100,00	100,00
Februari	94,00	100,00	100,00	100,00
Maret	94,00	100,00	66,67	83,33
April	94,00	100,00	75,00	87,50
Mei	94,00	100,00	80,00	90,00
Juni	94,00	100,00	83,33	91,67

13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : BBPOM di Palangkaraya
Triwulan/Tahun : 2/2026
Tanggal Penilaian : 23 Juni 2026
Nama Tim Penilai : 1. Marcella Sutanta, S.Si
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	81.4	78.0	77.7	100.4
2.	Staandar Peralatan	81.83			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	90			
4.	Standar Metode Terverifikasi	29.8			

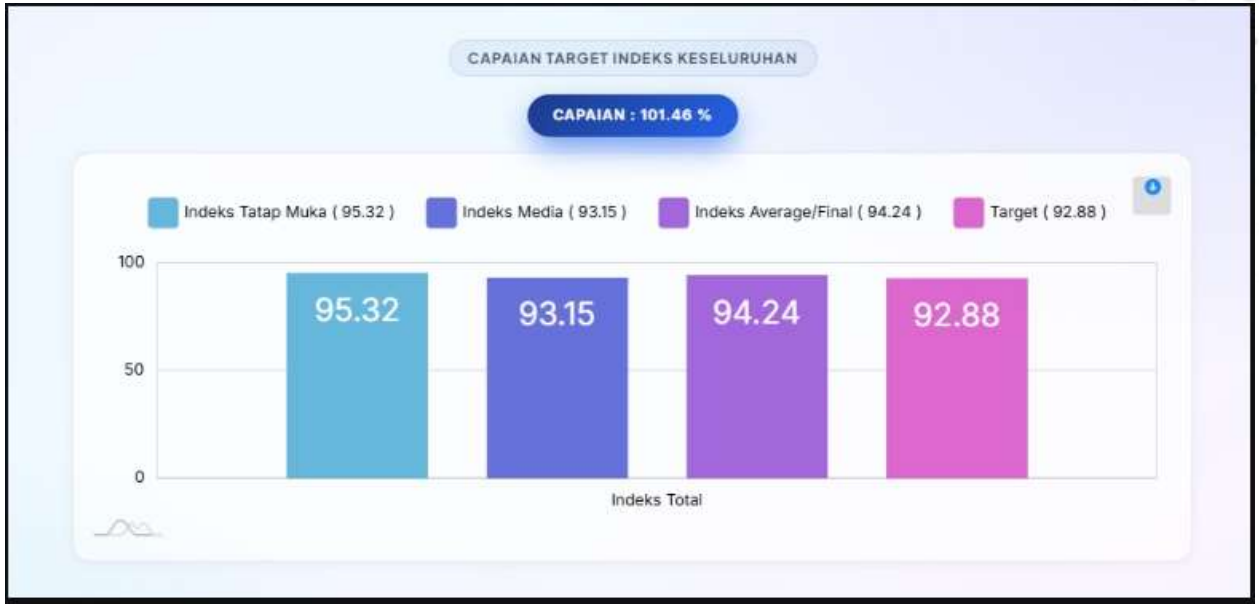
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

16) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari		0	1	0,00
Februari		0	1	0,00
Maret		0	1	0,00
April	100	1	1	100,00
Mei	100	1	1	100,00
Juni	100	1	1	100,00

17) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



18) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (25%)	Pengawalan (5%)	Realisasi
Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Februari	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Maret	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
April	45	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Mei	70	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00
Juni	70	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00

19) Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi
Januari	5	5,00					5.00
Februari	20	20,00					20.00
Maret	25	25,00					25.00
April	25	25.00					25.00
Mei	25	25.00					25.00
Juni	25	25.00					25.00

20) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20%)	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi
Januari	5	5.00					5.00
Februari	20	20.00					20.00
Maret	25	25.00					25.00
April	60	25.00	25.00	5.00	10.00		65.00
Mei	70	25.00	25.00	10.00	10.00		70.00
Juni	80	25.00	25.00	20.00	20.00		90.00

21) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
Januari	2.5	45.00	0.00	0.00	4.09	11
Februari	12.5	145.00	0.00	0.00	13.18	11
Maret	22.5	330.00	10.00	10.00	31.82	11
April	45.71	300.00	10.00	10.00	45.71	7
Mei	63	385.00	30.00	30.00	63.57	7
Juni	73	435.00	40.00	40.00	73.57	7

22) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	**Nilai Realisasi SPDP**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	**Nilai Realisasi Tahap I**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	**Nilai Realisasi P21**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	**Nilai Realisasi Tahap II**	% Keberhasilan Perkara
Januari	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	10	3	2	0,3	0	0	0	0	0	0	10,00
Maret	36	3	0	0	2	1,1	0	0	0	0	36,67
April	66	3	0	0	0	0	0	0	2	2	66,67
Mei	66	2	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00
Juni	66	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,00

23) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Lampiran
Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan
Nomor : PR.09.02.63.07.26.619
Tanggal : 06 Juli 2026

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Balai Besar POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Denpasar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kendari													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kupang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Makassar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Manado													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
13.	Mataram													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Medan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Padang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palangkaraya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Palembang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palu													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

24) Indeks Pelayanan Publik UPT
(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

25) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

No	Unit Kerja	Nilai ZI 2026	Capaian Kinerja	Keterangan
	Prekursor, dan Zat Adiktif			
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89.04	B (3.75)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai total LKE <90 b. nilai area penataan sistem manajemen SDM <75%*)
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	88.70	D (1.25)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai total LKE <90 b. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (B)
6	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.42	D (1.25)	Tidak Memenuhi Syarat karena nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (B)
7	Balai Besar POM di Pekanbaru	85.82	D (1.25)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai total LKE <90 b. nilai area penataan tata laksana <75%*) c. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (B)
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	89.86	B (3.75)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai total LKE <90 b. nilai area penataan sistem manajemen SDM <75%*)
9	**Balai Besar POM di Jakarta**	**93.89**	**B (3.75)**	**Memenuhi Syarat untuk diajukan WBBM**
10	Balai Besar POM di Bandung	89.26	D (1.25)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (B) b. nilai total LKE <90
11	**Balai Besar POM di Semarang**	**93.82**	**B (3.75)**	**Memenuhi Syarat untuk diajukan WBBM**
12	Balai Besar POM di Kupang	86.62	D (1.25)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (B) b. nilai total LKE <90
13	Balai Besar POM di Pontianak	88.86	D (1.25)	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (B) b. nilai total LKE <90 c. nilai area penguatan penataan sistem SDM <75%*)
14	**Balai Besar POM di Palangka Raya**	**90.90**	**B (3.75)**	**Memenuhi Syarat untuk diajukan WBBM**

26) Nilai AKIP UPT BPOM
(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

27) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

28) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
(Target dan Periode Pelaporan Realisasi pada Akhir Tahun)

BerAKHLAK

BADAN POM

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya

2026

Lakip Interim Triwulan II

"Akuntabel dalam Tindakan
Terpercaya dalam Pengawasan."



1500533

palangkaraya.pom.go.id